



**LKJ
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2017**



**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

2018



**LKJ
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2017**



**BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

2018



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017. Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua dalam masa RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. LKj Tahun 2017 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2017 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2016-2021).

LKj Pemerintah Provinsi Jambi disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Pemprov Jambi. Komitmen dalam penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, geografis, sisi historis, demografis, kinerja ekonomi, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Pemprov Jambi. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Pemprov Jambi pada tahun 2017.

Kami sadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang sehingga Jambi TUNTAS yang diharapkan bisa terwujud. Berkenaan dengan itu, LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jambi, Maret 2018


a.n. Gubernur Jambi
SEKRETARIS DAERAH

Drs. A. M. DIANTO, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19610110 198503 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Daerah	1
1.2.1 Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan	1
1.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi.....	2
1.2.3 Kondisi Ekonomi	7
1.3 Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.1.1 Visi dan Misi.....	11
2.1.2 Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja Utama	12
2.2 Perjanjian Kinerja	18
Bab III Berisi:.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 Capaian Kinerja.....	23
3.1.1 Capaian IKU.....	24
3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
3.2 Indikator Kinerja Lainnya.....	154
3.2.1 Kinerja Kesehatan.....	154
3.2.2 Kinerja Pendidikan.....	155
3.2.3 Kinerja Ekonomi.....	160
3.3 Realisasi Anggaran.....	162
BAB IV PENUTUP.....	161



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Provinsi Jambi	2
Tabel 1.2	Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi.....	3
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota	5
Tabel 1.4	Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota	6
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017	19
Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja.....	23
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2017.....	24
Tabel 3.3	Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2017	27
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP	33
Tabel 3.5	Perkembangan Capaian Nilai pada Komponen SAKIP	33
Tabel 3.6	Realisasi Capaian Indikator hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan	35
Tabel 3.7	Kriteria efisiensi kinerja Keuangan berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996	37
Tabel 3.8	Capaian Indikator Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah	37
Tabel 3.9	Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2017.....	38
Tabel 3.10	Capaian Indikator Indeks Transparansi Pemerintah.....	39
Tabel 3.11	Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017.....	43
Tabel 3.12	Konversi Indeks Menjadi Mutu Pelayanan dan Kinerja	44
Tabel 3.13	Capaian Indikator Indeks kepuasan Masyarakat	46
Tabel 3.14	Rincian Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan pada tahun 2017	46
Tabel 3.15	Capaian Indikator Usia harapan Hidup	49
Tabel 3.16	Capaian Indikator Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran).....	55
Tabel 3.17	Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016	57
Tabel 3.18	Cakupan kunjungan ibu hamil, persalinan ditolong tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu nifas di Provinsi Jambi	57
Tabel 3.19	Capaian Indikator Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	59
Tabel 3.20	Jumlah Kematian Bayi Tahun 2016.....	61
Tabel 3.21	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Jambi ...	61
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Indikator Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	63

Tabel 3.23	Cakupan Data Kualifikasi Posyandu di Provinsi Jambi Tahun 2017	64
Tabel 3.24	Capaian Indikator Angka Melanjutkan ke PT Akreditasi A	66
Tabel 3.25	Capaian Indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK	68
Tabel 3.26	Capaian Indikator Kinerja HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Karya Seni.....	71
Tabel 3.27	HAKI Karya Seni Provinsi Jambi Tahun 2017	72
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebebasan Berkeyakinan	75
Tabel 3.29	Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender	78
Tabel 3.30	Capaian Kinerja indikator Indeks pemberdayaan gender (IPG)	80
Tabel 3.31	Capaian Indikator Indeks Kebebasan Sipil.....	83
Tabel 3.32	Capaian Indikator Total Factor Productivity (TFP)	86
Tabel 3.33	Capaian Indikator persentase share sektor sekunder terhadap PDRB	87
Tabel 3.34	Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2016.....	90
Tabel 3.35	Capaian indikator ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)	91
Tabel 3.36	Data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Provinsi Jambi Tahun 2017 (ATAP 2016).....	91
Tabel 3.37	Kondisi Ketersediaan dari Kemampuan Produksi Tahun 2016 (ATAP) dan Tahun 2017 (ARAM II), Jumlah Konsumsi Penduduk dan Kebutuhan Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)	92
Tabel 3.38	Capaian indikator persentase peningkatan luas lahan dengan IP 200 dan IP 300.....	94
Tabel 3.39	Luas Lahan sawah dengan Indeks Pertanaman 200.....	95
Tabel 3.40	Luas Lahan sawah dengan Indeks Pertanaman 300.....	96
Tabel 3.41	Capaian indikator Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	102
Tabel 3.42	Capaian indikator jalan dalam kondisi mantap.....	104
Tabel 3.43	Rasio Desa Berlistrik per Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi	109
Tabel 3.44	Capaian Indikator Rasio elektrifikasi	110
Tabel 3.45	Kapasitas Pembangkit yang ada di Provinsi Jambi	112
Tabel 3.46	Proyeksi neraca daya Provinsi Jambi.....	112
Tabel 3.47	Capaian Indikator Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	115
Tabel 3.48	Capaian Indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	117

Tabel 3.49	Capaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik per Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Jambi	118
Tabel 3.50	Potensi Geothermal Provinsi Jambi	120
Tabel 3.51	Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi	120
Tabel 3.52	Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci	121
Tabel 3.53	Capaian indikator persentase peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	122
Tabel 3.54	Data PKP2B di Provinsi Jambi	125
Tabel 3.55	Capaian indikator persentase perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat <i>good mining practice</i>	125
Tabel 3.56	Realisasi PNBP bidang pertambangan tahun 2013-2017	126
Tabel 3.57	Jumlah Produksi Batubara dan Bijih Besi	126
Tabel 3.58	Capaian indikator persentase perusahaan proper hijau	127
Tabel 3.59	Daftar Perusahaan dengan Proper Hijau Tahun 2017	128
Tabel 3.60	Capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan Industri Ekowisata	130
Tabel 3.61	Capaian Indikator Indeks Tata Kelola Hutan	132
Tabel 3.62	Capaian Indikator Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	134
Tabel 3.63	Capaian Indikator Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	137
Tabel 3.64	Sebaran lokasi PETI komoditi emas di Provinsi Jambi Tahun 2017	138
Tabel 3.65	Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	140
Tabel 3.66	Data Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2017	142
Tabel 3.67	Penurunan Emisi GRK dari Limbah	143
Tabel 3.68	Capaian Indikator angka kemiskinan Provinsi Jambi	146
Tabel 3.69	Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka	148
Tabel 3.70	Capaian indikator Laju Pertumbuhan Penduduk	152
Tabel 3.71	PDRB atas Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jambi Tahun 2016-2017	161
Tabel 3.72	Nilai Inflasi Tahun 2013-2017 Provinsi Jambi	161
Tabel 3.73	Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2017	162



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Provinsi Jambi.....	3
Gambar 1.2	Perbandingan Penduduk Laki-laki dengan perempuan perkabupaten/ kota dalam Provinsi Jambi	6
Gambar 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dibandingkan Nasional Tahun 2013 - 2017	7
Gambar 1.4	Inflasi Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2013 - 2017.....	7
Gambar 1.5	Angka Kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan Nasional Tahun 2013-2017.....	8
Gambar 3.1	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	27
Gambar 3.2	Capaian Sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efisien	32
Gambar 3.3	Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2017	35
Gambar 3.4	Penerimaan hasil audit BPK atas laporan	35
Gambar 3.5	Transparansi informasi publik pada web resmi Pemerintah Provinsi Jambi dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.....	40
Gambar 3.6	Tampilan e-government pada <i>situation room</i> Pemerintah Provinsi Jambi.....	40
Gambar 3.7	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah yang Melayani Publik	41
Gambar 3.8	IKM masing-masing Perangkat Daerah dibandingkan IKM Provinsi Jambi Tahun 2017	45
Gambar 3.9	Capaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.....	48
Gambar 3.10	Perbandingan capaian indikator usia harapan hidup Provinsi Jambi dengan usia harapan hidup Indonesia.....	50
Gambar 3.11	Rasio Puskesmas Per satuan Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016	51
Gambar 3.12	Rasio posyandu per satuan balita	51
Gambar 3.13	Rasio Dokter Umum, Perawat dan Bidan dengan Puskesmas di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016.....	52
Gambar 3.14	Rasio Dokter Umum, Perawat dan Bidan dengan Puskesmas di kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi Tahun 2016	53
Gambar 3.15	Rasio dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis per 1.000 penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016.....	54

Gambar 3.16	Rasio Tenaga kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016	54
Gambar 3.17	Angka Kematian Ibu (kasus) dan Konversi AKI per 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016	56
Gambar 3.18	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Provinsi Jambi Tahun 1991-2012	60
Gambar 3.19	Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah.....	65
Gambar 3.20	Rasio Guru dengan Murid SMAN dan SMKN pada kabupaten/ kota se Provinsi Jambi Tahun 2016.....	69
Gambar 3.21	Rasio sekolah dengan murid SMAN dan SMKN pada kabupaten/kota se Provinsi Jambi Tahun 2016.....	69
Gambar 3.22	Capaian sasaran Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	71
Gambar 3.23	Karya budaya tradisi tak tak benda Indonesia Tahun 2017	73
Gambar 3.24	Capaian sasaran meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama.....	75
Gambar 3.25	Perkembangan komponen indeks kebebasan berkeyakinan Provinsi Jambi.....	76
Gambar 3.26	Capaian sasaran meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.....	78
Gambar 3.27	IPG Provinsi Jambi dibandingkan dengan IPG Nasional	79
Gambar 3.28	IDG Provinsi Jambi dibandingkan dengan IDG Nasional	81
Gambar 3.29	Capaian sasaran meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum	82
Gambar 3.30	Jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi	83
Gambar 3.31	Salah satu aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jambi	84
Gambar 3.32	Capaian Sasaran Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	85
Gambar 3.33	Capaian sasaran perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah.....	87
Gambar 3.34	Capaian sasaran meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal	90
Gambar 3.35	Capaian sasaran meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan.....	94
Gambar 3.36	Capaian Sasaran akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	102
Gambar 3.37	Capaian Sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik.....	109

Gambar 3.38	Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional.....	111
Gambar 3.39	Penandatanganan <i>Letter of Intent</i> (LoI) Pembangunan PLTMH di Jambi.....	111
Gambar 3.40	Capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	115
Gambar 3.41	Perbandingan capaian proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Provinsi Jambi dengan nasional	116
Gambar 3.42	Capaian sasaran meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan	119
Gambar 3.43	Capaian sasaran meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberikan dampak ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal	123
Gambar 3.44	Tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan Hasil Proper Tahun 2013-2017	128
Gambar 3.45	Salah satu dari empat danau yang berada pada desa Wisata Lekuk 50 Tumbi Lempur yaitu Danau Lingkat	130
Gambar 3.46	Candi Muaro Jambi yang berada di kawasan Desa Wisata Muaro Jambi	130
Gambar 3.47	Danau Kaco, salah satu destinasi wisata yang terintegrasi dengan Desa Wisata Lekuk 50 Tumbi Lempur	130
Gambar 3.48	Capaian Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	132
Gambar 3.49	Jumlah Hotspot di Provinsi Jambi	135
Gambar 3.50	Sebaran Hotspot Tahun 2017	135
Gambar 3.51	Aktivitas Pertambangan tanpa Izin (PETI) diKabupaten Sarolangun	137
Gambar 3.52	Perkembangan komponen IKLH di Provinsi Jambi dan Perbandingan dengan IKLH Nasional	141
Gambar 3.53	Capaian sasaran menurunnya angka kemiskinan.....	144
Gambar 3.54	Angka kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional.....	146
Gambar 3.55	Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran.....	148
Gambar 3.56	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi dibandingkan dengan TPT Nasional (September)	149
Gambar 3.57	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi dibanding nasional Tahun 2014-2017 (Agustus).....	150
Gambar 3.59	Capaian sasaran terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi.....	152

Gambar 3.60	Piramida Penduduk Tahun 2017 (data 2016).....	153
Gambar 3.60	APK SD, SMP dan SMA sederajat Provinsi Jambi Tahun 2012-2016.....	156
Gambar 3.61	APM SD, SMP dan SMA sederajat Provinsi Jambi Tahun 2012-2016.....	157
Gambar 3.62	APS Provinsi Jambi Tahun 2012-2016	158
Gambar 3.63	Angka melek huruf penduduk 15 tahun keatas Provinsi Jambi (%) Tahun 2012-2016	159
Gambar 3.68	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2013 -2017	160



BAB I

PENDAHULUAN

Bab I Berisi:

- 1.1 *Latar Belakang*
- 1.2 *Gambaran Umum Daerah*
 - 1.2.1 *Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan*
 - 1.2.2 *Kondisi Geografi dan Demografi*
 - 1.2.3 *Kondisi Ekonomi*
- 1.3 *Isu Strategis*

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk menjamin pemerintahan telah berjalan demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Jambi Tahun 2017 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

Penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Sedangkan pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.

1.2 Gambaran Umum Daerah

1.2.1 Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 57 dan 58, penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Provinsi Jambi berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

1.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi

Luas wilayah Provinsi Jambi tercatat 53.435,92 Km² yang terbagi atas luas daratan 48.989,98 Km² dan luas lautan 4.445,94 Km² serta dengan panjang garis pantai 223,025 km. Luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.508 km² atau sebesar 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.205 km² dan 5.948 km².

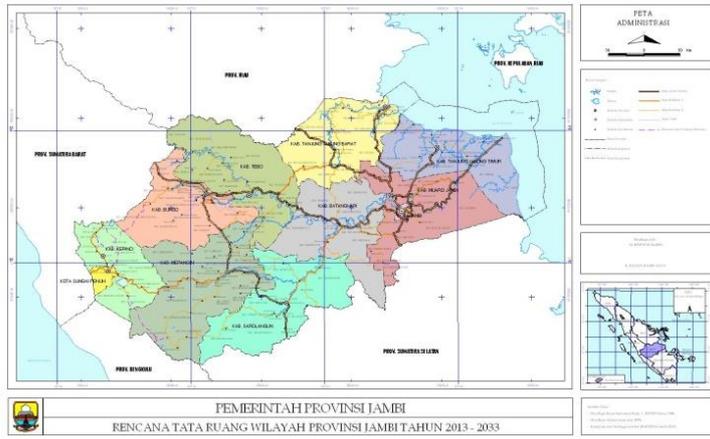
Tabel 1.1 Luas Wilayah Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	
1	Kerinci	3.334,99	
2	Merangin	7.508,23	
3	Sarolangun	5.948,73	
4	Bungo	4.673,16	
5	Tebo	6.205,81	
6	Batanghari	5.536,86	
7	Muaro Jambi	5.321,67	
8	Tanjung Jabung Barat	Darat	4.990,95
		Laut	384,21
9	Tanjung Jabung Timur	Darat	4.943,36
		Laut	4.061,73
10	Kota Sungai Penuh	353,76	
11	Kota Jambi	172,26	
Jumlah daratan		48.989,98	
Jumlah lautan		4.445,94	
Total		53.435,92	

Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

1.2.2.1 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 0° 74'– 2° 46,16' Lintang Selatan dan 101° 12' – 104° 44' Bujur Timur. Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam



Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Jambi

rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*).

1.2.2.2 Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 1.2 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
1	2	3	4
Dataran Rendah (0 - 100)	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari Sebagian Sarolangun, Tebo,
Dataran sedang (100 - 500)	903.180	17	sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tinggi (> 500)	765.655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah	5.100.000	100	

Sumber : RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

1.2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang

berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi:

- Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan)
- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah:

- Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
- Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh
- Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur
- Kawasan strategis Bangko – Sarolangun

Sementara Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah :

- Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi
- Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci.

Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

1.2.2.4 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2017 yang dirilis oleh BPK adalah sebanyak 3.458.926 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 68,96 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 2.840,33 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 224,7 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi lima tahun terakhir rata-rata adalah sebesar 3,24 persen per tahun dengan rata pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 6,04 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,003 persen.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016

No	Kabupaten / Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kerinci	235,797	236,762	234,003	234,882	235.800
2	Merangin	350,062	358,530	360,187	366,315	372.200
3	Sarolangun	259,963	267,549	272,203	278,222	284.200
4	Batang Hari	252,731	258,016	257,201	260,631	263.900
5	Muaro Jambi	363,994	376,619	388,323	399,157	410.340
6	Tanjab Timur	211,057	212,218	212,084	213,670	215.320
7	Tanjab Barat	293,594	301,469	304,899	310,914	316.810
8	Tebo	313,420	321,641	324,919	330,962	337.020
9	Bungo	320,300	329,934	336,320	344,100	351.880
10	Kota Jambi	557,321	569,331	568,062	576,067	583.490
11	Sungai Penuh	84,575	84,965	86,220	87,132	87,970
Provinsi Jambi		3,242,814	3,317,034	3,344,421	3,402,052	3.458.930

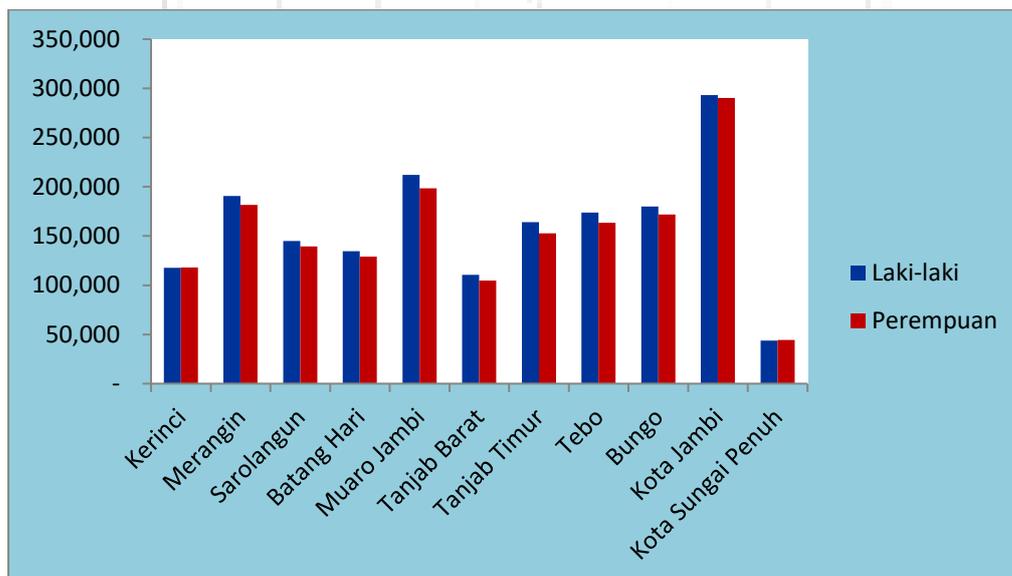
Sumber: Jambi Dalam Angka 2017, 2017

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 51,75 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 48,25 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo).

Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Kerinci	3,355,27	235.800	70,28
2	Merangin	7,679,00	372.200	48,47
3	Sarolangun	6,184,00	284.200	45,96
4	Batang Hari	5,804,00	263.900	45,47
5	Muaro Jambi	5,326,00	410.340	77,04
6	Tanjab Timur	5,445,00	215.320	39,54
7	Tanjab Barat	4,649,85	316.810	68,13
8	Tebo	6,461,00	337.020	52,16
9	Bungo	4,659,00	351.880	75,53
10	Kota Jambi	205,43	583.490	2,840,33
11	Sungai Penuh	391,50	87.970	224,7
Jumlah		50,160,05	3.458.930	68,96

Sumber: Jambi Dalam Angka 2017, 2017



Sumber: Jambi Dalam Angka 2017, 2017

Gambar 1.2 Perbandingan Penduduk Laki-laki dengan perempuan per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi

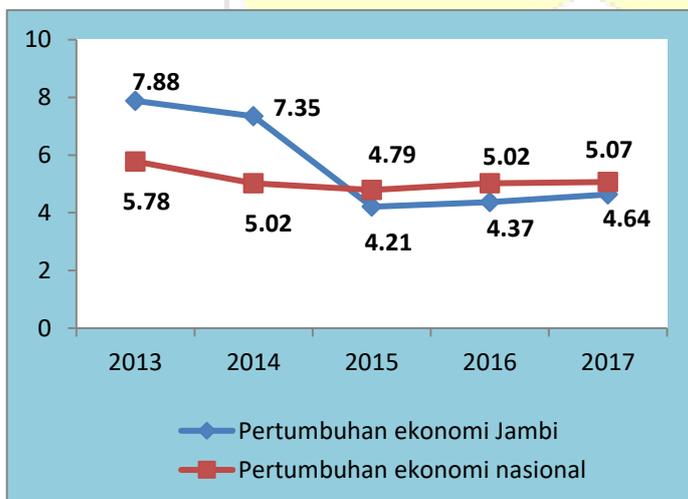
Gambar 1.2 di atas memperlihatkan bahwa penduduk laki-laki di Provinsi Jambi lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, kecuali di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Beberapa hal yang diduga sebagai penyebab terjadinya hal ini adalah faktor migrasi,

dimana penduduk laki-laki di kabupaten/ kota tersebut banyak merantau keluar daerah untuk bekerja dan sebagian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

1.2.3 Kondisi Ekonomi

1.2.3.1 Pertumbuhan PDRB

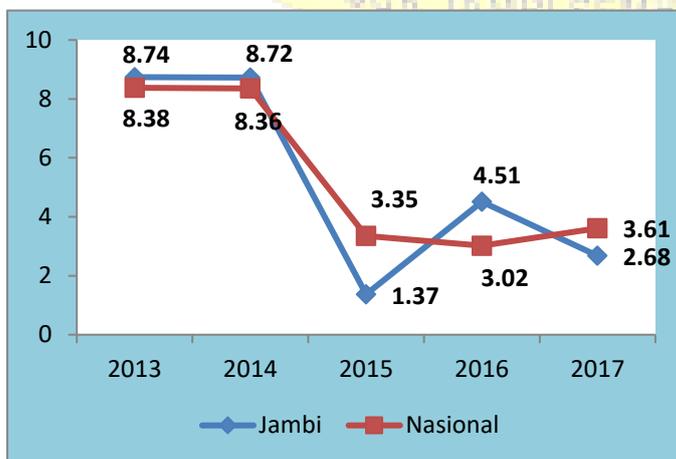
Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada 2017 sebesar 4,64 %, mengalami peningkatan 0,27 poin dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi ini masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,07.



Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dibandingkan Nasional Tahun 2013 - 2017

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mulai mengalami penurunan sejak tahun 2015 akibat kondisi ekonomi dunia yang lesu diiringi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang juga mengalami penurunan, menurunnya harga minyak dunia serta peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Namun kondisi ini mulai membaik pada tahun 2016 dan berlanjut pada tahun 2017, seiring dengan membaiknya harga produk-produk sektor pertanian dan perkebunan yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi.

1.2.3.2 Inflasi



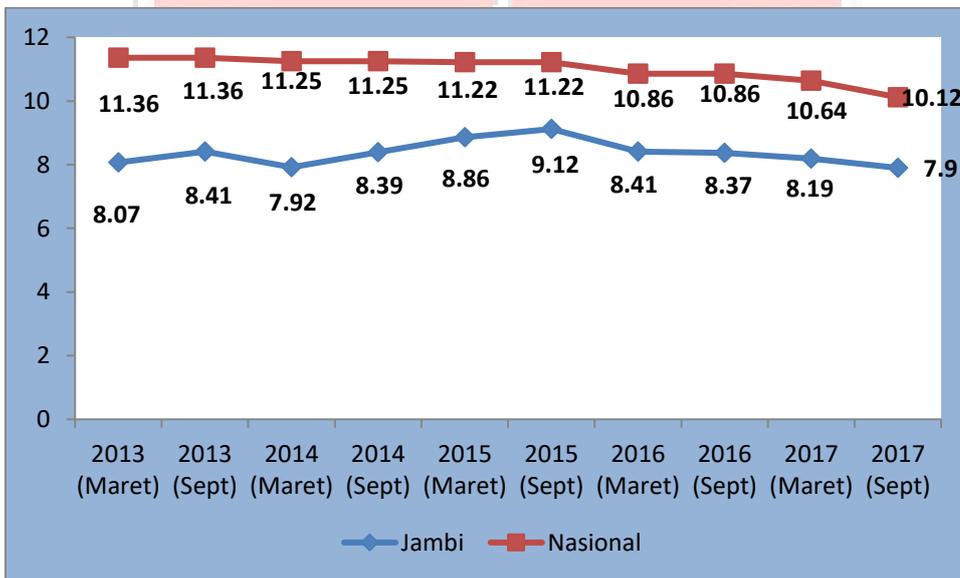
Gambar 1.4 Inflasi Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2013 - 2017

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi Provinsi Jambi Tahun 2017 adalah 2,68, di bawah tingkat inflasi nasional yang berada pada 3,61. Inflasi ini menurun bila dibandingkan dengan inflasi tahun 2016 yang berada di angka 4,51. Hal ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada 4 kelompok pengeluaran yaitu kelompok perumahan, listrik, air dan

gas; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga; kelompok sandang; serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

1.2.3.3 Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.



Gambar 1.5 Angka Kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan Nasional Tahun 2013-2017

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, dalam kurun waktu Maret-September 2017, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi terjadi penurunan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 2,13 ribu orang (dari 120,62 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 118,49 ribu orang pada September 2017), demikian pula jumlah penduduk miskin di daerah

perdesaan berkurang dari 165,93 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 160,11 ribu orang pada September 2017 atau terjadi penurunan sebanyak 5,81 ribu orang.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang menjadi perhatian Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. **Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik.** Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, *e-government system* belum optimal dan inovasi dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.** Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan **revolusi mental**.
3. Predikat **Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia** merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.
4. **Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.** Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
5. **Ketersediaan dan kualitas infrastruktur** umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
6. Adanya **kesenjangan ekonomi ditandai tingginya** angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
7. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari **poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).**
8. **Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif** berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa

dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.

9. **Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs.** Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebunga. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
10. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan **kedaulatan pangan dan energi** harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.
11. **Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi berbatasan** merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terkait dengan upaya pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab II Berisi:

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama

2.2 Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana strategis daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yaitu :

“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera”

JAMBI TUNTAS 2021

- Tertib:** diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.
- Unggul:** Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Nyaman:** Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- Tangguh:** Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Adil:** mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
- Sejahtera:** mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis .
3. **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
4. **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
5. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah
6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

2.1.2 Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja Utama

2.1.2.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah :

- 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
- 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan

- 4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
- 5 Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
- 6 Meningkatkan kualitas SDM perempuan
- 7 Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
- 8 Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
- 9 Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
- 10 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
- 11 Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
- 12 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

2.1.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
5. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
6. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama
7. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum
9. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)
10. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
11. Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
12. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan
13. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
14. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
15. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
16. Meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan

17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
19. Menurunnya angka kemiskinan
20. Menurunnya angka pengangguran
21. Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi

2.1.2.3 Indikator Kinerja Utama

Sebagai alat pengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka ditetapkan indikator kinerja utama dan target yang akan dicapai. Adapun indikator kinerja utama dan target masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	Target	
				2017	Kondisi Akhir 2021
Visi: Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera					
MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	CC	B	BB
		Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
		Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah	109,26	108	100,93
		Indeks transparansi Pemerintah	6,32	6,5	7,05
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik	IKM	B	B	A

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	Target	
				2017	Kondisi Akhir 2021
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.					
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	70,43	70,7	72
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	359	359	356
		Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	34	33,7	32
		Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	19.7 (Risksdas 2013)	17	15
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan	meningkatnya kualitas Pendidikan Menengah	Tingkat kelulusan SMA dan SMK	94%	99,1%	99,50%
Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Karya Seni	10	30	70
	Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	76,67	84,27	99,47
Meningkatkan kualitas SDM Perempuan	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	IPG	87,88	91,02	95,01
		IDG	61.93	63,02	67,01

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	Target	
				2017	Kondisi Akhir 2021
MISI 3 : Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat					
Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Kebebasan Sipil	75,89	76,5	77,9
MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan					
Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	TFP	NA	1,1	1,5
	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase peningkatan share sektor Sekunder terhadap PDRB	19,00%	20,0%	24,00%
Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.210	3.217
	Meningkatnya Indeks Pertanaman pada lahan Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanaman: - IP 200 - IP 300	(35.061 Ha) (1.400 Ha)	1,2 1,4	7,2 8,4 (37.662 Ha)

					(1.521,79 Ha)
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	Target	
				2017	Kondisi Akhir 2021
MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan					
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum	akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	73,51	75,67	80
		Jalan dalam kondisi mantap	75,56	77,64	82,52
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	81,5	88	96
	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	62,75%	74%	95%
		persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,35%	75%	95%
Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan	persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan	NA	8%	20%
	Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan	Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	NA	15%	75%

	daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	persentase peningkatan perusahaan proper hijau	5,77	8,9	15
--	---	--	------	-----	----

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	Target	
				2017	Kondisi Akhir 2021
		Persentase peningkatan industri ekowisata	7%	8,1%	10%
		Indeks tata kelola hutan	33	35	50
	Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	(130.000 Ha)	26,5%	50% (10.000 Ha)
		persentase penurunan luas lahan kritis	(1.420.602 Ha)	2%	2% (1.284.112 Ha)
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	52,76	52,84
MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat					
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,12	8,05	7,09
	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	4,20%	3,7%	2,50%
	Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	2,11	1,82

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang terukur. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

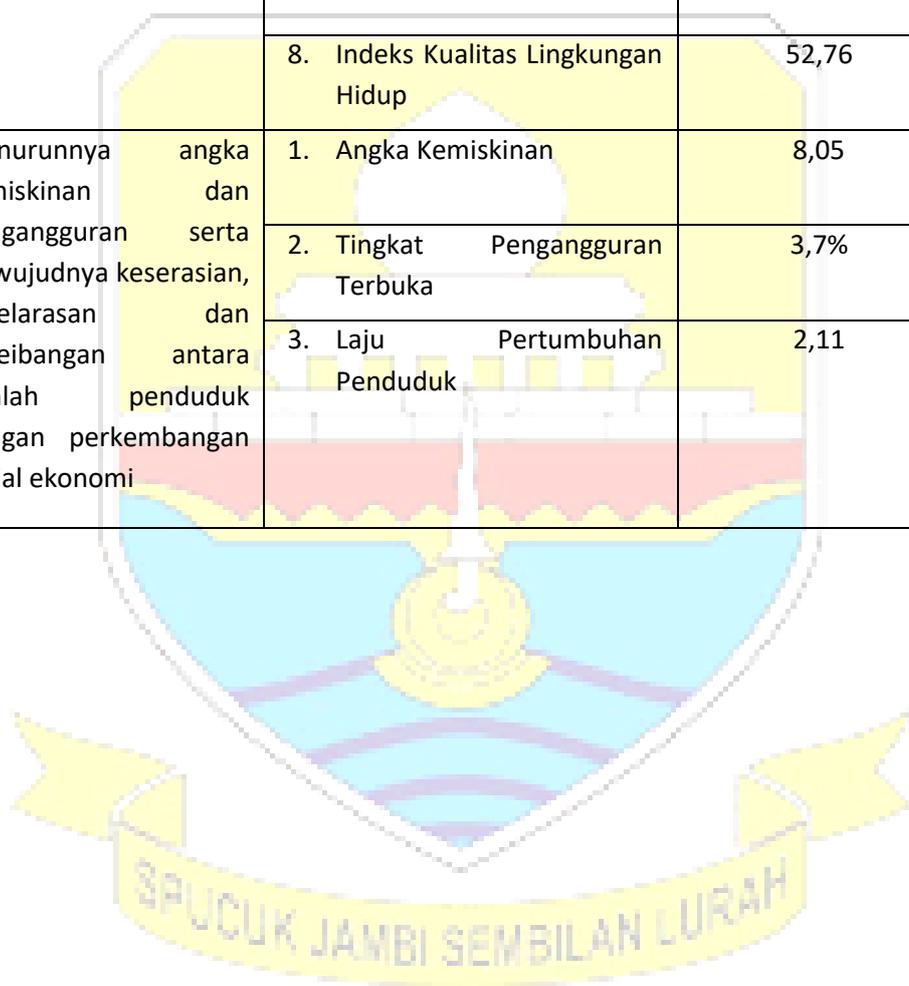


Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien seiring peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Nilai SAKIP	B
		2. Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan	WTP
		3. Efisiensi Pengelolaan keuangan daerah	108
		4. Indeks transparansi pemerintah	6,5
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat	B
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan menengah, kesadaran dan pengetahuan dalam pengembangan seni budaya serta kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	1. Usia Harapan Hidup	70,7
		2. Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	359
		3. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	33,7
		4. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (persen)	17
		5. Tingkat kelulusan SMA dan SMK	99,1%
		6. HAKI karya seni	30
		7. Indeks Kebebasan berkeyakinan	84,27
		8. IPG	91,02
		9. IDG	63,02
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	1. Indeks Kebebasan Sipil	76,5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) guna mendukung perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah serta terwujudnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal melalui peningkatan indeks pertanian tanaman pangan	1. TFP	1,1
		2. Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	3210
		3. Indeks Pertanian: - IP 200 - IP 300	- 1,2,0% - 1,4%
		4. Persentase share sektor sekunder terhadap PDRB	20%
5.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi, energi dan listrik, serta terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	1. Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	75,67%
		2. Jalan dalam kondisi mantap	77,64%
		3. Rasio elektrifikasi	88
		4. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	74%
		5. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	75%
6.	Meningkatnya pengelolaan energi dan SDA yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal sehingga terwujud pengelolaan DAS yang berkualitas	1. Persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan	8%
		2. Persentase perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat <i>good mining practice</i>	15%
		3. Persentase peningkatan perusahaan proper hijau	8,9
		4. Persentase peningkatan industri ekowisata	8,1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Indeks Tata Kelola Hutan	35
		6. Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	26,5%
		7. Persentase penurunan luas lahan kritis	2%
		8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,76
7.	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial ekonomi	1. Angka Kemiskinan	8,05
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,7%
		3. Laju Pertumbuhan Penduduk	2,11





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Berisi:

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1. Capaian IKU

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2. Indikator Kinerja lainnya

3.3. Realisasi Anggaran

3.1 Capaian Kinerja

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi pada perubahan yang lebih baik, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai rumusan perubahan baik pada keluaran maupun dampak yang dihasilkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good government* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai pengejawantahan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah faktor kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam hal ini, aturan perundangan-undangan yang dipakai sebagai pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 - \geq 100	Sangat Tinggi	
2	76 - 90	Tinggi	
3	66 - 75	Sedang	
4	51 - 65	Rendah	
5	\leq 50	Sangat Rendah	

3.1.1 Capaian IKU

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya digunakan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Pencapaian IKU Gubernur Jambi sampai dengan tahun 2017 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

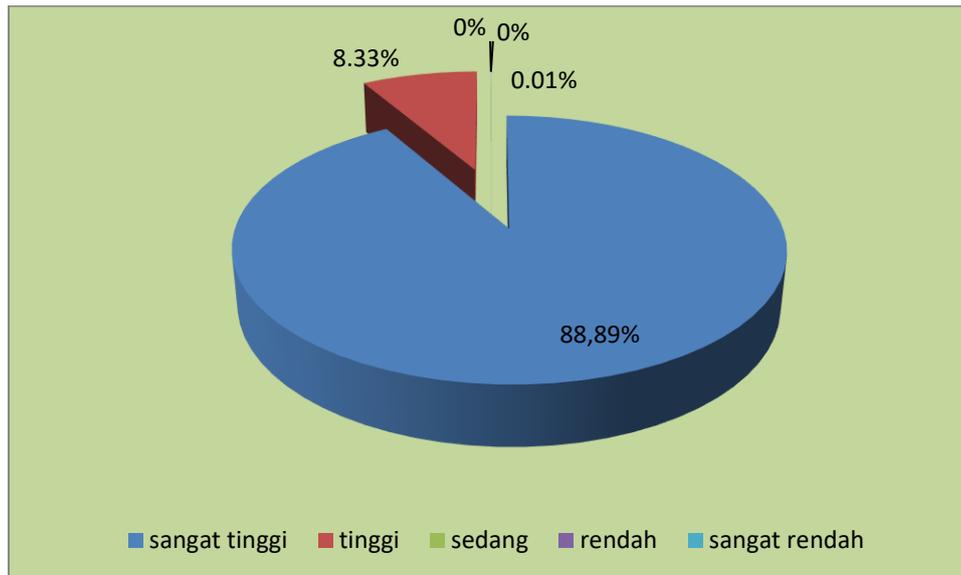
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2017

No	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2017			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai SAKIP	CC	B	CC	97,83	BB	83,85
2	Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100,00
3	Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah	109,26	108,0	89,32	117,30	100,93	111,50
4	Indeks transparansi Pemerintah	6,32	6,5	6,32	97,23	7,05	89,65
5	IKM	B	B	B	100	A	96,22
6	Usia Harapan Hidup	70,43	70,7	70,71	100,01	72	98,21
7	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	359	359	359	100	356	99,16
8	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	34	33,7	34	99,11	32	94,75
9	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	19,7 (Riskesdas 2013)	17	19,7	84,12	15	68,67
10	Angka melanjutkan ke PT akreditasi A	42,3	45,47	44,38	97,60	60,73	73,08
11	Tingkat kelulusan SMA dan SMK	94%	99,1%	100%	100,91	99,5%	100,50
12	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	10	30	45	150	70	64,29
13	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	76,67	84,27	87,02	103,26	99,47	87,48

No	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2017			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
14	IPG	87,88	91,02	88,29	97	95,01	92,93
15	IDG	61,93	63,02	63,14	100,19	67,01	94,22
16	Indeks Kebebasan Sipil	75,89	76,5	84,39	110,31	77,9	108,33
17	TFP	NA	1,1	0,88	80	1,5	58,67
18	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB	18,38%	20%	17,44%	87,2	24,00%	72,67
19	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.210	3.425	106,7	3.217	106,47
20	Persentase Peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanaman:						
	- IP 200	(35.061 Ha)	1,2	42,35	3529,02	7,2 (37.662 Ha)	451,63
	- IP 300	(1.400 Ha)	1,4	35,64	2545,92	8,4 (1.521,79 Ha)	295,70
21	Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	73,51	75,67	74,223	98,09	80,00	92,78
22	Jalan dalam kondisi mantap	75,56	77,64	76,573	98,63	82,52	92,79
23	Rasio Elektrifikasi	81,5	88	92,22	104,8	96	96,06
24	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	62,75	74%	70,0%	94,59	95%	73,68
25	persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,35%	75%	76,2%	101,6	95%	80,21
26	persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan	NA	8%	8,02%	100,25	20%	40,10

No	Indikator	Kondisi Awal (2015)	2017			Target Akhir (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
27	Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	NA	15%	17,9%	119,33	75%	23,87
28	persentase perusahaan proper hijau	6,25	8,9	8,4%	94,38	15,00	56,00
29	Persentase peningkatan industri ekowisata	7 %	8,1	100	1234,6	10%	1000
30	Indeks tata kelola hutan	33	35	35	100	50	70,00
31	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	(130.000 Ha)	26,5%	99,56%	375,72	50% (10.000 Ha)	194,28
32	persentase penurunan luas lahan kritis	(1.420.602 Ha)	2%	0,003%	0,001%	10% (1.284.112 Ha)	405,41
33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	52,76	64,01	121,32	52,84	121,14
34	Angka Kemiskinan	9,12	8,05	7,90	101,86	7,09	88,58
35	Tingkat pengangguran Terbuka	4,34%	3,7%	3,87%	99,95	2,5 %	54,8
36	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	2,11	1,67	120,85	1,82	108,24

Dari 36 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 23 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel 3.1, maka 32 indikator (88,89%) masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi, 3 indikator (8,33%) dengan capaian tinggi, dan 1 indikator (0,01%) terealisasi sangat rendah. Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2017 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Sebagian besar indikator yang digunakan sebagai IKU menggunakan data yang diukur oleh lembaga di luar Pemerintah Provinsi Jambi dan beberapa diantaranya tidak dilakukan setiap tahun. Oleh karena itu untuk mengukur capaian kinerja tahun 2017 terhadap indikator yang belum dirilis oleh lembaga-lembaga tersebut ataupun tidak disurvei pada tahun 2017 maka data capaian akan menggunakan data terakhir dan selanjutnya akan dijelaskan capaian indikator proxy yang mendukung capaian IKU pada subbab Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target 2017	Capaian 2017	2018	
					(Target RPJMD)	PK
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP	CC	B	CC	B	B
	Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah	109,26	108,0	89,32	106	106
	Indeks transparansi Pemerintah	6,32	6,5	6,32	6,7	6,7
Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani	IKM	B	B	B	A	A

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target 2017	Capaian 2017	2018	
					(Target RPJMD)	PK
publik						
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	70,43	70,7	70,71	70,9	70,9
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	359	359	359	358	358
	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	34	33,7	34	33,3	33,3
	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	19.7 (Risksdas 2013)	17	19,7	17	17
meningkatnya kualitas Pendidikan Menengah	Angka melanjutkan ke PT akreditasi A	42,3	45,47	44,38	48,88	44,5
	Tingkat kelulusan SMA dan SMK	94%	99,1%	100%	99,2%	99,2%
Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni	10	30	45	40	40
Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	76,67	84,27	87,02	88,07	88,07
Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	IPG	87,88	91,02	88,29	92,02	92,02
	IDG	61,93	63,02	63,14	64	64
Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	Indeks Kebebasan Sipil	75,89	76,5	84,39	77	77

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target 2017	Capaian 2017	2018	
					(Target RPJMD)	PK
Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	TFP	NA	1,1	0,88	1,2	1,0
Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB	18,38%	20%	17,44%	21,0%	21,0%
Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal	Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)	3.204	3.210	3.425	3.212	3.212
Meningkatnya Indeks Pertanaman pada lahan Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanaman: - IP 200 - IP 300	(35.061 Ha) (1.400 Ha)	1,2 1,4	5,04 24,71	1,2% 1,4%	1,2% 1,4%
akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	73,51	75,67	74,223	76,67%	76,67%
	Jalan dalam kondisi mantap	75,56	77,64	76,573	78,82%	78,82%
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi	81,5	88	92,22	90	90
Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	62,75	74%	70,0%	80%	80%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target 2017	Capaian 2017	2018	
					(Target RPJMD)	PK
	persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	66,35%	75%	76,2%	78%	78%
meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan	persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan	NA	8%	8,02%	11%	11%
Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	NA	15%	17,9%	30%	30%
	persentase perusahaan proper hijau	6,25	8,9	8,4%	10,3	10,3
	Persentase peningkatan industri ekowisata	7 %	8,1	50	8,4	8,4
Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Indeks tata kelola hutan	33	35	35	40	40
	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	(130.000 Ha)	26,5%	99,56%	30,8%	30,8%
	persentase penurunan luas lahan kritis	(1.420.602 Ha)	2%	0,003%	2%	2%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,72	52,76	64,01	52,78	52,78
Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	9,12	8,05	7,90	7,99	7,99
Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	4,34%	3,7%	3,87%	3,5%	3,5%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target 2017	Capaian 2017	2018	
					(Target RPJMD)	PK
Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,24	2,11	1,67	2,04	2,04

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

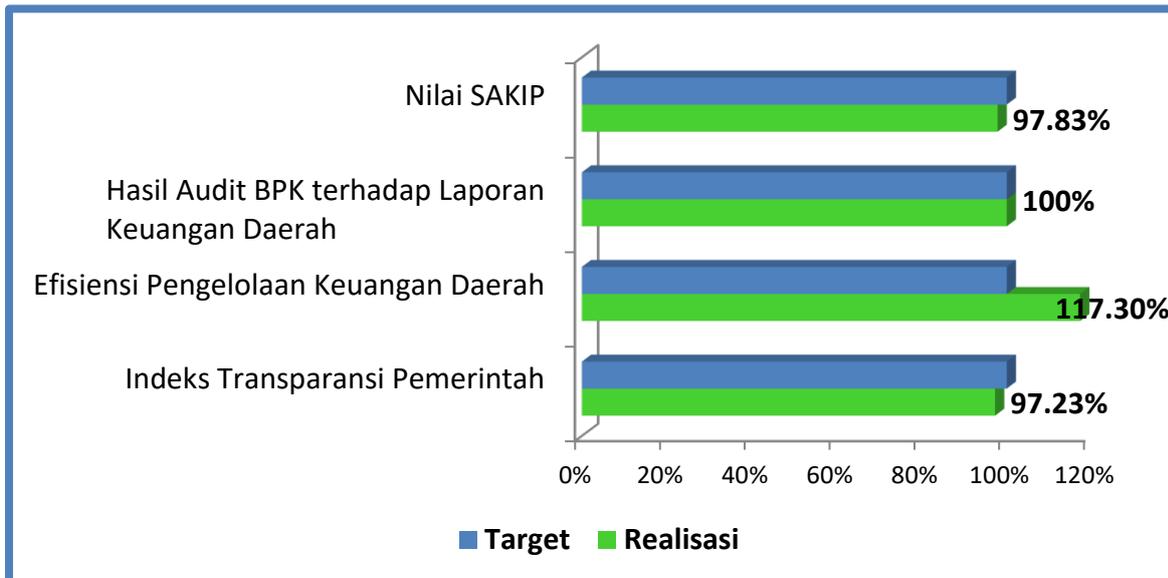
Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam subbab sebelumnya. Penyajian untuk subbab ini disajikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif

Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Sasaran 1.1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya. Capaian sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efisien ditunjukkan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja berikut ini:



Gambar 3.2 Capaian Sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efisien

1.1.1. Nilai SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah mengubah orientasinya dari berorientasi pada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi pada hasil atau outcome. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi Pemerintah disorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggungjawab terhadap kinerja atau hasil yang dicapai.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik di tingkat Pusat maupun daerah. Komponen penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas kinerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal “B” atau “Baik”.

Capaian kinerja akuntabilitas kinerja menunjukkan hasil yang belum baik secara predikat, karena Pemerintah Provinsi Jambi baru memperoleh predikat CC dengan nilai 58,7. Bila dibandingkan dengan target, dimana target pada tahun 2017 adalah B, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini baru mencapai 97,83% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2021, maka capaian hingga tahun 2017 ini mencapai 97,83% atau masuk dalam kategori sangat baik. Bila melihat tren perolehan nilai, maka secara umum dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan bila

dibandingkan dengan nilai yang diterima pada tahun 2016, khususnya pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja. Satu-satunya komponen yang mengalami penurunan nilai adalah pada komponen evaluasi internal, yaitu dari 5,54 menjadi 5,52.

Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Nilai SAKIP	CC (56,71)	CC (59,36)	CC (52,87)	CC (58,36)	B	CC (58,70)	97,83	BB (>70)	83,85

Sumber:Kemenpan RB, 2018

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB, nilai yang didapat oleh Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya, akibat kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Jambi masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Berikut ini perkembangan penerapan akuntabilitas kinerja tahun 2015-2017:

Tabel 3.5 Perkembangan Capaian Nilai pada Komponen SAKIP

No	Komponen yang dinilai	2015	2016	2017
a.	Perencanaan Kinerja	16,48	19,26	19,29
b.	Pengukuran Kinerja	11,81	12,63	12,67
c.	Pelaporan Kinerja	9,17	9,34	9,37
d.	Evaluasi Internal	4,64	5,54	5,52
e.	Capaian Kinerja	10,77	11,59	11,85
	Nilai Hasil Evaluasi	52,87	58,36	58,70
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	CC

Sumber: Kemenpan RB, 2018

Dalam rangka perbaikan nilai SAKIP, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan beberapa upaya perbaikan pada komponen penilaian SAKIP. Pada komponen perencanaan kinerja, Pemerintah Provinsi Jambi telah berusaha melakukan perbaikan Rencana Strategis pada beberapa Perangkat Daerah agar mendukung capaian RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra ini menjadi acuan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) setiap tahunnya oleh Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk membuat cascading penetapan kinerja sampai dengan eselon IV sehingga diharapkan seluruh komponen secara berjenjang memiliki kinerja yang saling mendukung dalam pencapaian sasaran daerah.

Sebagai penguatan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu IKU yang ditetapkan untuk pencapaian misi pertama dalam RPJMD adalah nilai SAKIP dengan program utama adalah program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan didukung antara lain oleh program-program berikut:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dilaksanakan oleh Bappeda
- b. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dilaksanakan oleh Inspektorat
- c. Program Reformasi Birokrasi, dilaksanakan oleh Biro Organisasi
- d. Program Pembangunan dan Pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi

Permasalahan:

1. Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum sepenuhnya merupakan penjabaran/ cascade dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah.
2. *e-planning* yang telah dibangun belum terintegrasi dengan *e-budgeting* karena perbedaan penyedia, dimana *e-budgeting* yang telah digunakan terlebih dahulu belum mengizinkan aplikasi *e-planning* terintegrasi. Hal ini mengakibatkan penggunaan *e-planning* tidak maksimal.

Solusi:

1. Dalam rangka perbaikan dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja, pembinaan dan pendampingan akan lebih ditingkatkan lagi.
2. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya berkoordinasi dengan BPKP sebagai penyedia *e-budgeting* untuk memberikan izin penintegrasian *e-planning* dan SIMDA (*e-budgeting*). Pengintegrasian ini harus segera dilaksanakan untuk menyederhanakan prosedur perencanaan dan pengendalian kinerja dan keuangan.

1.1.2. Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

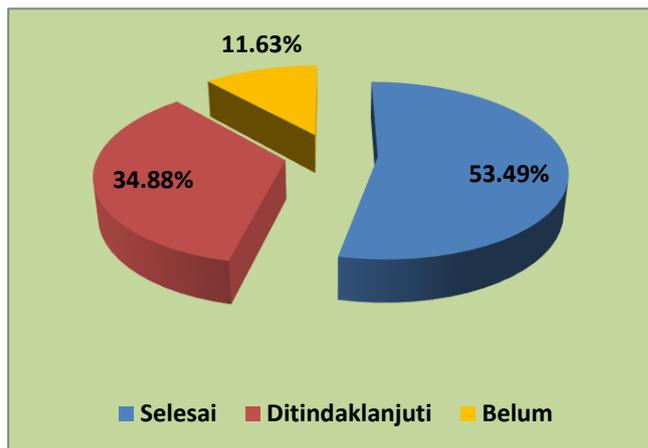
Tabel 3.6 Realisasi Capaian Indikator hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017			
					Target	Realisasi		
Hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100

Sumber: BPK, 2017



Gambar 3.4 Penerimaan hasil audit BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi



Gambar 3.3 Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2017

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Realisasi atas target kinerja ini menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk kelima kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Atas pencapaian ini maka kinerja indikator kedua pada sasaran pertama ini adalah **sangat tinggi** atau memenuhi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan RPJMD. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi. Sebagai catatan, realisasi ini merupakan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2016 yang dikeluarkan oleh BPK pada tahun 2017. Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2017, masih dalam proses ketika laporan ini disusun.

Dalam rangka perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Jambi terus mengupayakan penyelesaian rekomendasi - rekomendasi yang diberikan oleh Aparat

Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, selain terus meningkatkan kemampuan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Inspektorat Provinsi Jambi dan BPK RI pada tahun 2017 dapat dilihat pada gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bahwa 88,37% hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti dengan rincian 53,49% selesai ditindaklanjuti dan 34,88% belum selesai. Sedangkan sisanya sebesar 11,63% akan terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti hingga tuntas.

Permasalahan:

1. Adanya tahapan penyelesaian kasus yang memerlukan pendalaman sehingga memerlukan waktu yang relatif lama.
2. Masih terdapat Objek Pemeriksaan (SKPD) yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan sebelumnya karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap Obrik yang tidak/belum melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan.
3. Kurangnya pemahaman Obrik terhadap Rekomendasi/saran dari temuan pemeriksaan.
4. Sulitnya menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga, dikarenakan adanya pekerjaan yang disub-kontrakkan.

Solusi:

1. Mengupayakan penyelesaian Kasus tahapan dan waktu yang lebih singkat
2. Perlu adanya sanksi yang jelas dan tegas sehubungan dengan pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan, baik yang berhubungan dengan pemeriksaan oleh BPK maupun oleh APFP
3. Menjalin koordinasi yang baik antara Obrik/SKPD dengan lembaga pemeriksaan, baik APFP maupun BPK sehingga tindaklanjut dapat dilaksanakan dengan cepat
4. Mengupayakan pola yang tepat menghubungkan antara Obrik/SKPD dengan pihak ketiga dalam menindaklanjuti temuan yang ada.

1.1.3. Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah memperlihatkan sejauhmana daerah dapat mengelola keuangannya. Berdasarkan perhitungan sementara (proses penilaian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi oleh BPK sedang berlangsung pada saat laporan ini dibuat), pada tahun 2017 efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi adalah 89,32% atau masuk dalam kriteria cukup efisien (berdasarkan Kepmendagri

No.690.900.327 Tahun 1996). Namun bila dibandingkan dengan target dan capaian tahun lalu, capaian ini menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik dan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 atau berkinerja **sangat tinggi**. Bahkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD atau target tahun 2021, maka capaian kinerja saat ini telah mencapai 111,50% atau sangat tinggi.

Tabel 3.7 Kriteria efisiensi kinerja Keuangan berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
>100%	Tidak efisien
90% - <100%	Kurang efisien
80% - <90%	Cukup efisien
60% - <80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Tabel 3.8 Capaian Indikator Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Efisiensi pengelolaan keuangan daerah	104,37	100,15	109,26	97,08	108,0	89,32	117,30	100,93	111,50

Sumber: Bappeda (Hasil analisis), 2018

Bila melihat capaian indikator ini setiap tahunnya, terlihat realisasi yang berfluktuatif. Besarnya pendapatan yang merupakan pembagi dalam perhitungan efisiensi sangat tergantung dengan situasi perekonomian dan kebijakan pada saat itu. Realisasi dana perimbangan dan kemampuan pemerintah Provinsi Jambi menggali potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah turut mempengaruhi capaian indikator ini.

Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2017

URAIAN		JUMLAH REALISASI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		2016*	2017**	Rp.	%
1		2	3	4	5
1	PAD	1.233.133.129.097,10	1.580.651.034.565,96	347.517.905.468,86	28,18
	Pajak Daerah	966.519.347.102,57	1.316.162.467.485,16	349.643.120.382,59	36,18
	Retribusi Daerah	19.036.490.425,00	19.860.002.006,00	823.511.581,00	4,33
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	27.000.011.616,41	29.054.470.466,63	2.054.458.850,22	7,61
	Lain-lain PAD	220.577.279.953,12	215.574.094.608,17	(5.003.185.344,95)	(2,27)
2	Dana Perimbangan	1.547.888.628.151,0	2.723.260.588.950,00	1.175.371.960.799,00	75,93
	Dana Transfer Umum	1.466.243.775.693,00	1.788.432.915.714,00	322.189.140.021,00	21,97
	- Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	395.791.297.693,00	390.520.754.714,00	(5.270.542.979,00)	(1,33)
	- DAU	1.070.452.478.000,00	1.397.912.161.000,00	327.459.683.000,00	30,59
	Dana Transfer Khusus	81.644.852.458,00	934.827.673.236,00	853.182.820.778,00	1.044,99
	- DAK	20.536.912.458,00	163.283.632.087,00	142.746.719.629,00	695,07
	- BOS	61.107.940.000,00	771.544.041.149,00	710.436.101.149,00	1.162,59
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	613.192.580.303,00	1.470.960.000,00	(611.721.620.303,00)	(99,76)
	Pendapatan Hibah	1.401.600.000,00	1.470.960.000,00	69.360.000,00	4,95
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	611.790.980.303,00	0,00	(611.790.980.303,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan Daerah		3.394.214.337.551,10	4.305.382.583.515,96	911.168.245.964,86	26,84

Sumber: Bakeuda, 2018

*) Data LKPJ Tahun 2016

**) Angka Sementara

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 sejumlah Rp4,30 triliun atau mencapai 101,69 persen dari target yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan sejumlah Rp4,23 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 26,84 persen atau sejumlah Rp 911,17 miliar dari realisasi tahun 2016 yang mencapai Rp3,39 triliun. Kontribusi terbesar secara berurutan pada pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan yaitu sebesar 63,25 persen, Pendapatan Asli Daerah sebesar 36,71 persen dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,03 persen. Secara ringkas pendapatan daerah Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Permasalahan:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergali optimal dan pendapatan daerah masih sangat tergantung dengan dana perimbangan.
2. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan retribusi daerah belum tinggi.

Solusi:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan inovasi-inovasi baru yang memudahkan akses wajib pajak, salah satunya adalah e-samsat yang telah di-launching pada tahun 2017.
2. Pemutihan terhadap denda pajak kendaraan bermotor.

1.1.4. Indeks transparansi Pemerintah

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga indeks transparansi menjadi komposit dari penilaian *Indonesia Governance Index* (IGI). Indeks transparansi merupakan salah satu indeks yang tidak diukur setiap tahun, namun penting untuk dijadikan indikator kinerja utama. Indeks ini menunjukkan posisi relatif Provinsi Jambi terhadap capaian provinsi lainnya.

Berdasarkan rilis data terakhir pada tahun 2013, capaian indeks transparansi Pemerintah Provinsi Jambi adalah 6,32 dan sampai akhir 2016 belum ada rilis data terbaru terkait indeks ini. Oleh karena itu realisasi kinerja pada tahun 2016 masih menggunakan data ini atau terealisasi sebesar 98,75% dengan kategori **sangat tinggi**.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Indeks Transparansi Pemerintah

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks Transparansi Pemerintah	6,32 ^{*)}	6,32 ^{*)}	6,32 ^{*)}	6,32 ^{*)}	6,5	6,32 ^{*)}	97,23	7,05	89,65

Sumber: IGI, 2012

^{*)} data survey terakhir (2012), belum ada data terbaru yang dirilis

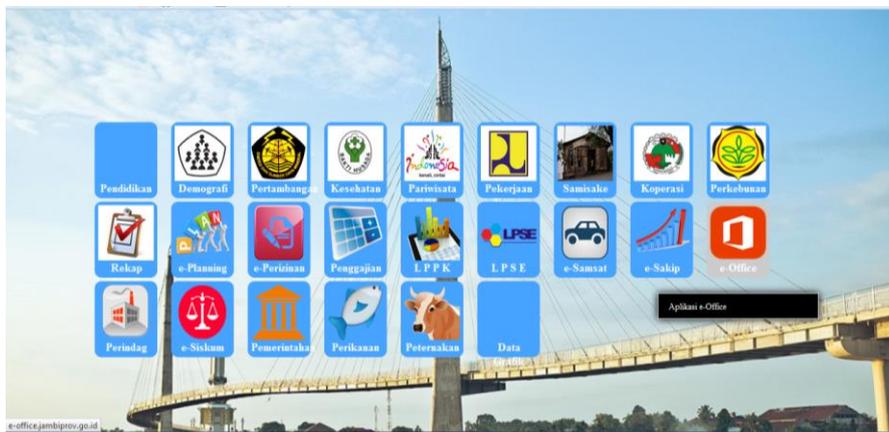
Salah satu bentuk implementasi dari transparansi pemerintah adalah keterbukaan informasi publik, atau dengan kata lain masyarakat dapat mengakses web resmi pemerintah dengan mudah. Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi telah memiliki web resmi yang memuat informasi-informasi yang masuk dalam kategori informasi publik. Publik dapat memberikan saran dan kritik membangun terkait perkembangan pembangunan Provinsi Jambi.



Gambar 3.5 Transparansi informasi publik pada web resmi Pemerintah Provinsi Jambi dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

Seiring dengan perkembangan media sosial saat ini, Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah juga memiliki akun media sosial yang berfungsi untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi. Akun media sosial ini terbukti lebih interaktif karena publik dapat berinteraksi langsung dalam memberikan saran dan masukan serta kritik atas kebijakan atau kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, saat ini telah disediakan pula aplikasi Gubernur Jambi menjawab berbasis android yang dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin bertanya mengenai hal seputar Provinsi Jambi ataupun melaporkan hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Aplikasi yang dikelola oleh Biro Humas dan Protokol beserta tim yang terdiri dari seluruh perwakilan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi ini merupakan implementasi dari program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan dan dapat diperoleh secara gratis di *google play*.

Guna pemenuhan kebutuhan aplikasi *e-government* dan *website*, program yang dilaksanakan adalah **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik** yang dilaksanakan oleh Dinas komunikasi dan Informasi. Selain *website*, beberapa *e-government* juga telah dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jambi, seperti *e-planning*, *e-office*, LPPK dan lain-lain serta *e-government* lainnya yang berhubungan dengan data sektoral.



Gambar 3.6 Tampilan e-government pada *situation room* Pemerintah Provinsi Jambi

Permasalahan:

1. Sistem yang tersedia sebagai sarana pengembangan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah belum dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat khususnya yang belum melek teknologi.
2. Updating data pada website dan aplikasi masih perlu dioptimalkan

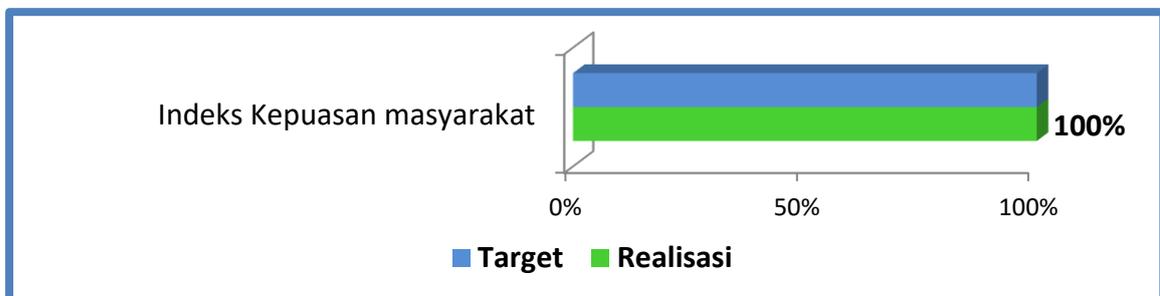
Solusi:

1. Masyarakat yang menggunakan media sosial jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat yang menggali informasi melalui website resmi pemerintah, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi website resmi ini melalui media sosial.
2. *Updating website* dan aplikasi akan dioptimalkan di masa yang akan datang.
3. Optimalisasi aplikasi Gubernur Jambi menjawab

Tujuan 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebelumnya sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan salah satu sasaran jangka menengah adalah meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

Sasaran 2.1. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.



Gambar 3.7 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah yang Melayani Publik

Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat akan menyebabkan peningkatan tuntutan akan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi terus membenahi kualitas pelayanan publik seiring dengan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik dapat dilihat pada gambar 3.7.

2.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan.

Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsif dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tertanggal 2 Mei 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana pelayanan, perilaku (kesopanan dan keramahan) petugas pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kesembilan unsur yang ada dalam survei dapat dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Pelaksanaan survei IKM telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi secara berkala setiap tahun. Pada tahun 2017, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pada 43 OPD dengan hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.11 Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017

No	Instansi	Unsur Pelayanan									Rata - Rata	Nilai Huruf
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Balitbangda	75,00	75,00	71,88	71,88	78,13	75,00	78,13	75,00	93,75	77,006	B
2	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	89,17	85,00	84,17	85,83	87,50	90,00	90,00	88,33	88,33	87,505	A
3	Badan Kepegawaian Daerah	83,33	72,92	72,92	85,42	72,92	83,33	83,33	75,00	77,08	78,394	B
4	Badan Keuangan Daerah	70,00	72,73	72,27	72,27	72,27	75,00	72,27	73,18	77,73	73,008	B
5	Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah	81,81	83,64	80,40	73,34	79,98	82,39	80,90	79,15	82,97	80,429	B
6	Dinas Pendidikan	69,17	69,06	69,29	69,17	69,00	68,13	66,67	62,50	62,50	67,208	B
7	Dinas kesehatan	77,42	78,60	76,49	87,45	78,35	77,79	78,89	74,69	66,96	77,327	B
8	Dinas Pekerjaan Umum	80,10	80,10	77,55	84,18	77,55	79,59	81,63	82,14	83,16	80,558	B
9	Dinas Perhubungan	79,55	81,82	75,00	88,64	75,00	81,82	79,55	77,27	93,18	81,232	B
10	Dinas Kehutanan	85,00	85,00	87,50	85,00	82,50	85,00	87,50	82,50	82,50	84,638	A
11	Dinas Perkebunan	84,85	85,98	79,55	89,39	85,61	87,88	84,47	81,06	77,27	83,923	A
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	68,75	62,50	68,75	56,25	68,75	81,25	81,25	62,50	75,00	69,375	B
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	86,11	87,50	81,94	87,50	83,33	84,72	84,72	81,94	86,11	84,792	A
14	Dinas Koperasi UMKM	72,50	67,50	75,00	75,00	75,00	80,00	87,50	75,00	72,50	75,480	B
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	79,83	74,33	76,00	73,50	75,68	76,00	72,00	74,33	75,18	75,128	B
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	77,19	83,77	77,19	82,02	78,51	86,84	82,46	76,32	70,18	79,307	B
17	Dinas Perindag	82,14	72,14	80,00	67,86	80,71	79,29	77,86	80,00	79,29	77,621	B
18	Bappeda	75,00	76,39	76,15	79,17	75,04	79,35	80,74	75,10	70,83	76,343	B
19	Dinas Ketahanan Pangan	79,55	84,09	84,09	86,36	84,09	79,55	86,36	79,55	93,18	84,007	A
20	Dinas Kominfo	87,50	92,50	92,50	95,00	87,50	97,50	92,50	85,00	87,50	90,743	A
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	81,58	82,89	77,63	77,63	78,95	81,58	89,47	77,63	55,26	77,992	B
22	Dinas Sosial dan Dukcapil	75,00	65,00	72,50	70,00	77,50	82,50	82,50	65,00	70,00	73,260	B
23	Dinas Nakertrans	70,67	74,04	72,60	71,63	73,08	77,40	78,85	69,71	67,79	72,790	B
24	Dinas ESDM	71,30	66,67	68,52	74,07	76,85	76,85	80,56	72,22	73,15	73,281	B
25	Dinas Lingkungan Hidup	78,03	77,79	77,87	78,37	77,22	78,01	79,22	81,04	84,58	79,047	B
26	BPBD	72,50	85,00	75,00	87,50	77,50	77,50	75,00	75,00	65,00	76,590	B
27	RSUD Rd. Mattaher	74,84	73,84	75,38	75,13	76,00	76,25	75,75	77,59	78,25	75,814	B
28	Rumah Sakit Jiwa Daerah	77,55	77,33	76,18	79,89	78,26	80,89	81,38	77,12	83,65	79,059	B
29	Inspektorat Daerah	86,11	83,33	72,22	77,78	80,56	83,33	80,56	77,78	77,78	79,858	B
30	Satpol PP dan Damkar	90,00	95,00	92,50	90,00	92,50	80,00	92,50	90,00	80,00	89,078	A
31	Badan Kesbangpol	79,63	81,17	78,70	81,48	80,56	80,25	79,94	79,01	79,01	79,893	B
32	BPSDM	75,00	75,00	75,00	62,50	75,00	75,00	75,00	75,00	87,50	74,925	B
33	Sekretariat DPRD	76,56	76,56	89,06	76,56	79,69	84,38	85,94	82,81	60,94	79,088	B
34	Badan Penghubung	75,51	75,45	74,64	74,06	74,29	73,21	71,43	66,84	56,12	71,211	B
35	Biro Hukum	75,00	80,00	75,00	95,00	80,00	75,00	75,00	75,00	95,00	80,475	B
36	Biro Umum	82,41	85,19	81,48	87,96	87,04	93,52	92,59	92,59	96,30	88,697	A
37	Biro Perekonomian	75,00	75,00	66,67	83,33	75,00	75,00	75,00	75,00	66,67	74,00	B

No	Instansi	Unsur Pelayanan									Rata - Rata	Nilai Huruf
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Sumberdaya Alam											
38	Biro Kesra	68,75	62,50	56,25	56,25	62,50	81,25	81,25	62,50	43,75	63,825	B
39	Biro Pemerintah dan Otda	75,00	80,00	75,00	80,00	80,00	75,00	90,00	80,00	70,00	78,255	B
40	Biro Organisasi	90,00	85,00	82,50	87,50	85,00	85,00	87,50	82,50	72,50	84,083	A
41	Biro Humas dan Protokol	85,00	82,50	80,00	80,00	80,00	80,00	82,50	82,50	55,00	78,533	B
42	Biro Pembangunan dan Kerjasama	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	B
43	Biro Pengelolaan BMD	79,17	66,67	70,83	79,17	75,00	83,33	79,17	75,00	70,83	75,388	B
Nilai Rata-Rata IKM Provinsi Jambi		78,07	78,14	76,53	78,88	78,11	80,43	81,03	76,77	75,75	78,19	B

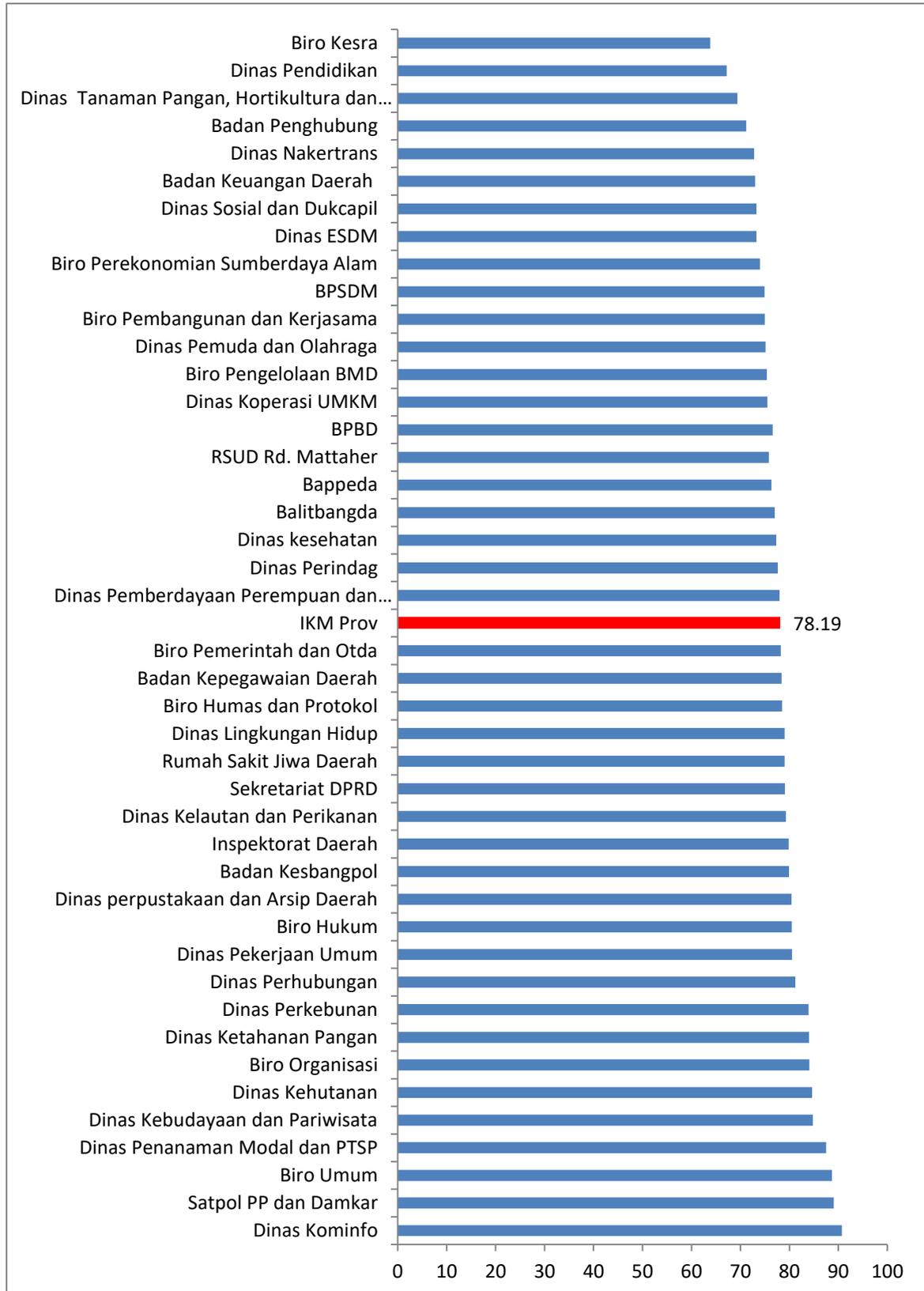
Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat, Biro Organisasi, 2017

- Ket:
- U1: Persyaratan pelayanan
 - U2: Prosedur pelayanan
 - U3: Waktu pelayanan
 - U4: Biaya/tarif pelayanan
 - U5: Produk/hasil pelayanan
 - U6: Kemampuan petugas pelayanan
 - U7: Perilaku petugas pelayanan
 - U8: Maklumat pelayanan
 - U9: Mekanisme pengaduan pelayanan

Tabel 3.12 Konversi Indeks Menjadi Mutu Pelayanan dan Kinerja

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 52,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Pada tahun 2016, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat hanya dilakukan pada 16 perangkat daerah dan selanjutnya pada tahun 2017 seluruh Perangkat Daerah yang berjumlah 43 dijadikan objek survey guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi. Berdasarkan tabel di atas, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2017 adalah “B” atau “Baik” dengan nilai rata-rata 78,19. Hal ini berarti tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi termasuk dalam kategori baik. Walaupun masih dalam kategori baik, namun nilai rata-rata tahun 2017 tersebut menurun 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada unsur persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk/ hasil pelayanan, maklumat pelayanan dan mekanisme pengaduan pelayanan. Sedangkan unsur dengan nilai tertinggi adalah perilaku petugas pelayanan dan terendah adalah unsur mekanisme pengaduan pelayanan.



Gambar 3.8 IKM masing-masing Perangkat Daerah dibandingkan IKM Provinsi Jambi Tahun 2017

Hal yang menarik terjadi pada unsur mekanisme pengaduan pelayanan, dimana pada tahun 2016 unsur ini merupakan unsur dengan nilai tertinggi, namun menjadi unsur dengan nilai terendah pada tahun 2017. Hal ini berarti Perangkat Daerah yang baru dijadikan objek pada tahun 2017 perlu menjadikan unsur ini sebagai perhatian utama untuk perbaikan di tahun yang akan datang dengan tidak mengurangi perbaikan-perbaikan pada unsur lainnya. Sedangkan nilai unsur perilaku petugas pelayanan yang telah menjadi unsur dengan penilaian tertinggi di tahun 2017 ini harus dipertahankan kualitasnya bahkan harus diupayakan untuk lebih ditingkatkan

Tabel 3.13 Capaian Indikator Indeks kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks kepuasan masyarakat	B (76,89)	B (77,61)	B (76,01)	B (79,38)	B	B (78,19)	100%	A	97,40

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat, Biro Organisasi, 2017

Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2017, maka capaian tahun 2017 telah memenuhi target atau terealisasi 100% dan masuk dalam kriteria **sangat tinggi**. Program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat ini antara lain adalah:

- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
- Program reformasi birokrasi
- Program-program rutin pada seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

Tabel 3.14 Rincian Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan pada tahun 2017

No	Bidang	Diterbitkan		Jumlah Keseluruhan
		Perizinan	Non Perizinan	
1	Penanaman Modal	29	2	31
2	Perencanaan dan Pemb. Daerah	-	-	-
3	Pekerjaan Umum	7	-	7
4	Sosial	-	11	11
5	Koperasi dan UKM	-	-	-
6	Pertanian	-	-	-
7	Perkebunan	13	7	20
8	Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-
9	Kesehatan	29	20	49
10	Perikanan dan kelautan	42	-	42

No	Bidang	Diterbitkan		Jumlah Keseluruhan
		Perizinan	Non Perizinan	
11	Perindustrian dan Perdagangan	-	31	31
12	Energi dan SDM	187	4	191
13	Kehutanan	9	3	12
14	Lingkungan Hidup	2	-	2
15	Peternakan	9	-	9
16	Perhubungan	7	1	8
17	Ketenagakerjaan	26	17	43
Jumlah Keseluruhan		360	96	456

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Jambi, 2018

Khusus dalam program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, peningkatan Kualitas Pelayanan publik bidang penanaman modal dapat dilihat dari rata-rata lama hari pengurusan perizinan dan peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan serta indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, maka pelayanan pengurusan perizinan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 rata-rata dapat diselesaikan dalam 10 hari, dengan indeks kepuasan masyarakat pada level sangat baik dengan nilai indeks 87,05. Melalui kemudahan yang diberikan maka realisasi jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan dapat melampaui target pada tahun 2017, yaitu sebanyak 456 izin dari 320 izin yang ditargetkan atau tercapai 142,5%. Rincian perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan dapat dilihat pada tabel di atas.

Permasalahan:

1. Indeks kepuasan masyarakat pada setiap perangkat daerah tidak merata dan terdapat 21 Perangkat Daerah yang indeks kepuasan masyarakatnya di bawah rata-rata provinsi. Hal ini ditunjukkan oleh perangkat daerah yang nilai unsur-unsur pelayanannya masih harus ditingkatkan.
2. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan mekanisme pengaduan pelayanan.

Solusi:

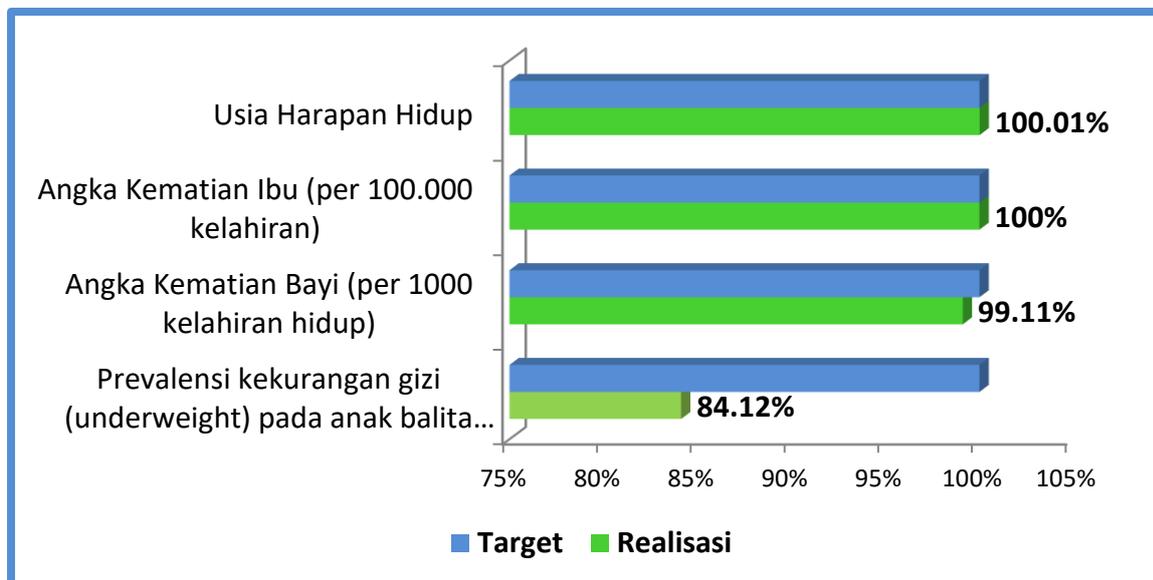
1. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggat waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisi lain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/ jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal.

2. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik.
3. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah
4. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh sistem IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas

Tujuan 3 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan sebagaimana kita ketahui bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumberdaya kesehatan. Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat



Gambar 3.9 Capaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Tingkat keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi dan penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita. Tingginya capaian usia harapan hidup memperlihatkan peningkatan derajat kesehatan dan pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat khususnya sektor kesehatan yang didukung oleh sektor ekonomi, budaya dan pendidikan. Capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada gambar di atas.

3.1.1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup menjadi salah satu penanda penting keberhasilan pembangunan bidang kesehatan di suatu daerah.

Tabel 3.15 Capaian Indikator Usia harapan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Usia Harapan Hidup*)	70,19	70,35	70,43	70,56	70,7	70,71*)	100,01	72	98,21

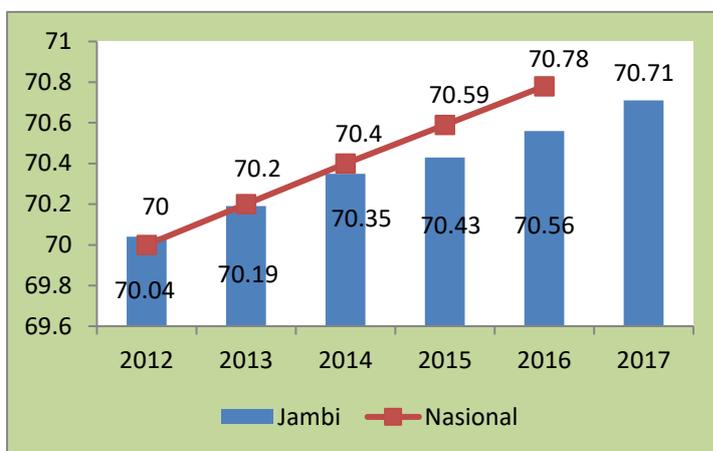
Sumber: BPS, 2016

Ket: *) data yang dikeluarkan tahun 2017 (kondisi tahun 2016)

Data usia harapan hidup dikeluarkan oleh BPS setiap tahun merupakan data capaian tahun sebelumnya dan untuk penghitungan tahun 2018 yang merupakan data capaian tahun 2017 belum dirilis hingga laporan ini dibuat. Bila melihat capaian usia harapan hidup Provinsi Jambi 5 tahun terakhir, terlihat peningkatan yang cukup menggembirakan. Data tahun 2017 menunjukkan peningkatan usia harapan hidup sebesar 0,15 tahun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 70,56 tahun menjadi 70,71 tahun atau meningkat 0,21%. Realisasi ini melebihi target tahun 2017 yaitu 70,7 tahun atau terealisasi sebesar 100,01%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka sampai dengan tahun 2017 kinerja indikator usia harapan hidup telah tercapai sebesar 98,21%.

Capaian kinerja ini tidak terlepas dari upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, penurunan angka kematian ibu dan bayi serta perubahan pola hidup masyarakat dengan melaksanakan program-program berikut:

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Upaya kesehatan Perorangan
- Program pembiayaan dan jaminan kesehatan
- Program Kesehatan ibu dan anak
- Program kesehatan anak balita
- Program perbaikan gizi masyarakat
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program pelayanan kesehatan penduduk miskin



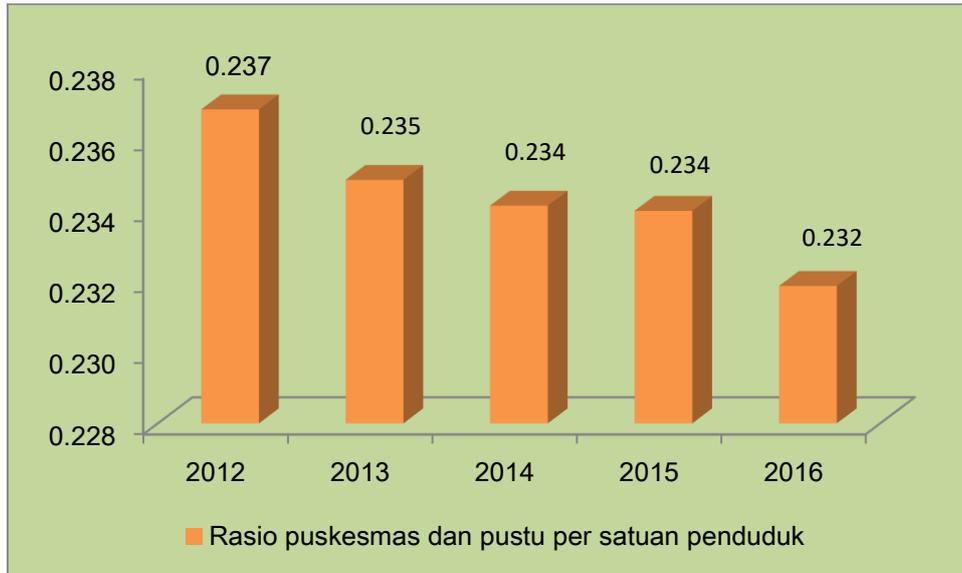
Sumber, BPS (data diolah), 2017

Gambar 3.10 Perbandingan capaian indikator usia harapan hidup Provinsi Jambi dengan usia harapan hidup Indonesia

Salah satu upaya perbaikan pelayanan kesehatan, adalah meningkatkan rasio jumlah puskesmas per satuan penduduk. Data terakhir 2017, yang merupakan gambaran kondisi Tahun 2016, rasio jumlah Puskesmas per satuan penduduk Provinsi Jambi pada 5 tahun terakhir ini cenderung menurun, yaitu 0,237 pada tahun 2012

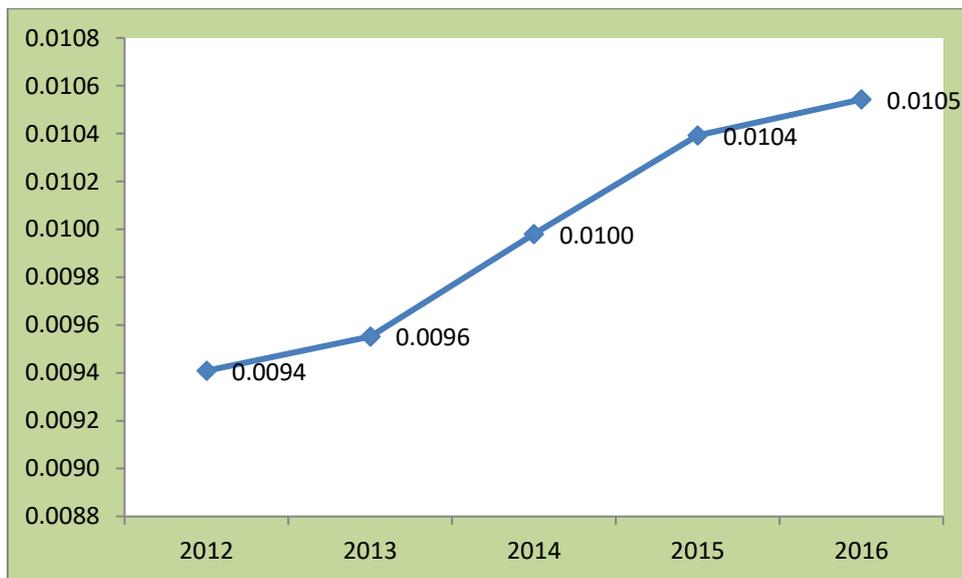
menjadi 0,232 pada tahun 2016. Hal ini berarti pertumbuhan jumlah puskesmas tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk atau pertumbuhan

penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah puskesmas. Ke depan diharapkan terjadi keseimbangan antara penyediaan puskesmas dengan jumlah penduduk.



Sumber: BPS, 2017(data diolah)

Gambar 3.11 Rasio Puskesmas Per satuan Penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016



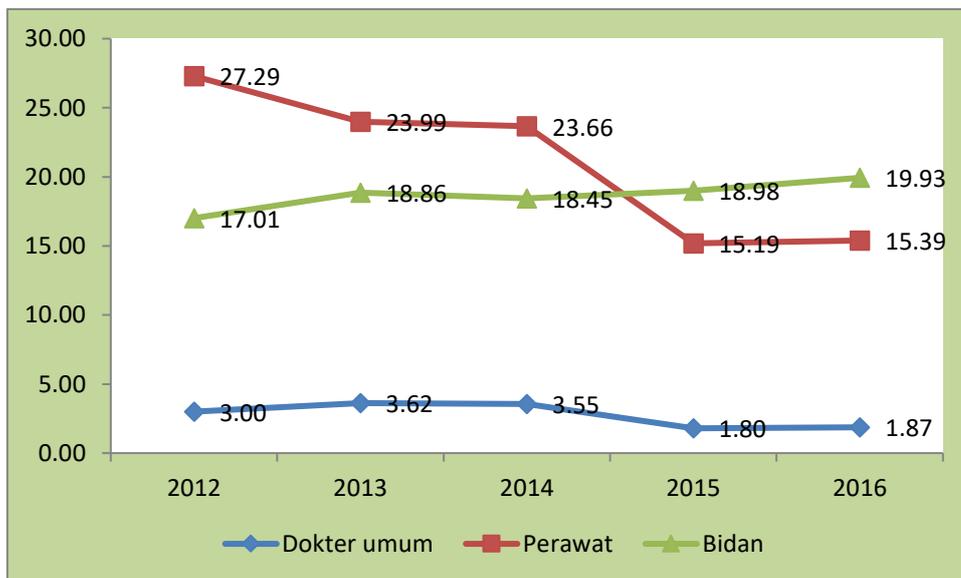
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Jambi, 2017(data diolah)

Gambar 3.12 Rasio posyandu per satuan balita

Sementara itu ketersediaan posyandu, sebagaimana terlihat pada gambar di atas memperlihatkan rasio posyandu per satuan balita di Provinsi Jambi yang menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Bila pada tahun 2012 satu posyandu harus melayani 106 balita, maka pada tahun 2016 terlihat bahwa satu posyandu dapat melayani 95 balita. Rasio

ini harus terus ditingkatkan mengingat beban yang harus dilakukan oleh satu posyandu masih terlalu berat. Selain itu pelatihan terhadap kader-kader posyandu juga harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu.

Di sisi lain, standar ketenagaan puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, untuk puskesmas kawasan perkotaan, puskesmas kawasan perdesaan dan puskesmas kawasan terpencil/sangat terpencil disyaratkan untuk puskesmas rawat inap jumlah minimal sebanyak dua dokter dan untuk puskesmas non rawat inap jumlah minimal sebanyak satu dokter. Pada tahun 2016, jumlah seluruh Puskesmas di Provinsi Jambi sebanyak 189. Dengan menggunakan jumlah puskesmas dan jumlah tenaga dapat disusun rasio tenaga kesehatan terhadap puskesmas. Rasio dokter umum terhadap puskesmas di Provinsi Jambi pada tahun 2012 adalah 3 dokter per puskesmas, rasio ini meningkat menjadi 3,55 pada tahun 2014, namun mengalami penurunan menjadi 1,87 pada tahun 2016. Walaupun secara provinsi masih memenuhi standar berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, namun bila dilihat per kabupaten terlihat bahwa rasio dokter umum terhadap puskesmas di Kabupaten tanjung Jabung Timur belum memenuhi standar karena masih pada rasio 0,94. Oleh karena itu kedepan pemerataan dokter umum ini harus menjadi perhatian bersama baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

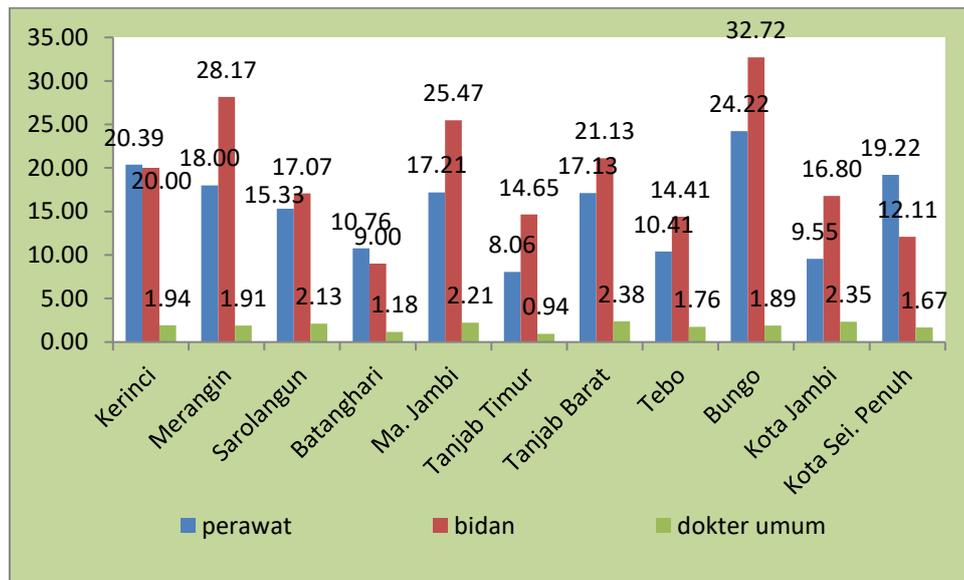


Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.13 Rasio Dokter Umum, Perawat dan Bidan dengan Puskesmas di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016

Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014, jumlah minimal tenaga perawat adalah lima perawat untuk puskesmas non rawat inap dan delapan perawat untuk puskesmas rawat inap. Sementara jumlah minimal tenaga bidan adalah empat bidan untuk puskesmas non rawat inap dan tujuh bidan untuk puskesmas rawat inap. Rasio perawat di puskesmas terhadap jumlah

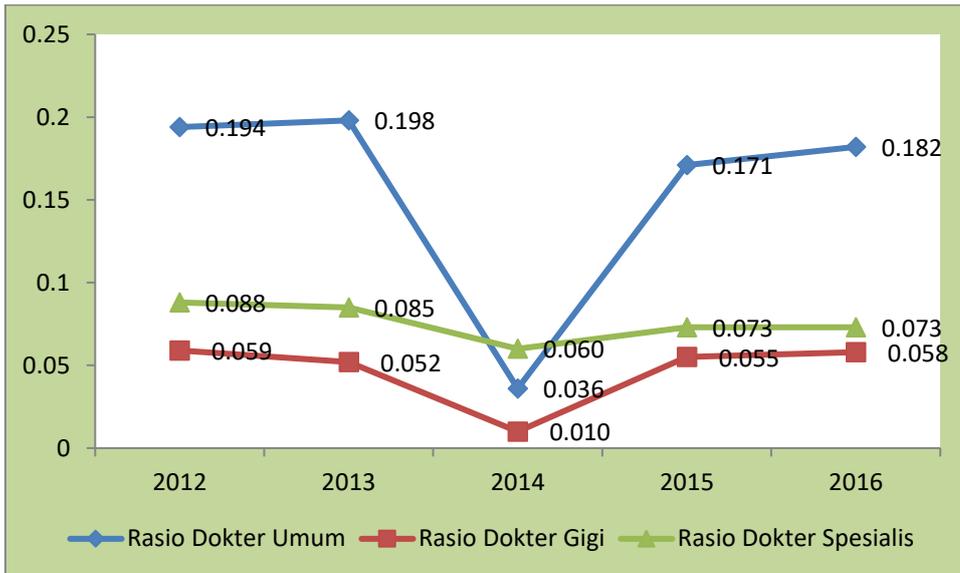
puskesmas di Provinsi Jambi pada tahun 2012 sebesar 27,29 perawat per puskesmas dan rasio ini terus menurun hingga tahun 2016 menjadi 15,39. Meskipun terjadi penurunan, secara rasio jumlah perawat telah mencapai standar minimal, walaupun persebaran per kabupaten belum merata. Rasio bidan di puskesmas terhadap jumlah puskesmas di Provinsi Jambi pada tahun 2012 sebesar 17,01 bidan per puskesmas dan rasio ini terus meningkat menjadi 19,93 pada tahun 2016. Secara provinsi jumlah bidan telah memenuhi standar minimal, walaupun persebaran per kabupaten belum merata. Sebaran rasio dokter umum, perawat dan bidan disajikan pada gambar di atas.



Sumber: BPS, 2017

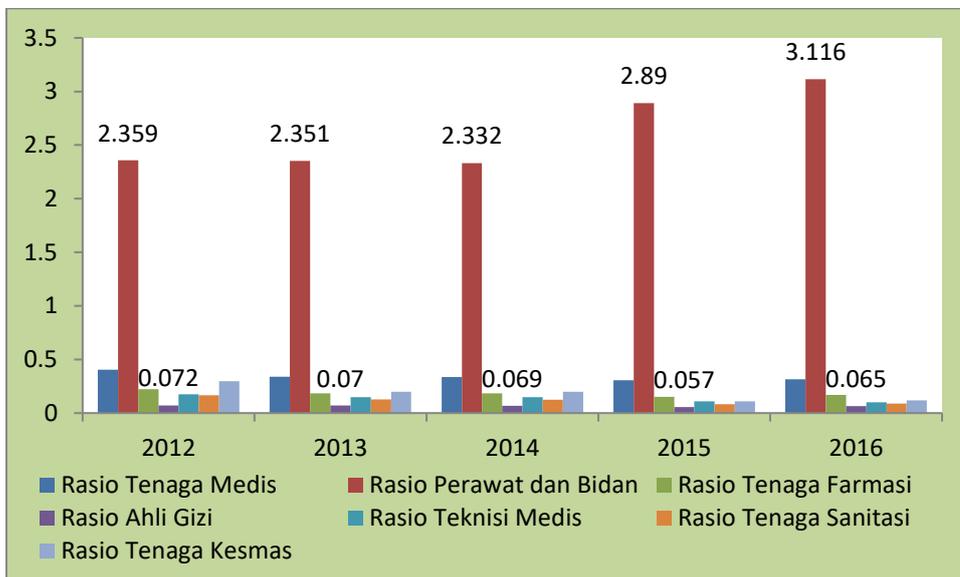
Gambar 3.14 Rasio Dokter Umum, Perawat dan Bidan dengan Puskesmas di kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketersediaan dokter umum untuk mencapai target pembangunan kesehatan pada tahun tertentu. Gambar di bawah ini menunjukkan rasio dokter umum terhadap 1.000 penduduk di Provinsi Jambi, dan berdasarkan gambar tersebut secara umum rasio masih mencukupi untuk pelayanan minimal bidang kesehatan.



Sumber: BPS, 2017 (data diolah)

Gambar 3.15 Rasio dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis per 1.000 penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016



Sumber: BPS, 2017 (data diolah)

Gambar 3.16 Rasio Tenaga kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016

Permasalahan:

1. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi.

Solusi:

1. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.

3.1.2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) adalah jumlah kematian ibu akibat proses kelahiran, persalinan, dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. atau angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Tabel 3.16 Capaian Indikator Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)

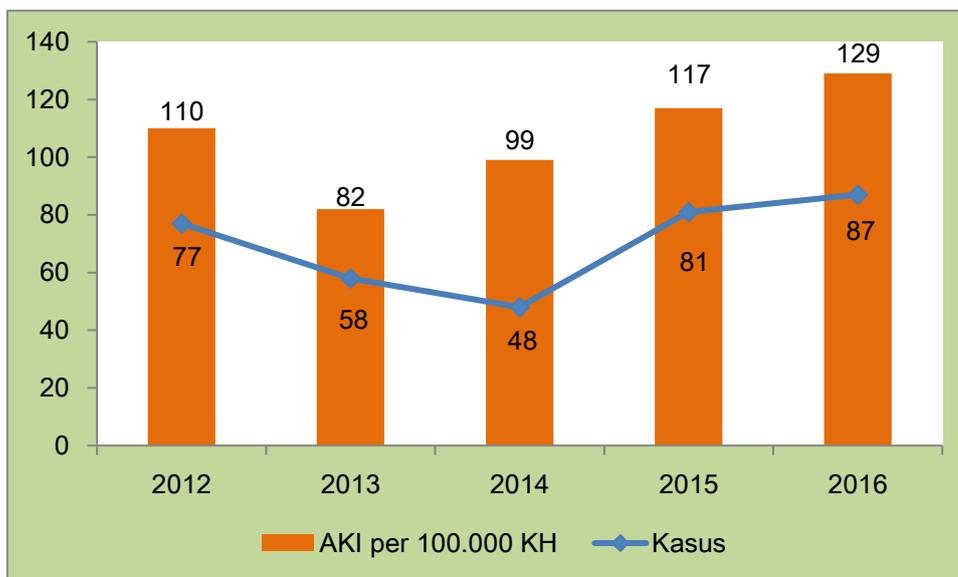
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	359*)	359*)	359*)	359*)	359*)	359*)	100,00	356	99,16

Sumber: SDKI, 2012

AKI didapatkan dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan digunakan untuk pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang

terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Berdasarkan SDKI terakhir yaitu SDKI tahun 2012, AKI Provinsi Jambi adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup. Oleh karena data ini adalah survey terakhir maka capaian ini masih dipakai untuk data capaian tahun 2017. Persentase capaian realisasi ini adalah 100% atau **sangat tinggi** karena sesuai dengan target tahun **2017 sebesar 359 per 100.000** kelahiran hidup.

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil, bersalin atau dalam 42 hari pasca persalinan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain. Data terakhir angka kematian ibu berdasarkan kasus yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di akhir semester pertama tahun 2017 yang merupakan data kondisi tahun 2016, jumlah kematian ibu di kabupaten/kota Provinsi Jambi yang terbanyak terdapat pada Kabupaten Bungo dengan 10 kasus, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada Kabupaten Batang Hari dan Kota Sungai Penuh yaitu masing-masing 2 kasus. Angka Kematian Ibu hingga saat ini masih tetap tinggi, bahkan kasus kematian terjadi peningkatan di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit). Hal tersebut berkaitan dengan berbagai sebab, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung (*Direct Obstetric Death*) kematian ibu antara lain adalah komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan, atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) 2012, Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih sudah memperlihatkan tren peningkatan dari tahun sebelumnya, namun kualitas pelayanan dan kompetensi tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai standar pelayanan.



Sumber: Dinas Kesehatan (data diolah), 2017

Gambar 3.17 Angka Kematian Ibu (kasus) dan Konversi AKI per 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016

Tabel 3.17
Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2012-2016

No	Kabupaten/kota	Jumlah Kematian Ibu				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kerinci	10	5	3	6	6
2	Merangin	16	12	8	10	6
3	Sarolangun	7	6	5	3	5
4	Batanghari	4	3	2	4	2
5	Bungo	3	6	5	6	10
6	Tebo	6	6	2	5	9
7	Muaro Jambi	7	5	3	3	3
8	Tanjab Barat	5	5	5	2	5
9	Tanjab Timur	10	6	5	8	8
10	Kota Jambi	8	4	6	7	3
11	Kota Sei Penuh	1	0	4	2	2
Provinsi		77	58	48	81	87

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

Tabel 3.18 Cakupan kunjungan ibu hamil, persalinan ditolong tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu nifas di Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	IBU HAMIL			IBU BERSALIN/ NIFAS			
		JUMLAH	K1	K4	JUMLAH	PERSALINAN DITOLONG NAKES	MENDAPAT YANKES NIFAS	IBU NIFAS MENDAPAT VIT A
			%	%		%	%	%
1	KERINCI	4.170	107,53	99,02	3.981	99,70	98,89	100,08
2	MERANGIN	8.593	94,60	92,62	8.203	90,25	92,61	91,98
3	SAROLANGUN	6.772	99,28	94,17	6.471	93,28	93,37	94,51
4	BATANGHARI	5.853	98,56	95,39	5.587	95,44	95,40	95,42
5	MUARO JAMBI	10.054	98,35	95,21	9.599	91,63	91,58	91,60
6	TANJAB TIMUR	4.264	98,12	90,74	4.069	91,91	91,42	94,72
7	TANJAB BARAT	7.049	96,85	92,18	6.728	87,51	88,33	90,10
8	TEBO	7.381	97,13	91,07	7.044	89,20	87,17	90,69
9	BUNGO	8.495	93,07	87,88	8.108	89,44	86,37	89,21
10	KOTA JAMBI	11.878	97,98	93,60	11.145	93,88	92,07	93,88
11	KOTA SUNGAI PENUH	1.678	100,12	95,23	1.602	93,70	86,95	87,08
JUMLAH		76.187	97,65	93,05	72.537	91,90	91,20	92,59

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pelayanan terhadap ibu hamil ataupun ibu bersalin dan nifas guna menekan jumlah kematian ibu, antara lain mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya serta meningkatkan kualitas pelayanan yang

diberikan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang membantu proses melahirkan. Hasil dari upaya – upaya tersebut dapat dilihat dari cakupan kunjungan pertama dan keempat ibu hamil yang telah mencapai 97,7 % dan 93 % serta persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang mencapai 91,9%. Bila merujuk pada data di atas, terlihat bahwa cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Bungo baru mencapai 89,44% sehingga dapat dikatakan bahwa hal inilah yang menyebabkan jumlah kematian ibu di kabupaten ini tertinggi di Provinsi Jambi. Hal ini dapat dibandingkan dengan cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Batanghari dan Kota Sungai Penuh yang masing-masing telah mencapai 95,44% dan 93,79%, sehingga kedua Kabupaten/ Kota ini memiliki jumlah kematian ibu melahirkan paling rendah yaitu 2 orang.

Program-program yang dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian ibu adalah:

1. Program Kesehatan Ibu dan Anak
2. Program Perbaikan gizi Masyarakat
3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Permasalahan:

1. Jumlah Kematian Ibu berdasarkan laporan jumlah kematian ibu (hamil, bersalin, dan nifas) pada fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan peningkatan, meskipun bila dilihat pada beberapa kabupaten/ kota terjadi penurunan.

Solusi:

1. Perlu diteliti lebih lanjut faktor penyebab peningkatan jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi, apabila faktor penyebab berasal dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan, maka diperlukan koordinasi dengan sektor lain dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang terkait dalam penanganannya.

3.1.3. Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate (IMR)* dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, baik pada tingkat provinsi maupun nasional. Sama halnya dengan AKI, AKB juga didapatkan dari SDKI yang dilakukan 5 tahun sekali.

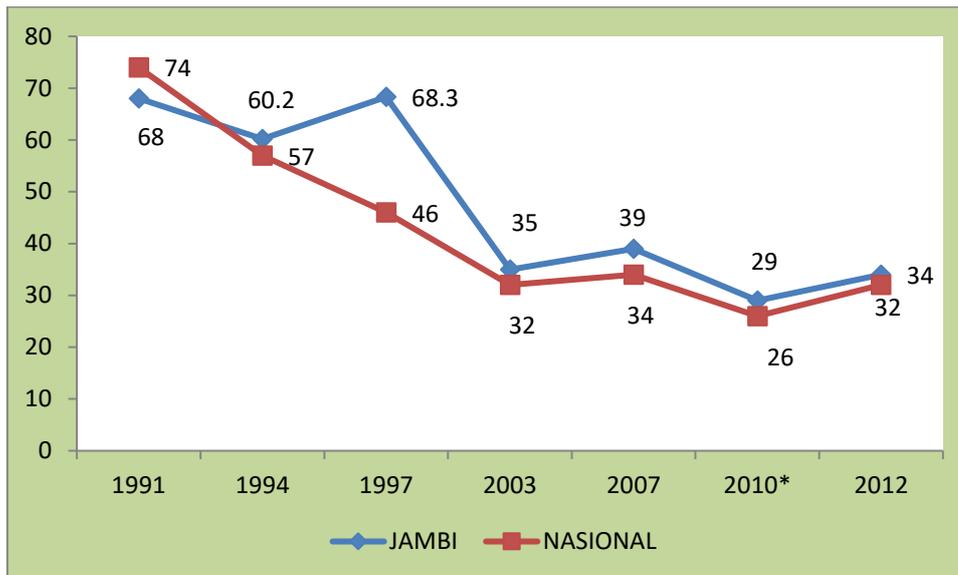
Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilaksanakan 5 tahun sekali, terjadi kecenderungan penurunan AKB sejak tahun 1991 hingga tahun 2012. Oleh karena data ini adalah survey terakhir maka capaian ini masih dipakai untuk data capaian tahun 2016. Persentase capaian realisasi ini adalah 100% atau **sangat tinggi** karena sesuai dengan target tahun 2017 sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan AKB, diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Perbaikan status ekonomi masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi terhadap penurunan kematian bayi.

Tabel 3.19 Capaian Indikator Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	34*)	34*)	34*)	34*)	34*)	34*)	100,00	32	99,16

Sumber: SDKI, 2012

Situasi derajat kesehatan digambarkan salah satunya melalui Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu bulan.



Sumber: SDKI Tahun 2012

Gambar 3.18 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Provinsi Jambi Tahun 1991-2012

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilaksanakan 5 tahun sekali, terjadi kecenderungan penurunan AKB sejak tahun 1991 hingga tahun 2012. Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jambi yang dirilis pada triwulan II Tahun 2017, laporan dari fasilitas kesehatan menunjukkan bahwa jumlah bayi yang meninggal adalah 274 bayi dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 67.429 kelahiran hidup, atau terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan jumlah bayi yang meninggal sebanyak 222 bayi. Jika diproyeksikan, maka angka kematian bayi yang dilaporkan di Provinsi Jambi tahun 2016 adalah 4 per 1.000 kelahiran hidup. Angka proyeksi ini meningkat dibandingkan tahun 2015, dimana pada tahun tersebut angka proyeksi kematian bayi adalah 3 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah bayi yang meninggal paling banyak di laporkan terdapat di Kabupaten Merangin (41 orang) sedangkan paling sedikit terdapat di Kota Sungai Penuh (7 orang).

Upaya kesehatan yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Jambi sudah cukup banyak, diantaranya adalah PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) di puskesmas-puskesmas yang ada di Provinsi Jambi dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) 24 Jam pada rumah sakit milik pemerintah daerah (RSUD). Dari 13 RSUD yang ada di Provinsi Jambi, 11 diantaranya telah melaksanakan PONEK 24 jam. Faktor penyebab 2 RSUD yang belum melaksanakan PONEK 24 jam tersebut adalah tenaga dokter spesialis kandungan dan anak yang bekerja masih separuh waktu sehingga pelayanan PONEK belum optimal.

Tabel 3.20 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2016

NO	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN			
			NEONATAL	BAYI	ANAK BALITA	BALITA
1	KERINCI	19	29	37	0	37
2	MERANGIN	23	38	41	0	41
3	SAROLANGUN	15	23	23	0	23
4	BATANGHARI	17	27	29	1	30
5	MUARO JAMBI	19	25	27	1	28
6	TANJAB TIMUR	17	11	12	1	13
7	TANJAB BARAT	16	34	35	0	35
8	TEBO	17	15	30	11	41
9	BUNGO	18	13	17	3	20
10	KOTA JAMBI	20	12	16	1	17
11	KOTA SUNGAI PENUH	9	5	7	2	9
JUMLAH (KAB/KOTA)		190	232	274	20	294

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2016, 2017

Tabel 3.21 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Jambi Tahun 2016

NO	KABUPATEN	PUSKESMAS	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	DESA/ KELURAHAN UCI	% DESA/ KELURAHAN UCI
1	KERINCI	19	287	265	92,33
2	MERANGIN	23	215	194	90,23
3	SAROLANGUN	15	158	149	94,30
4	BATANGHARI	17	124	105	84,68
5	MUARO JAMBI	19	155	155	100,00
6	TANJAB TIMUR	17	93	89	95,70
7	TANJAB BARAT	16	134	120	89,55
8	TEBO	17	112	105	93,75
9	BUNGO	18	153	152	99,35
10	KOTA JAMBI	20	62	62	100,00
11	KOTA SUNGAI PENUH	9	69	59	85,51
JUMLAH (KAB/KOTA)		190	1.562	1.455	93,15

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2016, 2017

Selain itu dilakukan pula imunisasi yang merupakan kegiatan rutin dan terintegrasi dalam pelayanan dasar di Puskesmas, Rumah Sakit dan unit-unit pelayanan lainnya termasuk di pos pelayanan terpadu (Posyandu). Imunisasi juga telah memberikan kontribusi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi dan anak balita khususnya yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, pertusis,

tetanus neonatorum, polio dan penyakit campak. Hal tersebut akan lebih cepat tercapai apabila cakupan imunisasi rutin (sasaran bayi, ibu hamil dan anak sekolah) dapat dipertahankan tetap tinggi setiap tahun dan merata sampai ketinggian desa/kelurahan (UCI Desa). Adapun cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Provinsi Jambi saat ini telah mencapai 93,15%.

Adapun program-program yang dilaksanakan untuk menurunkan angka kematian bayi adalah:

- Program Kesehatan Ibu dan Anak
- Program Perbaikan gizi Masyarakat
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Permasalahan:

- Sarana, prasarana, sumber daya manusia pendukung PONEK 24 jam masih terbatas.

Solusi:

- Melaksanakan pelatihan workshop PONEK 24 Jam di Rumah Sakit
- Menganggarkan dana dan mensosialisasikan program workshop PONEK 24 Jam bagi Rumah Sakit yang belum mengikuti workshop PONEK
- Monitoring dan evaluasi program PONEK melalui On the Job Training (OJT) setiap 6 bulan sekali bagi Rumah Sakit yang sudah mengikuti workshop PONEK melalui monev program pelayanan kesehatan perorangan

3.1.4. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita (persen)

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Data Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita merupakan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan tiga tahun sekali. Sampai dengan akhir tahun 2017, data terbaru belum dirilis sehingga data prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita di Provinsi Jambi yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran ini di tahun 2017 masih menggunakan hasil Riskesdas Tahun 2013, yaitu 19,7%. Berdasarkan data

tersebut, persentase capaian realisasi pada tahun 2017 adalah 84,12% atau masuk dalam kategori tinggi, sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka sampai dengan tahun 2017, kinerja atas indikator ini baru mencapai 68,67% atau masih dalam kategori sedang.

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017	
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi			% capaian
Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	19,7 (Risksdas 2013)	19,7 (Risksdas 2013)	19,7 (Risksdas 2013)	19,7 (Risksdas 2013)	17	19,7 (Risksdas 2013)	84,12	15	68,67

Sumber: Riskesdas, 2013

Data hasil Riskesdas tahun 2013 di atas menunjukkan adanya peningkatan 0,1% prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dibandingkan hasil Riskesdas Tahun 2010 yaitu sebesar 19,6%. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan angka ini, diantaranya adalah memberikan pelayanan kesehatan pada anak balita meliputi; pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala; penyuluhan pada orang tua (kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, pendidikan seksual yang dimulai sejak balita atau sejak anak mengenali identitasnya sebagai laki-laki atau perempuan, perawatan anak saat sakit, dan menjauhkan anak dari bahaya); penyuluhan cara menstimulasi perkembangan anak; imunisasi dan upaya pencegahan penyakit; pemberian vitamin A dimana Kapsul Vitamin A berwarna merah diberikan 2 kali dalam setahun; dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi prevalensi kekurangan gizi pada anak balita adalah melalui pemberdayaan posyandu. Jumlah Posyandu yang ada sampai tahun 2017 adalah sebanyak 3.234, terdiri dari posyandu strata Madya sebanyak 1.430 posyandu atau meningkat 44% dari tahun lalu, posyandu strata Purnama sebanyak 1.061 posyandu atau meningkat 32 % dari tahun lalu, walaupun pencapaian Posyandu Aktif di Tahun 2017 secara kuantitatif dan persentase mengalami penurunan dibandingkan pada pencapaian di tahun 2016 yaitu sebesar 1.880 posyandu aktif dengan persentase sebesar 56,65 %. Tingkat partisipasi dan aktifan kegiatan posyandu dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab dari sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat, terutama PKK dan Rukun Tetangga.

Tabel 3.23 Cakupan Data Kualifikasi Posyandu di Provinsi Jambi Tahun 2017

NO.	KAB/KOTA	TINGKATAN / STRATA POSYANDU								JUMLAH	POSYANDU AKTIF	
		PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI			JUMLAH	%
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%			
1.	Kerinci	33	11%	164	57%	91	31%	2	1%	290	93	32.07%
2.	Kota Sungai Penuh	10	14%	51	69%	13	18%	0	0%	74	13	17.57%
3.	Merangin	97	23%	140	34%	110	27%	68	16%	415	178	42.89%
4.	Tabo	15	5%	119	38%	125	40%	53	17%	312	178	57.05%
5.	Bungo	142	50%	106	37%	29	10%	7	2%	284	36	12.68%
6.	Sarolangun	0	0%	176	52%	139	41%	25	7%	340	164	48.24%
7.	Tanjab Barat	24	9%	148	52%	78	28%	32	11%	282	110	39.01%
8.	Tanjab Timur	37	14%	114	43%	91	34%	23	9%	265	114	43.02%
9.	Batanghari	2	1%	84	27%	125	40%	100	32%	311	225	72.35%
10.	Muara Jambi	11	5%	103	51%	74	37%	13	6%	201	87	43.28%
11.	Kota Jambi	13	3%	225	49%	186	40%	36	8%	460	111	24.13%
	TOTAL	384	12%	1430	44%	1061	33%	359	11%	3234	1309	40.48%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2018

Adapun program yang telah dilaksanakan untuk penurunan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita ini adalah sebagai berikut:

- Program kesehatan anak balita
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan:

1. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang di masyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun-temurun yang kadangkala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
2. Integrasi program gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak di tingkat pelaksana (puskesmas dan jaringannya) belum optimal.

Solusi:

1. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.

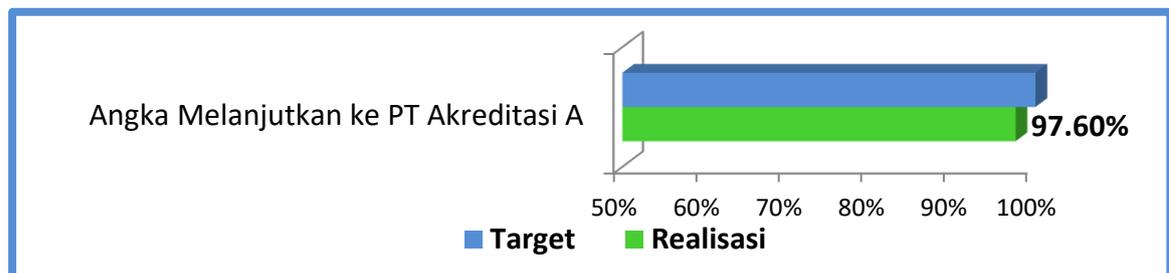
2. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan dilaporkan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.

Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Sasaran 4.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting agar masyarakat dapat terampil dan produktif yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan juga merupakan aspek yang sangat strategis untuk menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung. Dalam era globalisasi, keunggulan kompetisi suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya.



Gambar 3.19 Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan bidang pendidikan dibagi sesuai dengan tingkat pemerintahan, dimana Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan menengah. Sebagaimana tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2017 tetap fokus pada peningkatan kualitas

pendidikan menengah. Capaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan menengah dapat dilihat pada gambar di atas.

4.1.1. Tingkat Kelulusan SMA dan SMK

Indikator untuk mengukur keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan menengah adalah tingkat kelulusan peserta didiknya. Untuk Provinsi Jambi, tingkat kelulusan SMA dan SMK pada tahun 2017 adalah 100%. Tingkat kelulusan ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang baru mencapai 98,79%. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka capaian realisasinya mencapai 100,91% atau termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Capaian ini jika dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021 juga termasuk dalam kategori sangat tinggi karena telah mencapai 100,50%.

Peningkatan tingkat kelulusan pada tahun 2017, selain disebabkan oleh berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan juga sedikit terpengaruh oleh kebijakan bahwa Ujian Nasional tidak menjadi salah satu penentu kelulusan seorang siswa. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang diambil turut berpengaruh terhadap capaian kinerja.

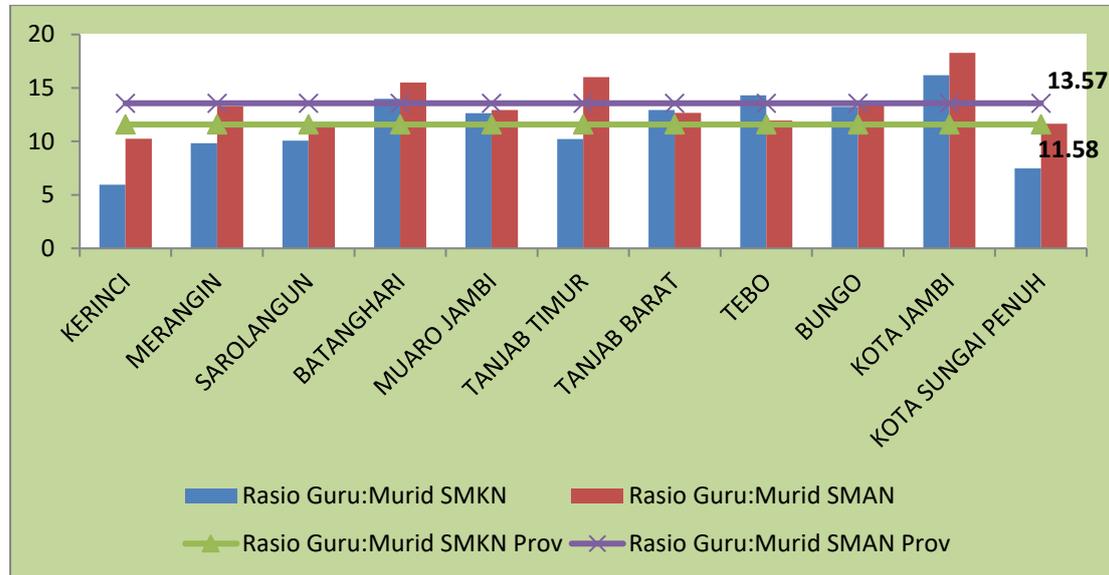
Tabel 3.24 Capaian Indikator Tingkat Kelulusan SMA dan SMK

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kon disi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Tingkat Kelulusan SMA dan SMK	NA	NA	94%	98,79%	99,1%	100%	100,91%	99,5%	100,50%

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Jambi, 2018

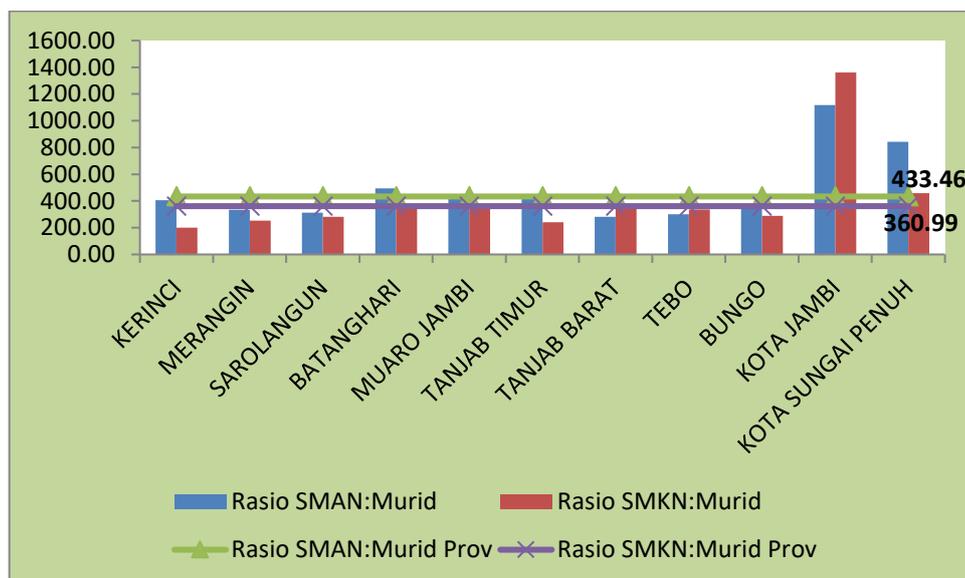
Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah menengah di Provinsi Jambi, antara lain dengan meningkatkan sarana prasarana sekolah, pemberian beasiswa, serta penyediaan dan pendistribusian guru berkualitas. Bila dilihat sebaran rasio guru dengan murid SMA Negeri di kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi, kabupaten/kota dengan rasio lebih baik dibanding provinsi adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Sei. Penuh. Sedangkan rasio antara guru dan murid SMK Negeri pada kabupaten/ kota yang lebih baik dari provinsi adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten

Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh. Belum meratanya distribusi guru ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi dan melalui kewenangannya pada pendidikan menengah akan dilakukan redistribusi guru maupun re-engineering SMK pada kabupaten dengan rasio guru : murid SMA tinggi tapi rasio guru : murid SMK rendah.



Sumber: Jambi Dalam Angka, 2017

Gambar 3.20 Rasio Guru dengan Murid SMAN dan SMKN pada kabupaten/ kota se Provinsi Jambi Tahun 2016



Sumber: Jambi Dalam Angka, 2017

Gambar 3.21 Rasio sekolah dengan murid SMAN dan SMKN pada kabupaten/ kota se Provinsi Jambi Tahun 2016

Sementara itu, rasio antara sekolah dengan murid SMA Negeri maupun antara sekolah dengan murid SMK Negeri masih relatif baik. Bila dilihat pada grafik di atas, maka wilayah yang membutuhkan penambahan unit sekolah baru ataupun ruang kelas baru untuk SMA hanya pada Kota Jambi dan Kota Sei. Penuh, serta penambahan SMK hanya dibutuhkan di Kota Jambi. Sedangkan pada kabupaten - kabupaten lain relatif masih dalam jumlah ideal.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

- Program Pendidikan SMA
- Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Program Pendidikan SMK
- Program BOSDA
- Program manajemen pelayanan pendidikan

Permasalahan:

1. Ujian Nasional berbasis komputer merupakan salah satu kendala bagi SMA dan SMK di Provinsi Jambi, baik dari segi sarana prasarana juga kesiapan siswa dalam menghadapinya.
2. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi

Solusi:

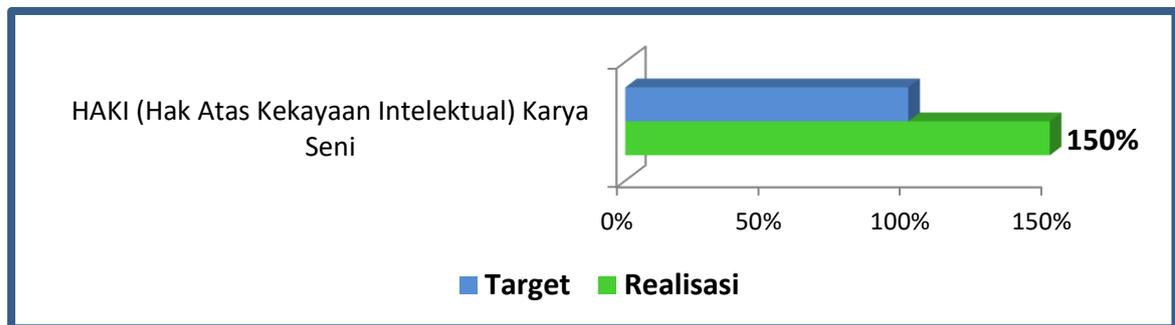
1. Penyediaan kelengkapan sarana prasarana Ujian Nasional berbasis komputer serta mengintensifkan *try out* menggunakan metode tersebut.
2. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
3. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan
4. Distribusi guru secara merata

Tujuan 5 Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis

Sasaran 5.1. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan Seni dan budaya

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: 42 Tahun 2009 dan Nomor : 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah daerah wajib melaksanakan pelestarian kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, yang meliputi aspek-aspek: kesenian; kepurbakalaan; kesejarahan; permuseuman; kebahasaan; kesusastraan; tradisi; kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;kepustakaan;kenaskahan;danperfilman.

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khas Melayu Jambi, pengakuan atas hak kekayaan intelektual (HAKI) karya seni perlu terus dilakukan agar karya seni khas Provinsi Jambi tidak diakui oleh daerah/ negara lain. Capaian atas sasaran Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.22 Capaian sasaran Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya

5.1.1. HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) karya Seni

Dalam rangka menumbuhkembangkan seni budaya khususnya budaya khas Melayu Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi terus menggali keragaman budaya yang ada serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelompok-kelompok kesenian dan seniman serta karya cipta/ inovasi teknologi dan sosial budaya.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kon disi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
HAKI karya seni	NA	NA	10	27	30	45	150%	70	64,29%

Sumber: Disbudpar Prov. Jambi, 2018

Tabel 3.25 Capaian Indikator Kinerja HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Karya Seni

Pada tahun 2016, HAKI karya seni di Provinsi Jambi baru mencapai 27 HAKI. Jumlah ini meningkat pada tahun 2017 menjadi 45 HAKI atau terjadi penambahan 18 HAKI baru. Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 30 HAKI sehingga persentase capaian mencapai 150% atau termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka sampai dengan tahun 2016 capaian kinerja baru mencapai 64,29% atau termasuk dalam kategori rendah. Walaupun masuk dalam kategori rendah, namun mengingat pelaksanaan sasaran jangka menengah ini baru melewati tahun kedua, maka capaian 64,29% tersebut terbilang sangat baik dan Pemerintah Provinsi Jambi optimis target akhir dapat tercapai bahkan dapat terlampaui. Adapun daftar 18 HAKI karya seni yang dikeluarkan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.25 HAKI Karya Seni Provinsi Jambi Tahun 2017

NO	KARYA CIPTA/INOVASI TEKNOLOGI, SOSIAL BUDAYA	NAMA PENCIPTA (PERORANGAN/KEL/ MASYARAKAT)
1	LAGU/ NTAK KUDO	ANDRI
2	LAGU/ TARI NTAK KUDO	ANDRI
3	TARI/ BATAMPO	EMI LIDIAR
4	TARI/ PERSEMBAHAN	ZURTINI
5	LAGU/ MEMBANGUN NEGERI	R. IRWANSYAH
6	LAGU/ NASEHAT ORANG TUO	RIVIANDY
7	LAGU/ MERANO ATI	R. IRWANSYAH / RIVIANDY
8	LAGU/ NEGERI YANG DIBERKAHI	R. IRWANSYAH
9	LAGU/ JOGET RIUH BUDAYO	S. NASOR HOLILI BARAGBA DAN AINI
10	LAGU/ ZAPIN TANAH PUSAKO	S. NASOR HOLILI BARAGBA

NO	KARYA CIPTA/INOVASI TEKNOLOGI, SOSIAL BUDAYA	NAMA PENCIPTA (PERORANGAN/KEL/ MASYARAKAT)
		DAN HARDIANSYAH
11	NASKAH/ TEMBAK	TITAS SUWANDA
12	NASKAH/ TELUR ITIK	RANDA GUSMORA
13	LAGU/ NEGERI JAMBI TERCINTO	ZURHATMI ISMAIL
14	LAGU/ TARI KAIN	ZURHATMI ISMAIL
15	LAGU/ KELINTANG	ZURHATMI ISMAIL
16	LAGU/ NEGERI SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH	WIRO A. SANIE
17	LAGU/ MELAYU	WIRO A. SANIE
18	LAGU/ IDAK BETANYO	WIRO A. SANIE

Sumber: Disbudpar Prov. Jambi, 2018

Capaian ini merupakan cerminan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan seniman dan penggiat seni di Provinsi Jambi. Selain HAKI, 10 karya budaya tradisi tak benda Jambi ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2017. Kesepuluh karya budaya tak benda tersebut adalah tomboi sialong/ tomboi ngambek rapa, tari kadam, sebelik sumpah, ambung orang rimbo, ubat ramuan orang rimbo, cawot, belangun orang rimbo, tari elang, hompongon, dan musik gambang Dano Lamo.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah:

- Program Pelestarian dan Pengembangan kebudayaan
- Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
- Program pengelolaan keragaman budaya
- Program pengelolaan kekayaan budaya

Permasalahan:

1. Pada dasarnya Provinsi Jambi kaya akan budaya dan seni, namun belum tergalikan secara maksimal. Karya seni dan budaya tersebut masih banyak yang belum didaftarkan untuk mendapatkan HAKI ataupun pengakuan sebagai karya budaya baik secara nasional maupun internasional, sehingga riskan untuk diakui oleh orang atau daerah lain

Solusi:

1. Di tengah arus globalisasi ini, sudah sewajarnya dilakukan pelestarian budaya serta pendaftaran HAKI atas karya seni atau karya budaya sebagai wujud kepedulian dan penghargaan atas karya seseorang atau tradisi suatu daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi

Jambi akan terus menggali dan memfasilitasi pendaftaran HAKI karya seni dan pendaftaran karya budaya untuk mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.

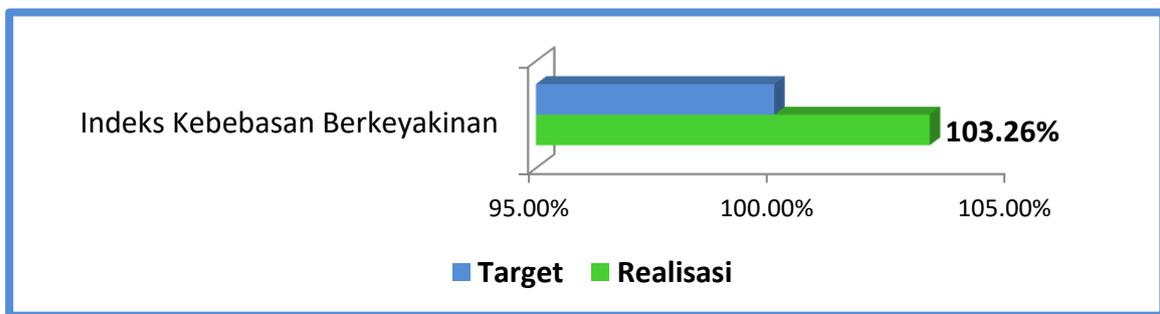


Gambar 3.23 karya budaya tradisi tak tak benda Indonesia Tahun 2017

Sasaran 5.2. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan beberapa langkah preventif melalui pembinaan dan pemantauan orang asing, menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi konflik dan pencegahan terjadinya konflik. Adapun capaian sasaran meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.24 capaian sasaran meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama

5.2.1. Indeks Kebebasan Berkeyakinan

Tabel 3.26 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebebasan Berkeyakinan

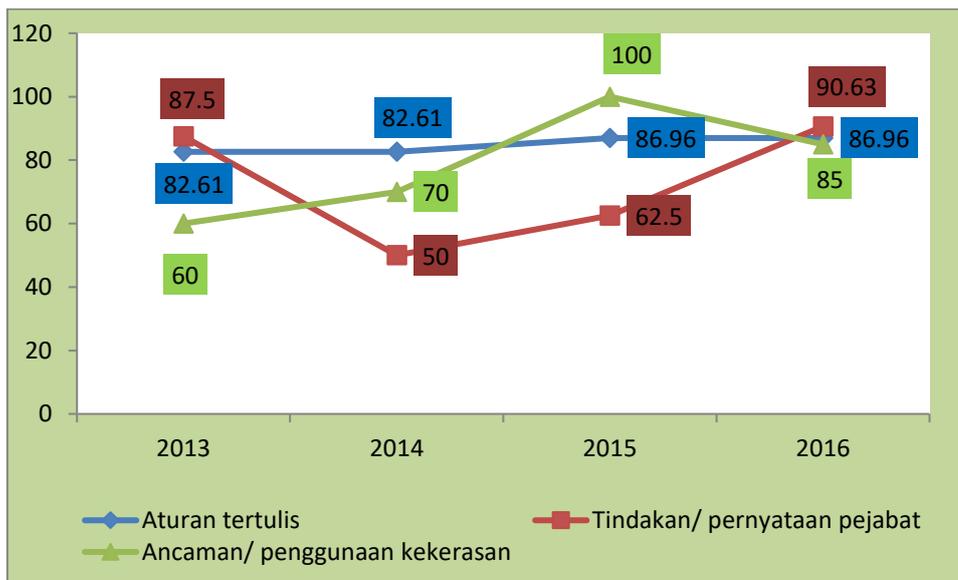
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks kebebasan berkeyakinan	79,11	76,67	76,67	86,61	84,27	87,02*)	103,26%	99,47	87,48%

Sumber: IDI, BRS, 2017

Ket: *) data IDI tahun 2016 yang dirilis September 2017

Indeks kebebasan berkeyakinan dihitung berdasarkan tiga hal, yaitu adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama, tindakan/ pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama, serta ancaman/ penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama. Indeks ini dikeluarkan setiap tahun dalam bentuk indeks komposit dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan data yang dikeluarkan pada tahun tertentu (n) merupakan data kondisi tahun sebelumnya (n-1). Oleh sebab itu, data yang dicantumkan sebagai capaian tahun 2017 merupakan data yang dikeluarkan pada September 2017 dan merupakan kondisi tahun 2016.

Berdasarkan data indeks kebebasan berkeyakinan di atas, terlihat bahwa indeks ini mulai mengalami perbaikan sejak tahun 2015 setelah mengalami penurunan pada tahun 2014. Pada tahun 2017 (kondisi tahun 2016) realisasi indeks kebebasan berkeyakinan Provinsi Jambi terealisasi sebesar 87,02 atau meningkat 0,41 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya, dengan persentase capaian sebesar 103,26% dan masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 maka capaian ini telah masuk dalam kategori tinggi karena sudah mencapai 87,48%.



Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.25 Perkembangan komponen indeks kebebasan berkeyakinan Provinsi Jambi

Indeks kebebasan berkeyakinan dibentuk oleh 3 variabel. Bila dilihat per variabel pembentuk indeks, terlihat bahwa aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya sudah mulai berkurang sejak tahun 2015 dan belum menunjukkan peningkatan pada tahun 2016 sehingga ditunjukkan oleh skor variabel yang stagnan. Skor variabel tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan agamanya

memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan dan menjadi pembentuk indeks dengan skor tertinggi. Skor variabel ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya terkait dengan ajaran agama mengalami penurunan, sehingga harus menjadi perhatian bersama agar tidak terus terjadi dan menjadi pemicu perpecahan antar umat beragama di Provinsi Jambi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan berkeyakinan adalah pengoptimalan peran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), sehingga potensi-potensi konflik terkait keagamaan atau permasalahan terkait SARA dapat segera dipecahkan bersama melalui musyawarah untuk mufakat. Adapun program pendukung pencapaian indikator kinerja adalah **program pengembangan wawasan kebangsaan.**

Permasalahan;

1. Hubungan antar umat beragama merupakan hubungan yang sensitif dan rentan konflik. Isu-isu agama yang banyak beredar saat ini berpotensi menurunkan indeks kebebasan berkeyakinan.

Solusi:

1. Optimalisasi FKUB dan FPK sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan dan memelihara toleransi antar umat beragama

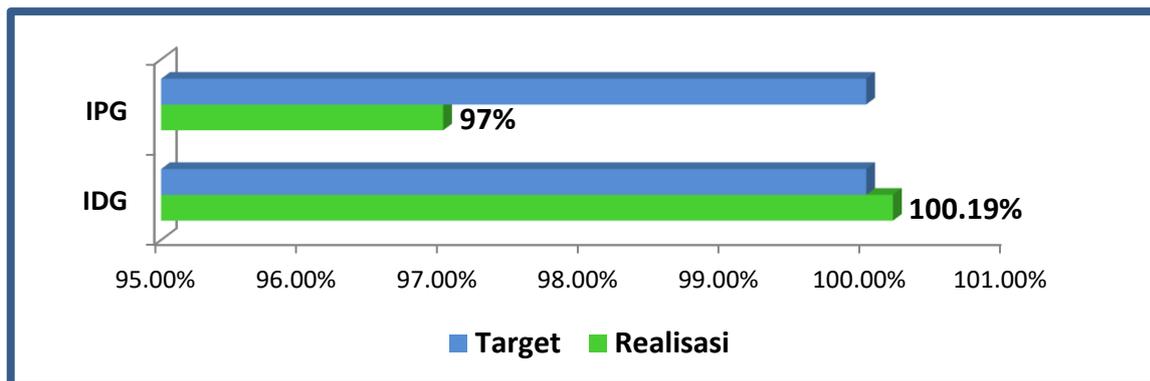
Tujuan 6 Meningkatkan kualitas SDM Perempuan

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Sasaran 6.1. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

Dalam SDGs, isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan dengan target pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap individu khususnya perempuan dan anak; pengakhiran diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berbasis gender; serta kesehatan seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya.

Dalam rangka mendukung target SDGs tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan peningkatan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan sebagai salah satu sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Capaian sasaran ini pada tahun 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.26 Capaian sasaran meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

6.1.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pembangunan manusia berbasis gender merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian dunia karena perempuan seringkali mengalami diskriminasi seperti dijadikan objek eksploitasi, mengalami kekerasan, subordinasi, dan adanya upaya marginalisasi perempuan. Salah satu ukuran pencapaian pembangunan gender adalah Indeks Pembangunan gender (IPG) yang merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin tinggi rasionya

(mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, demikian pula sebaliknya.

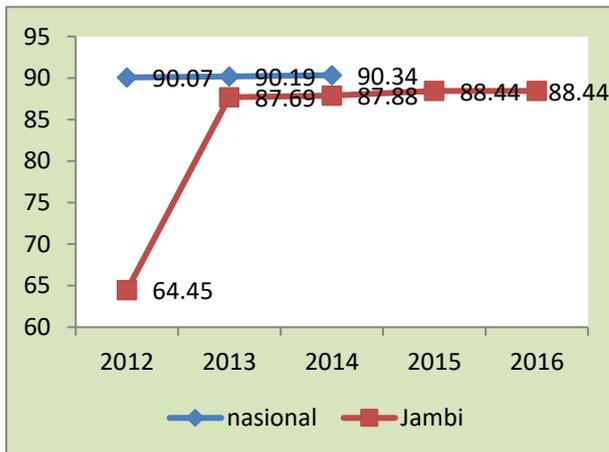
Penghitungan IPG dilakukan setiap tahun dan data yang dikeluarkan pada tahun bersangkutan menggambarkan kondisi tahun sebelumnya. IPG Provinsi Jambi yang dirilis pada tahun 2017 (kondisi Tahun 2016) adalah 88,29 atau masih dibawah target dengan tingkat capaian sebesar 97% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 juga termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 92,93%.

Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,69	87,88	87,88 *)	88,44*)	91,02	88,29*)	97,00%	95,01	92,93%

Sumber: BPS, 2017

*) data tahun n-1



Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.27 IPG Provinsi Jambi dibandingkan dengan IPG Nasional

Capaian IPG Provinsi Jambi ini masih dibawah capaian nasional sebagaimana digambarkan pada gambar di sebelah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang lebih efektif guna mendorong capaian ini lebih baik lagi. Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada tahun 2017 adalah **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak** dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A),

pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan, perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan, Gerakan Sayang Ibu dan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan dan Pembinaan Organisasi Perempuan. Selain itu dukungan program-program lain yang berhubungan dengan peningkatan

kualitas pendidikan dan derajat kesehatan perempuan turut ambil bagian dalam pencapaian IPG di Provinsi Jambi.

Permasalahan:

1. IPG Provinsi Jambi sedikit mengalami penurunan pada tahun 2017 (kondisi 2016) dengan gap yang cukup lebar dan masih di bawah capaian nasional. Salah satu penyebabnya adalah budaya masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua yang masih kental di wilayah-wilayah tertentu.

Solusi:

1. Sosialisasi secara terus menerus kepada seluruh komponen masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender harus terus dilakukan seiring dukungan kebijakan yang tidak memihak salah satu gender .
2. Perluasan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, sehingga pola hidup tradisional yang tidak mendukung kesetaraan gender perlahan dapat berubah.

6.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tabel 3.28 Capaian Kinerja indikator Indeks pemberdayaan gender (IPG)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,19	61,93	61,93*)	62,43*)	63,02	63,14*)	100,19%	67,01	94,22%

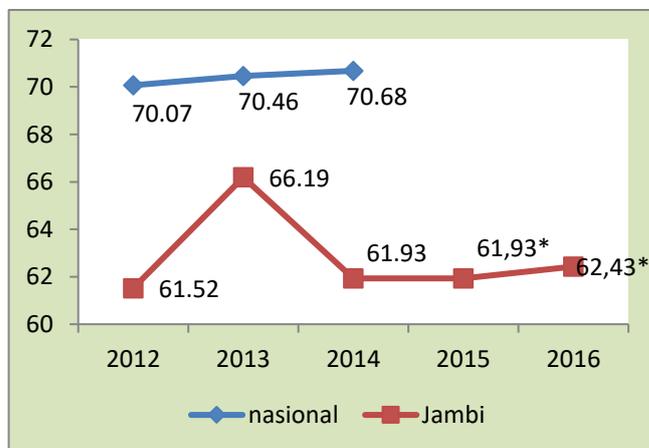
Sumber: BPS, 2017

Ket: *) data n-1

Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dan cenderung menguntungkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai IPG yang lebih rendah dari IPM. Di samping IPG, indikator kesetaraan

gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian.

Sama halnya dengan IPG, penghitungan IDG juga dilakukan setiap tahun dan data yang dikeluarkan pada tahun bersangkutan menggambarkan kondisi tahun sebelumnya. IDG Provinsi Jambi yang dirilis pada tahun 2017 (kondisi Tahun 2016) adalah 63,14 atau melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 100,19% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 juga masuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 94,22%.



Sumber: BPS, 2016

Gambar 3.28 IDG Provinsi Jambi dibandingkan dengan IDG Nasional

Capaian IDG Provinsi Jambi sebagaimana digambarkan pada gambar disamping, masih berada di bawah capaian nasional dengan capaian yang berfluktuatif. Bila digambarkan dalam diagram pengelompokkan capaian IPM dan IDG, maka Provinsi Jambi masuk dalam kuadran 3 yaitu provinsi dengan IPM dan IDG di bawah rata-rata nasional. Dari 3 komponen pembentuk IDG, yaitu keterlibatan perempuan di Parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan; komponen dengan nilai terendah adalah keterlibatan

perempuan di parlemen, disusul oleh komponen sumbangan pendapatan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen di Provinsi Jambi masih jauh dari harapan dan pendapatan perempuan masih jauh di bawah laki-laki.

Sebagai upaya untuk meningkatkan IDG ini maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak** dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Pembinaan Organisasi Perempuan. Program ini secara parsial didukung pula oleh beberapa program lain seperti **program pemberdayaan tenaga kerja, program perwujudan demokrasi makin kokoh** dan lain-lain.

Permasalahan:

1. Capaian IDG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen, rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dan terbatasnya jumlah perempuan sebagai tenaga profesional.

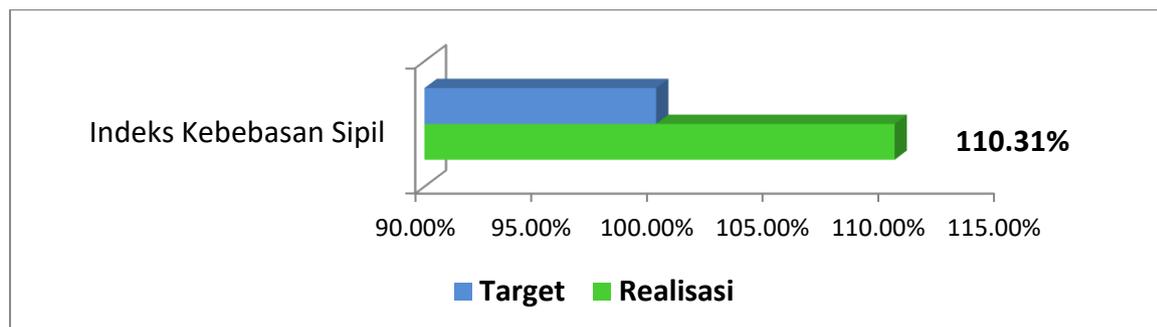
Solusi:

1. Perluasan akses bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia profesional sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.

Tujuan 7 Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

Sasaran 7.1. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum



Gambar 3.29 Capaian sasaran meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum

Situasi yang kondusif adalah prasyarat bagi kelangsungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Untuk itu perlu diciptakan stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini tidak terlepas pula dari suasana politik, sehingga kesadaran politik dan hukum ikut mewarnai stabilitas keamanan suatu wilayah. Capaian sasaran

meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum dapat dilihat pada gambar di atas.

7.1.1. Indeks Kebebasan Sipil

Indeks Kebebasan sipil merupakan indeks komposit dari Indeks Demokrasi Indonesia dan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Sama halnya dengan data-data yang lain yang dikeluarkan oleh BPS, dimana data yang dirilis pada tahun n merupakan data tahun $n-1$, maka capaian tahun 2017 yang dituliskan pada tabel di bawah ini merupakan kondisi tahun 2016.

Tabel 3.29 Capaian Indikator Indeks Kebebasan Sipil

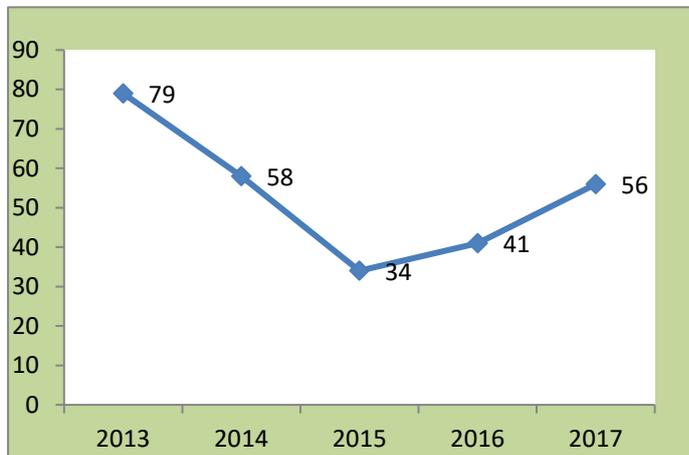
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Indeks Kebebasan sipil	84,95	78,23	75,89	75,89*)	62,01	84,39*)	110,31%	77,9	108,33%

Sumber: BPS, 2017

Ket: *) data tahun $n-1$

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indeks kebebasan sipil di Provinsi Jambi meningkat pada tahun 2017 (kondisi tahun 2016). Peningkatan terjadi hampir pada seluruh variabel, kecuali variabel kebebasan dari diskriminasi yang mengalami penurunan skor sebesar 8,60, yaitu dari 85,57 pada kondisi tahun 2015 menjadi 76,97 pada kondisi tahun 2016 (data tahun 2017). Indikator dengan skor tertinggi berada pada indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat serta indikator tindakan/ pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, yang masing-masing memiliki skor 100. Skor terendah berada pada indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat dengan skor 0. Indikator dengan skor 0 ini merupakan indikator pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, atau dapat disimpulkan bahwa masih sering dijumpai aksi unjuk rasa dengan kekerasan di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat yang pada tahun lalu juga memiliki skor 0, justru mengalami peningkatan yang signifikan menjadi skor tertinggi (100) yang berarti pemerintah telah melakukan perubahan pendekatan dalam menghadapi kebebasan berkumpul dan berserikat dari pendekatan represif

menjadi pendekatan persuasif. Fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan aspek kebebasan sipil tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah pemangku kepentingan di Provinsi Jambi.



Sumber: Satpol PP Prov. Jambi, 2018

Gambar 3.30 Jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi

Bila melihat tren jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi, terlihat bahwa jumlah tersebut sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, namun kembali meningkat pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2016 terjadi 41 kali unjuk rasa dan meningkat menjadi 56 kali unjuk rasa pada tahun 2017. Peningkatan jumlah unjuk rasa damai ini pula yang selanjutnya meningkatkan indeks kebebasan sipil di Provinsi Jambi.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan sipil, diantaranya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta optimalisasi forum Pembauran Kebangsaan. Adapun program yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Permasalahan:

1. Aksi unjuk rasa yang tidak tertib dan cenderung menggunakan kekerasan akan berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Provinsi Jambi. Pada akhirnya hal ini juga akan berdampak pada situasi ekonomi dan sosial di Provinsi Jambi.



Gambar 3.31 Salah satu aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jambi

Solusi:

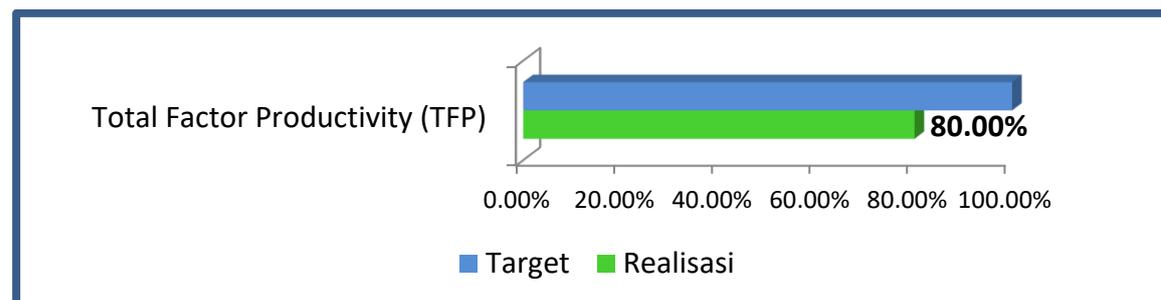
1. Tindak kekerasan dalam hal apapun sudah tidak layak dilakukan pada era demokrasi, untuk itu pendekatan persuasif dan optimalisasi peran Forum komunikasi dan Forum kebangsaan yang ada di Provinsi Jambi harus terus dilakukan.

Tujuan 8 Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi seringkali menjadi penentu kemajuan suatu daerah. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga digunakan sebagai daya saing suatu daerah. Daya saing bukan lagi ditentukan oleh sumber daya alam dimiliki tetapi lebih ditentukan oleh cara suatu daerah berinovasi teknologi untuk mengelola sumber daya alam tersebut.

Sasaran 8.1. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur sejauhmana sentuhan IPTEK dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah *Total Factor Productivity* (TFP). Penggunaan *Total Factor Productivity* (TFP) sebagai sebuah metode untuk mengukur peranan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi cukup beralasan. TFP dinilai oleh para penggunanya sebagai sebuah ukuran produktivitas menyeluruh yang telah mendapat pengakuan dan diterima tidak hanya dalam pembuktian teoretis, melainkan juga dalam praktik pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi. Capaian sasaran meningkatnya TFP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.32 Capaian Sasaran Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)

8.1.1. Total Factor Productivity (TFP)

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Solow, faktor input tenaga kerja dan modal adalah determinan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di luar tenaga kerja dan modal, ada faktor yang sering disebut dengan total factor productivity (TFP) yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain total TFP menjelaskan peranan faktor lain diluar faktor tenaga kerja dan modal.

Di balik konsep TFP ini, sebenarnya yang mau diketahui adalah pengaruh *technological progress* (perkembangan teknologi) seperti penguasaan teknologi produksi, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja, kemampuan penguasaan teknologi dan lain sebagainya terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara empiris jelas tidak mudah untuk mengetahui pengaruh dan peran teknologi ini karena sifatnya yang *embodied* kedalam peran modal dan tenaga kerja itu sendiri. Akan tetapi "pesan" penting berkaitan dengan upaya mendekomposisi peran teknologi dalam proses ini sesungguhnya adalah untuk mengetahui peran *managerial* dalam setiap proses produksi. Dengan demikian, perumusan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas akan lebih mudah.

Tabel 3.30 Capaian Indikator Total Factor Productivity (TFP)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kon disi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Tar-get	Reali-sasi	% capai-an		
Total Factor Productivity (TFP)	NA	NA	NA	-1,45	1,1	0,88	80%	1,5	58,67%

Sumber: Bappeda Prov. Jambi (hasil analisis), 2018

Realisasi indikator TFP Provinsi Jambi pada tahun 2017 adalah sebesar 0,88 atau terealisasi 80% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,1 dan termasuk dalam kategori **tinggi**. Peningkatan nilai TFP Provinsi Jambi Tahun 2017 dibandingkan realisasi tahun 2016 yang negatif secara umum menunjukkan bahwa upaya penguasaan teknologi di Provinsi Jambi mulai meningkat atau dengan kata lain faktor teknologi mulai berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan TFP di Provinsi Jambi pada tahun 2017. Kondisi perekonomian yang mulai membaik dan ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat turut memicu kebutuhan Kemajuan teknologi. Adapun program yang dilaksanakan untuk meningkatkan TFP adalah :

1. Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan.
2. Program Penelitian dan Pengembangan
3. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah

Permasalahan:

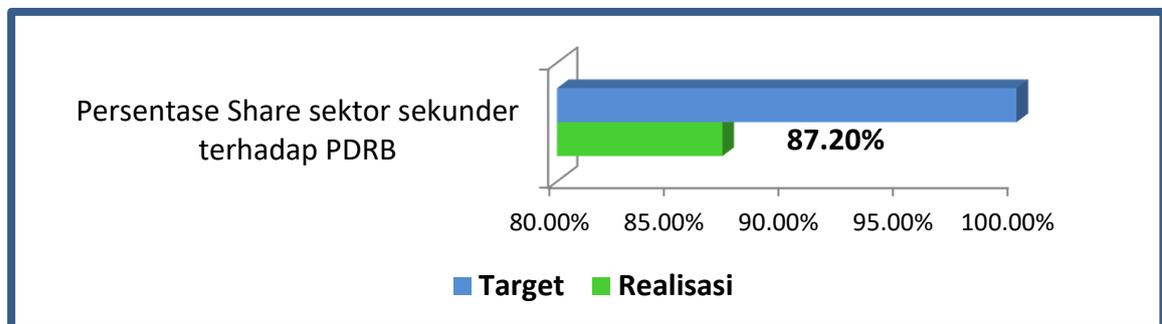
1. Penguasaan teknologi di Provinsi Jambi belum optimal, sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Solusi:

1. Pelaku industri, khususnya industri pengolahan perlu meningkatkan pengembangan dan penelitian untuk melakukan inovasi, adopsi teknologi dan pengembangan teknologi baru, sehingga dapat meningkatkan TFP

Sasaran 8.2. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah

Perubahan struktur ekonomi disebut juga transformasi struktural, yang berarti rangkaian perubahan ekonomi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Capaian sasaran perubahan struktur ekonomi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.33 Capaian sasaran perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah

8.1.1. persentase Share Sektor Sekunder terhadap PDRB

Struktur ekonomi Provinsi Jambi masih ditopang oleh sektor primer. Hal ini bisa dilihat dari share sektor primer terhadap PDRB Provinsi Jambi yang masih merupakan share tertinggi. Bila ingin mewujudkan perubahan struktur ekonomi atau mengurangi share sektor primer dan

mengalihkannya pada sektor sekunder maka indikator yang bisa dijadikan alat ukur adalah besarnya presentase share sektor sekunder terhadap PDRB.

Bila dilihat dari persentase capaian kinerja tahun 2017, persentase realisasi indikator ini masih dalam kategori **tinggi** karena mencapai 87,2%, namun masuk dalam kategori sedang bila dibandingkan dengan target akhir.

Tabel 3.31 Capaian Indikator persentase share sektor sekunder terhadap PDRB

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Tar-get	Reali-sasi	% capai-an		
Persentase share sektor sekunder terhadap PDRB	18,70	18,92	18,38	18,38	20,0	17,44	87,2	24,0	72,67

Sumber: BPS, data diolah, 2018

Berdasarkan data capaian indikator ini, sebagaimana tergambar pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 walaupun dalam angka yang sangat kecil. Pada triwulan IV-2017, sektor industri pengolahan tercatat mengalami kontraksi 0,29% (yoy) dengan andil pertumbuhan -0,03%, dibandingkan triwulan III-2017 yang tumbuh 4,71% (yoy). Terjadinya kontraksi pada industri pengolahan dipengaruhi oleh melemahnya ekspor industri minyak dan lemak, tercermin dari nilai ekspor pada triwulan IV-2017 yang berkontraksi sebesar 69,74% (yoy) menjadi USD31,72 miliar dibandingkan triwulan IV-2016 dengan nilai ekspor USD104,82 miliar. Hal ini sejalan dengan hasil survei industri pengolahan besar dan sedang yang dilakukan BPS Provinsi Jambi, menunjukkan bahwa produksi mengalami kontraksi sebesar 6,54% (yoy) pada kuartal akhir 2017. Penurunan produksi terjadi pada industri makanan serta industri karet, barang dari karet dan plastik. Industri makanan menunjukkan kontraksi sebesar 9,34% (yoy). Industri karet, barang dari karet dan plastik juga mengalami kontraksi sebesar 4,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III-2017 yang berkontraksi sebesar 0,77% (yoy). Sebaliknya produksi industri manufaktur mikro dan kecil justru menunjukkan kenaikan sebesar 18,86% (yoy), meski tidak mampu menahan penurunan industri secara keseluruhan. Indikator pertumbuhan industri pengolahan yang berbahan baku karet mentah juga menunjukkan penurunan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan produksi karet yang turun menjadi 26,26% (yoy) pada triwulan IV-2017, dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 35,27%.

Pada dasarnya upaya untuk menggeser share tertinggi pada PDRB Provinsi Jambi dari sektor primer ke sektor sekunder telah dilakukan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan upaya menumbuhkan sektor industri di Provinsi Jambi dalam jangka panjang, melalui penyediaan

kawasan di Ujung Jabung, penyiapan sarana prasarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, air dan energi. Namun karena upaya ini adalah upaya jangka panjang, maka belum bisa dirasakan dampaknya karena masih dalam tahap pembangunan.

Upaya jangka pendek yang telah dilakukan pada tahun 2017 adalah mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN dan memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan. Upaya-upaya lainnya antara lain:

1. Penyediaan informasi Pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya setempat dengan cara penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan.
2. Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan. Dengan cara mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.
3. Menginisiasi pemanfaatan produk karet alam untuk komponen infrastruktur strategis.

Guna mendukung pencapaian indikator kinerja ini program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
2. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia

Permasalahan:

1. Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB belum sesuai dengan harapan, karena sektor primer belum bergeser dan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jambi. Hal ini terkait dengan belum berkembangnya teknologi di Provinsi dan kurangnya sarana prasarana penunjang industri.

Solusi:

1. Penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh industri sedang serta mendorong penguasaan teknologi di Provinsi Jambi.
2. Dalam hal peningkatan usaha industri kecil, menengah dan besar maka perlu penumbuhan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan sistem pendukung usaha, Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, Pemberdayaan usaha skala mikro

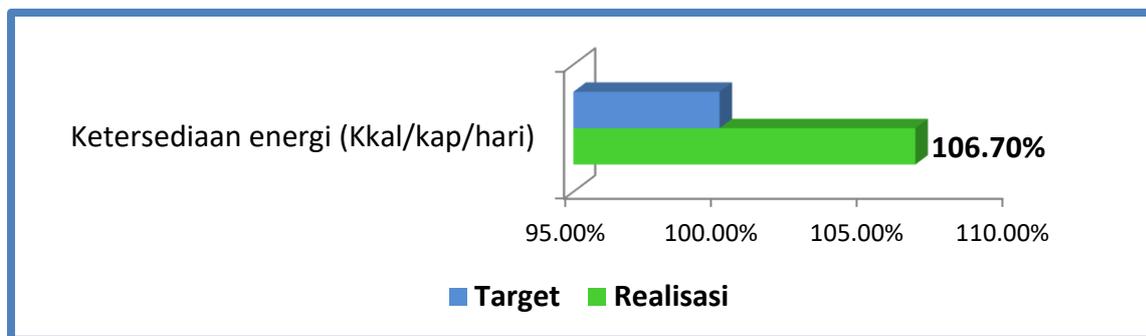
Tujuan 9 Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor andalan Provinsi Jambi sampai saat ini. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Jambi yang selalu menjadi kontributor terbesar. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Provinsi Jambi berasal dari sektor pertanian, namun masalah krusial yang selalu muncul terkait kesejahteraan petani sampai saat ini belum sesuai harapan.

Sasaran 9.1. meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal

Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi, telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tersebut, selama kurun waktu 2013 – 2016 cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi yang tersedia sebesar **90 ton**, dan selama kurun waktu 2013 – 2017 telah digunakan sebanyak **41,737 ton** untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana alam atau dikhawatirkan akan mengalami kerawanan pangan sehingga stok cadangan pangan pemerintah Provinsi Jambi per Oktober 2017 sebesar **48,263 ton**. Pada Tahun 2017 ini telah dilaksanakan penambahan cadangan pangan sebesar **7 ton**, sehingga per 31 Desember 2017 menjadi sebesar **55,263 ton**.

Adapun capaian sasaran meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal di Provinsi Jambi tahun 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.34 Capaian sasaran meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal

9.1.1. Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/hari)

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan

yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Dampak dari upaya perwujudan kemandirian pangan ini dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita.

Tabel 3.32 Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2016

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	Ketersediaan Ideal (Kkal/Kap/Hari)
1.	Padi-Padian	1.720	1.200
2.	Umbi-Umbian	294	144
3.	Pangan Hewani	118	288
4.	Minyak Dan Lemak	704	240
5.	Buah Biji/ Berminyak	209	72
6.	Kacang-Kacangan	74	120
7.	Gula	161	120
8.	Sayuran dan Buah	145	144
9.	Lain-Lain	-	72
	Jumlah	3.425	2.400

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2018 (ATAP 2016)

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi (ATAP 2016), ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 3.425 Kkal/Kap/Hari, hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari, sedangkan perkiraan ketersediaan energi Tahun 2017 sampai saat ini belum dapat ditampilkan dikarenakan data dari dinas lingkup pertanian belum tersedia. Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketersediaan Energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah sementara ketersediaan bahan pangan hewani dan kacang-kacangan masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

Berdasarkan neraca bahan makanan Provinsi Jambi tahun 2017 yang berasal dari angka tetap 2016, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita adalah sebesar sebesar 3.425 Kkal/Kap/Hari dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan sebesar 84,1. Hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari (hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012) dan ketersediaan protein minimal 57 gram/kap/hari, dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 3.210 kkal/ kapita/hari atau terealisasi sebesar 106,7% dan masuk dalam **kategori sangat tinggi**.

Bila dibandingkan dengan target akhir yang ditetapkan sebesar 3.217 kkal/kap/hari maka capaian ini telah mencapai 106,47% atau kategori sangat tinggi.

Tabel 3.33 Capaian indikator ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kon disi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Ketersediaan Energi(Kkal/Kap/hari)	3.186	3.217	3.204	2.854*	3.210	3.425**	106,7	3.217	106,47

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2018

Ket: *Berdasarkan neraca bahan makanan tahun 2016 (Angka tetap 2015)

** Berdasarkan neraca bahan makanan tahun 2017 (Angka tetap 2016)

Tabel 3.34 Data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Provinsi Jambi Tahun 2017 (ATAP 2016)

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kap/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kap/hr	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	302,3	1.268,0	56,6	63,4	0,5	28,3	31,7	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	41,1	41,2	1,8	2,1	0,5	0,9	1,0	2,5	1,0
3	Pangan Hewani	101,5	220,4	9,8	11,0	2,0	19,7	22,0	24,0	22,0
4	Minyak dan Lemak	33,6	371,3	16,6	18,6	0,5	8,3	9,3	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	6,2	62,8	2,8	3,1	0,5	1,4	1,6	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	15,7	48,4	2,2	2,4	2,0	4,3	4,8	10,0	4,8
7	Gula	25,6	113,1	5,1	5,7	0,5	2,5	2,8	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	190,9	90,7	4,1	4,5	5,0	20,3	22,7	30,0	22,7
9	Lain-lain	37,0	23,3	1,0	1,2	-	-	-	-	-
Total			2.239,2	100,0	112,0		85,7	96,0	100,0	84,1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2018

Ketersediaan bahan pangan dari kemampuan produksi daerah dan kebutuhan konsumsi penduduk Tahun 2016 (Angka Tetap) dan Angka Ramalan II Tahun 2017 pada beberapa komoditi strategis bila dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan PPH, secara rinci dapat dilihat pada tabel Ketersediaan Pangan dari Kemampuan Produksi Daerah, seperti yang ditampilkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.35 Kondisi Ketersediaan dari Kemampuan Produksi Tahun 2016 (ATAP) dan Tahun 2017 (ARAM II), Jumlah Konsumsi Penduduk dan Kebutuhan Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Komoditas	2016*)				2017**)			
		Ketersediaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdasarkan PPH		Ketersediaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdasarkan PPH	
				Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi			Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi
1	Beras	430,066	332,749	327,894	293,739	465,142	338,145	333,212	298,502
2	Jagung	71,067	1,038	415	372	132,964	1,055	422	378
3	Kedelai	10,210	18,678	37,279	33,396	11,876	18,981	37,883	33,937
4	K. Tanah	1,083	692	2,095	1,877	1,200	703	2,129	1,907
5	K. Hijau	201	346	-	-	175	352	-	-
6	Ubi Kayu	52,796	21,445	88,565	79,339	62,129	21,793	90,001	80,626
7	Ubi Jalar	41,029	9,685	36,706	32,882	44,369	9,842	37,301	33,416
8	Daging***)								
	Ruminansia	7,223	3,597	3,974	3,560	7,438	2,109	4,039	3,618
	Unggas	21,258	23,867	37,089	44,673	40,019	24,254	45,397	40,668
9	Telur	15,193	22,483	40,013	35,845	15,418	22,848	40,662	36,426
10	Ikan	99,768	35,316	117,575	105,328	55,681	68,894	119,482	107,036

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk tahun 2017 ketersediaan bahan pangan pada beberapa komoditas seperti padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan daging ruminansia serta ikan telah mencukupi. Namun demikian komoditi kedelai, kacang hijau, telur dan daging unggas masih belum terpenuhi. Kebutuhan ikan yang secara konsumsi telah memenuhi kebutuhan namun bila mengacu pada pola pangan harapan ketersediaan ikan masih belum mencukupi. Walaupun beberapa komoditas tersebut belum mencukupi namun bila dibandingkan dengan tahun 2016 maka terlihat peningkatan ketersediaan yang signifikan pada tahun 2017. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan di Provinsi Jambi melalui **Program Peningkatan Ketahanan Pangan** yang dipadukan dengan **Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan Program peningkatan produksi ternak.**

Permasalahan:

1. Ketersediaan komoditas kedelai, kacang hijau, telur dan daging unggas masih belum memenuhi konsumsi penduduk

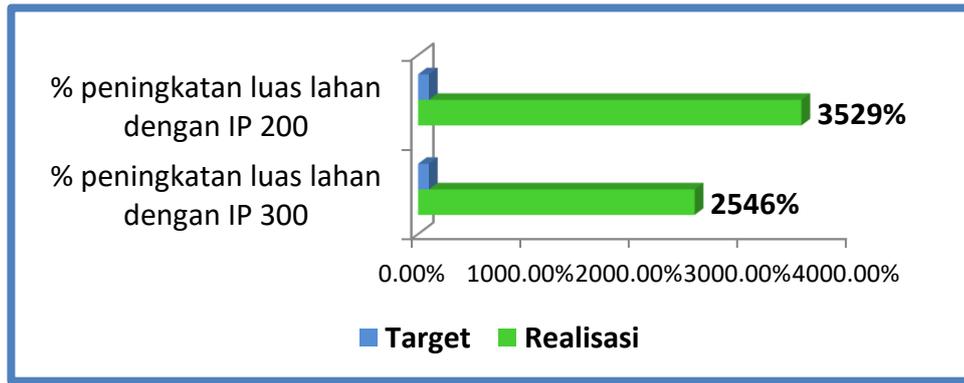
Solusi:

1. Meningkatkan upaya peningkatan produksi pangan dan pengawasan distribusi pangan agar harga di tingkat konsumen tidak melambung tinggi.

Sasaran 9.2. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan

Pertanian secara umum merupakan sektor ekonomi potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. yaitu kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan kontribusi devisa. *Pertama*, kontribusi produk, dimana produk-produk pertanian sangat menentukan pengembangan sektor ekonomi lainnya melalui penyediaan makanan (konsumsi) dan penyediaan bahan baku (keterkaitan produksi) bagi kegiatan industri. Dalam konteks ekonomi makro, sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap PDRB. *Kedua*, kontribusi pasar, yaitu besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan intensitas pembangunan pertanian merupakan sumber pertumbuhan yang penting bagi pasar domestik untuk produk-produk dari industri, termasuk pasar untuk barang produsen (input produksi pertanian) maupun barang konsumsi. *Ketiga*, kontribusi faktor-faktor produksi, dimana sektor pertanian dianggap sebagai sumber modal investasi melalui proses transfer surplus modal dari pertanian ke sektor non pertanian, proses transfer tenaga kerja dari pertanian ke sektor non pertanian, dalam proses pertumbuhan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja pertanian (pedesaan) ke sektor industri dan jasa (perkotaan) karena terjadi perbedaan tingkat produktivitas diantara dua sektor tersebut. *Keempat*, kontribusi devisa yaitu sektor pertanian mampu berperan sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran (devisa), baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau ekspansi produksi komoditas-komoditas pertanian yang menggantikan impor (substitusi impor).

Khusus untuk tanaman pangan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berbenah untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga dijadikan salah satu sasaran daerah. Adapun capaian sasaran persentase peningkatan luas lahan dengan indeks pertanaman Indeks Pertanaman (IP) 200 dan IP 300 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.35 Capaian sasaran meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan

9.2.1. persentase peningkatan luas Lahan dengan IP 200 dan IP 300

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi berkeinginan meningkatkan produksi beras secara berkelanjutan dengan salah satu skenario yang dilaksanakan adalah memperluas areal tanam melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) menjadi IP 200 dan IP 300. Indeks pertanaman (IP) menunjukkan kekerapan pertanaman pada sebidang lahan. Kendala yang sering muncul dalam peningkatan Indeks Pertanaman padi, antara lain, 1) Ketersediaan air sepanjang tahun di beberapa daerah, 2) Serangan hama dan penyakit (akibat dari masa tanam yang berbeda dengan tanaman sekitarnya), 3) Penggunaan benih varietas genjah dengan pilihan varietas terbatas, 4) Teknologi dan alat olah tanah yang terbatas.

Tabel 3.36 Capaian indikator persentase peningkatan luas lahan dengan IP 200 dan IP 300

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Tar-get	Reali-sasi*	% capai-an		
Persentase peningkatan luas lahan dengan IP:									
- IP 200	NA	NA	(35.061Ha)	0	1,2	42,35	3529,02	(37.662Ha)	451,63
- IP 300	NA	NA	(1.400 Ha)	0	1,4	35,64	2545,91	(1.521,79 Ha)	295,70

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Jambi, 2018

Ket: *ATAP 2016, rilis 2017

BPS merilis data luas lahan pertanian baik secara umum maupun lahan dengan IP 200 dan IP 300 pada akhir Semester I Tahun 2017 dan angka tersebut merupakan angka tetap 2016. Data inilah yang dijadikan data capaian tahun 2017 karena merupakan data terakhir yang dirilis oleh BPS. Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi indikator ini telah jauh melebihi target dengan tingkat capaian **sangat tinggi**. Kabupaten yang memiliki luas lahan sawah dengan IP 200 terluas berada di Kabupaten Kerinci, sedangkan Kabupaten yang memiliki luas lahan sawah dengan IP 300 terluas berada di Kabupaten Bungo. Baik luas lahan dengan IP 200 maupun IP 300, jenis sawah dengan luas lahan terbesar adalah pada sawah beririgasi. Hal ini berarti untuk pengembangan indeks pertanaman diperlukan jaringan irigasi yang baik disamping penggunaan teknologi lainnya. Data rinci tentang luas lahan dengan IP 200 dan IP 300 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.37 Luas Lahan sawah dengan Indeks Pertanaman 200

Kabupaten/Kota	Jenis Lahan Sawah dengan IP 200					Jumlah
	irigasi	non irigasi	rawa pasut	rawa lebak	Tadah hujan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(7)
01 Kerinci	12.438,0	1.208,0	0,0	170,0	1.038,0	14.854,0
02 Merangin	3.207,0	1.765,0	0,0	231,0	1.534,0	6.737,0
03 Sarolangun	1.583,0	934,0	0,0	26,0	908,0	3.451,0
04 Batang Hari	22,0	409,6	0,0	235,6	174,0	841,2
05 Muaro Jambi	0,0	155,0	0,0	0,0	155,0	310,0
06 Tanjung Jabung Timur	0,0	3.404,0	3.325,0	30,0	49,0	6.808,0
07 Tanjung Jabung Barat	521,5	1.989,0	1.939,0	0,0	50,0	4.499,5
08 Tebo	780,0	1.628,0	0,0	256,0	1.372,0	4.036,0
09 Bungo	3.529,0	37,0	0,0	0,0	37,0	3.603,0
71 Jambi	0,0	28,0	0,0	0,0	28,0	56,0
72 Sungai Penuh	1.671,0	1.521,0	0,0	267,0	1.254,0	4.713,0
JUMLAH	23.751,5	13.078,6	5.264,0	1.215,6	6.599,0	49.908,7

Sumber: ATAP 2016, BPS, 2017

Tabel 3.38 Luas Lahan sawah dengan Indeks Pertanaman 300

Kabupaten/Kota	Jenis Lahan Sawah dengan IP 300					Jumlah
	irigasi	non irigasi	rawa pasut	rawa lebak	Tadah hujan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(7)
01 Kerinci	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
02 Merangin	193,0	55,0	0,0	0,0	55,0	303,0
03 Sarolangun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 Batang Hari	0,0	63,0	0,0	63,0	0,0	126,0
05 Muaro Jambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 Tanjung Jabung Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 Tanjung Jabung Barat	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
08 Tebo	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	70,0
09 Bungo	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
71 Jambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72 Sungai Penuh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUMLAH	1.593,0	153,0	0,0	63,0	90,0	1.899,0

Sumber: ATAP 2016, BPS, 2017

Peningkatan luas lahan sawah dengan IP 200 dan IP 300 ini diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong produktivitas padi di Provinsi Jambi. Namun pada tahun 2017 justru terjadi sedikit penurunan produktivitas padi dari 45,57 kwtl/ha pada tahun 2016 menjadi 45,42 kwtl/ha pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang mendorong peningkatan produktivitas, tidak hanya luas lahan namun juga bibit yang baik, pupuk dan lain-lain. Sehingga dibutuhkan banyak teknologi baru yang harus digunakan dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jambi kedepan.

Adapun program yang telah dilaksanakan guna mendukung indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
2. Program Peningkatan Produksi pertanian/ perkebunan
3. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Permasalahan:

1. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumberdaya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non

pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya.

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik.

Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan . Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

2. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas
 - Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :
 - Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
 - Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
 - Perlatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.
 - Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai
 - Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.
 - Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD untuk komoditas Kacang Tanah dari Balit Kabi.
 - Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
 - Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
 - Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
 - Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

3. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui . Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT. Disamping itu kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh :

- a. Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.
 - Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi, kabupaten ataupun dari instansi terkait tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.
 - Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsln (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.
- b. Masih Kurangnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan
 - Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :
 - Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
 - Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
 - Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).
 - Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

Solusi:

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan dengan melakukan akselerasi peningkatan produksi dan Sekolah lapang Pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) padi, jagung, kedele, perbanyak benih sumber, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, dan kegiatan pembinaan perlindungan OPT.
2. Perbaiki infrastruktur pertanian (optimalisasi pemanfaatan lahan, Pembuatan Tata Air Mikro, rehab Jaringan Irigasi Pertanian serta cetak sawah), Pembinaan dan pengembangan Kedelai dan Jagung.

3. Menyediakan Benih yang Bermutu dari varietas Unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan benih yang bermutu menggunakan produksi benih yang dihasilkan oleh penangkar-penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura serta pengembangan jaringan sistem perbenihan Padi.
4. Meningkatkan Penggunaan/Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan melakukan penangkaran benih di tingkat petani, pengembangan sistem produksi dan distribusi benih, perbanyak benih sumber padi varietas unggul lokal.
5. Menumbuhkembangkan Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu dengan mengoptimalkan Operasional BBI Hortikultura, Operasional BBI Palawija, Operasional BBI Padi, perbanyak benih pokok dan benih sebar, Perbanyak benih palawija, Operasional Bbi Alai Ilir, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS, Perbanyak benih palawija BS – FS dan FS – SS, jagung kedele dan kacang tanah, Perbanyak benih palawija Alai Ilir.
6. Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Maju Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan membuat demplot, pengujian dan demonstrasi yang dilaksanakan untuk memotivasi petani dalam melakukan usaha tani dengan teknologi maju.
7. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan secara selektif dengan melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal pertanian dengan mencetakan sawah yang didanai oleh Pemerintah maupun swadana petani, optimalisasi lahan terlantar/ tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani. Pencegahan alih fungsi lahan di Jambi dilakukan dengan penerbitan PERGUB No 14 tahun 2009, sedangkan di tingkat nasional telah dilakukan pula melalui UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Daerah juga merevitalisasi fungsi lahan pasang surut yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani tanaman pangan dengan kegiatan *renovasi lahan sulfat masam* dan memanfaatkan potensi Lahan Rawa lebak yang ada. Peningkatan kesuburan Lahan juga harus terus dilakukan melalui pemanfaatan Pupuk jerami dan dijadikan Trichokompos. Khusus untuk lahan – lahan Balai Benih Induk disamping penggunaan trichokompos, juga diberikan Pupuk kandang dan Pengapuran.
8. Untuk mencukupi ketersediaan air, di kabupaten dilakukan rehab – rehab Jaringan Irigasi Teknis dan rehab Jaringan Irigasi Non Teknis yang dananya berasal dari APBN. Sedangkan untuk Balai benih Induk dibuatkan Pompa air.
9. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru (terutama penggunaan benih Unggul). Hal ini dilakukan mengingat produktivitas tanaman pangan saat ini dimasing masing lokasi berbeda – beda, sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan sumber air yang tersedia. cenderung stagnan. Pertumbuhan produktivitas padi rata – rata di Jambi (ARAM II 2016) relatif lebih tinggi dibandingkan rata – rata di provinsi di Sumatera dan rata- rata di Tingkat Nasional. Hal ini karena selama ini produktivitas yang dihasilkan masih rendah jika dibandingkan dengan potensi produktivitas benih yang dipergunakan. Dari segi potensi Provinsi Jambi, Produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Potensi tersebut tercermin dari senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produktivitas telah dilakukan penggunaan benih unggul varietas baru, meskipun belum semua petani

mempergunakannya. Untuk daerah – daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, khususnya mempergunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat.

10. Keterbatasan modal petani untuk membeli saprodi dilakukan dengan memberikan bantuan Benih , dan saprodi lainnya secara selektif. Namun demikian petani diupayakan menggunakan pupuk alami dengan menggunakan trchokompos dan pengendalian OPT dengan Herbisida alami pula yang tersedia disekitar tempat tinggal.
11. Sosialisasi tentang pentingnya penggunaan benih unggul bermutu terus dilakukan, agar ketersediaan benih secara 6 tepat bisa terpenuhi, diantaranya mengupayakan kegiatan penangkaran benih di setiap kecamatan dan Kabupaten atau di sentra produksi. Meningkatkan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi petani dalam mewujudkan efisiensi biaya produksi dan meningkatkan produksi pertanian melalui SLPHT, penerapan PHT dan penggunaan bahan saprodi / pengendali OPT yang sifatnya ramah lingkungan, efisiensi dan efektif seperti penggunaan kompos jerami (*Trichokompos*) sebagai sumber pupuk serta penggunaan agen hayati / biopestisida dalam pengendalian OPT.
12. Mendorong Sinergitas Antar Subsistem Agribisnis. Keberhasilan pengembangan sistem dan usaha agribisnis tanaman pangan sangat tergantung pada keterpaduan secara utuh antar subsistem (sarana prasarana, on farm, pengolahan dan pemasaran hasil, serta penunjuang). Integrasi antara sub sistem agribisnis tersebut harus dimulai dan dievaluasi termasuk dalam aspek pembiayaan. Disamping itu untuk menjadikan usaha produksi sebagai pendapatan yang handal, sub sistem produksi harus dilakukan dengan skala ekonomis dengan menerapkan teknologi maju dan dikelola secara profesional.
13. Mempercepat transfer teknologi dan tepat sasaran melalui bantuan benih varietas unggul baru yang diikuti dengan sistem Sekolah lapang , baik dalam pengelolaan pertanaman maupun dalam penanganan pasca panen. Untuk varietas yang belum beradaptasi dilaksanakan uji varietas di beberapa lokasi, sehingga benih yang disebarkan ke petani adalah yang sudah mengalami uji adaptasi dan cocok dikembangkan di daerah Jambi.
14. Mendorong Pola Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder. Petani yang telah pernah mendapat bantuan dan berhasil dalam usahatani didorong untuk mengembalikan modal yang diterimanya kelompok dan dijadikan sebagai modal kelompok. Khusus untuk penangkar benih difasilitasi menjalin kerjasama dengan stakeholder, sehingga benih yang dihasilkan dapat dipasarkan dan terjual dengan harga yang layak.
15. Pemberdayaan petani dan masyarakat. Prioritas pembangunan diarahkan pada pemberdayaan petani dan masyarakat sehingga mereka mampu mengelola dan mengembangkan usahatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu kapasitas aparat pertanian di daerah masih belum memadai untuk dapat mendorong dan mengkoordinasi pembangunan pertanian. Untuk itu diperlukan upaya – upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pendidikan/pelatihan dan pemanfaatan pola dan manajemen pembangunan. Pola pembangunan yang ditetapkan selama ini yang masih diwarnai pendekatan pemberian yang bersifat cuma – cuma sudah mulai dikurangi. Pembangunan saat ini sudah diarahkan dengan pendekatan program dengan melibatkan peran aktif dan sharing dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang seluas – luasnya. Bantuan alsintan sudah mulai dalam bentuk Bantuan Uang muka Alsintan

(BUMA), dimana petani atau kelompok tani harus menyiapkan dulu dana tambahan pembelian alat, baru dana dari pemerintah diberikan ke kelompok tersebut.

16. Kelembagaan pangan dan agribisnis guna menopang pemberdayaan petani, seperti kelembagaan produksi khususnya kelompok tani, Kelembagaan irigasi khususnya Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A), Kelembagaan lumbung pangan desa

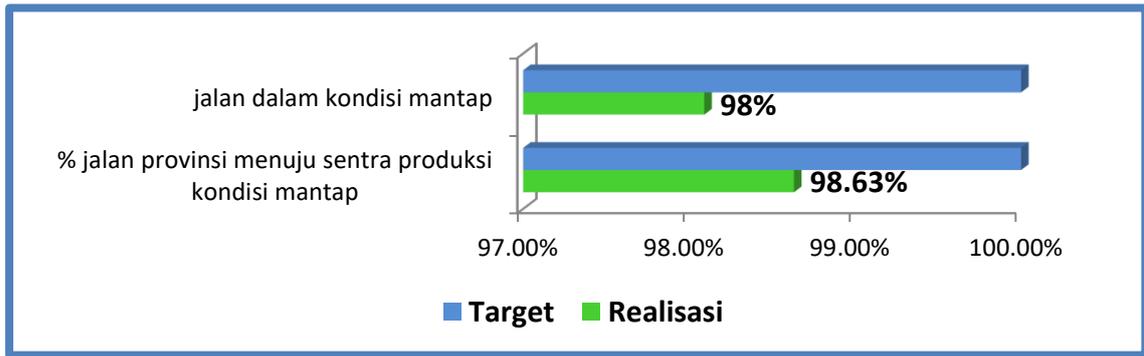
Tujuan 10 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendukung daya saing. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu daerah. Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta merupakan aspek penting peningkatan produktivitas sektor produksi.

Sasaran 10.1. Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian

Infrastruktur transportasi dalam fungsinya sebagai fasilitas publik memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yaitu: (1) mendorong pemerataan pembangunan, (2) melayani kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, (3) memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa; dan (4) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Dalam kaitannya dengan sektor antara, infrastruktur transportasi menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi, merupakan prasarana penghubung antar daerah dan memudahkan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang antar daerah.

Capaian sasaran akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian di Provinsi Jambi tahun 2017, dapat dilihat pada capaian indikator sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 3.36 Capaian Sasaran akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian

10.1.1. Persentase Jalan Provinsi menuju Sentra Produksi Kondisi Mantap

Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral. Apabila tidak mampu dilaksanakan berakibat pada aktifitas barang dan orang akan terhambat. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan SK.Gub.No.567/Kep.Gub/DPU/2012 tanggal 04 Oktober 2012 adalah 1.504,93 Km. Kemudian, dengan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1129,906 km. Beberapa ruas Jalan provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra produksi dengan total sepanjang 855,589 km.

Tabel 3.39 Capaian indikator Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	NA	NA	73,51	73,955	75,67	74,223	98,09	80,0	92,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2018

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas, Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Capaian indikator persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap pada tahun 2017 adalah sebesar 74,223% atau 635,047 km dari total panjang jalan menuju sentra produksi sepanjang 855,589 km. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2017 sebesar 75,67%, maka persentase capaian ini mencapai 98,09% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Demikian pula bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini telah mencapai 92,78% atau sangat tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan capaian indikator ini, diantaranya meningkatkan dan memelihara kualitas jalan-jalan menuju sentra produksi yang diiringi dengan pengawasan yang baik. Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah **Program Pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan**.

Permasalahan:

1. Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.

Solusi:

1. Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.
2. Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.

10.1.2. Jalan dalam Kondisi Mantap

Dalam rangka mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2017 difokuskan pada pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Sampai dengan 31 Desember 2017 jalan dalam kondisi mantap adalah sepanjang 865,197 km dari total panjang jalan kewenangan Provinsi Jambi sepanjang 1129,906 km atau mencapai 76,573% dengan rincian jalan kondisi baik sepanjang 444,245 km dan kondisi sedang 420,952 km. Sedangkan panjang jalan kewenangan provinsi yang dalam kondisi rusak sepanjang 264,708 km, dengan rincian jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 174,487 km dan kondisi rusak berat sepanjang 90,221 km.

Tabel 3.40 Capaian indikator jalan dalam kondisi mantap

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Jalan dalam kondisi mantap	74,11	74,82	75,56	76,074	77,64	76,573	98,63	82,52	92,79

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2018

Persentase capaian hasil yang dicapai terhadap upaya peningkatan kondisi jalan dalam kondisi Mantap tahun 2017 adalah 99,86% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021 maka capaian sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 92,79% atau kategori sangat tinggi.

Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan **Program Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan** dengan kegiatan – kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan berikut:

1. Pembangunan Jalan wilayah I Kab.Tanjab Barat
 - Jalan Sei. Saren-Teluk Nilau-Senyerang-Bts.Riau (eff.10.0 km)
 - Jalan Senyerang-Sei. Rambai-Tebing Tinggi (eff.3.00 km)
2. Pembangunan Jalan wilayah II Kab.Tanjab Timur
 - Jalan Ma. Sabak/Dermaga Ds. Rantau Rasau (eff.2.0 km)
 - Jalan Akses Pelabuhan Nipah Panjang (eff.1.00 km)
 - Jalan Ds. Rantau rasau Ds.Simpang (eff.2.50 km)
 - Pembangunan jalan Ds.Simpang-Ujung jabung (eff.2.00 km)
3. Peningkatan Jalan diwilayah III (Kab.Muaro Jambi)
 - Peningkatan struktur jalan Sp.Pudak-Suak kandis(eff.2.15 km)
 - Jalan Simpang Ahok-Simp. Pasar-Bumi Perkemahan Pramuka (eff.1.0 km)
4. Peningkatan Jalan diwilayah IV (Kab.Bungo)
 - Jalan Ma.Bungo-Peninjaun-Junction (eff.1.50 km)
 - Jalan Rantau Ikil-Bts. Sumbar (eff.1.00 km)
 - Jalan Peninjaun-Lubuk Mengkuang-TKA (Bts. Sumbar) (eff.1.50 km)

- *Jalan Lingkar Luar Muaro Bungo (Akses Bandara Muaro Bungo) (eff.0.70 km)*
5. Peningkatan Jalan diwilayah IX (Kab.Tebo) terealisasi 100% pada ruas
- *Jalan Simp.logpon-Padang lamo-Tanjung (eff.8.50 km)*
 - *Jalan simp.sawmil-simp.logpon (eff.7.80 km)*
 - *Jalan Simp.Betung bedarah-Pintas-Btd.Kab.Tebo/Kab.Bungo (eff.2.2km)*
6. Pembangunan Jembatan di Kab.Tanjab barat dan Tanjab timur
- *Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan Makmur (50 M)*
 - *Pembangunan Box Culvert di Ds. Lambur II (10 M)*
 - *Pembangunan Jembatan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan Ds Rantau Rasau (9 M)*
7. Peningkatan Jalan diwilayah VIII (Kab.Sarolangun)
- *Jalan Sp. Pelawan-Sei Salak (2.50 Km)*
 - *Jalan Sei Salak-Pkn Gedang/btg. Asai (2.0 Km)*
 - *Jalan Pkn Gedang – Ma.Talang (1,5km)*
 - *Jalan Pauh-Air Hitam – Bts. Kab. Sarolangun / Kab. Merangin (2.0 Km)*
 - *Jalan Pauh – Lubuk Napal – Sipitun – Bts Sumsel (1.0Km)*
8. Peningkatan Jalan diwilayah VI (Kab.Merangin) terealisasi 99.68% pada ruas
- *Penanganan longsor Jl.Sp.Pl.Rengas-Ma.siau-Dsn.Tuo-Jangkat*
 - *Jalan Simp.Rengas-Ma.Siau-Dsn.Tuo-Jangkat (eff.2.0 km)*
 - *Jalan Simp.Talang Kawo-Simp. Pulau Rengas Ulu (eff.2.25km)*
 - *Jalan Simp. Kodim-Simp. Talang Kawo (eff.1.25 Km)*
 - *Jalan Simp Margoyoso – Sumber Agung- Bts. Kab Merangin/Kab Sarolangun (2.00 Km)*
 - *Jalan Air Hitam-Simp Jelatang (1.80 Km)*
9. Peningkatan Jalan diwilayah V (Kab.Batanghari dan Ma.Jambi)
- *Peningkatan Struktur jalan Tempino-Ma.Bulian (eff.2.0 km)*
 - *Jalan Simp.Panerokan-Sei.Bahar (eff.4.00Km)*
10. Peningkatan Jalan diwilayah VII (Kab.Kerinci)
- *Jalan Sangg Agung – Jujun – Lempur (3.00 Km)*
 - *Jalan Jujun – Sei Penuh (4.00 Km)*
 - *Pembangunan Jalan Kelok Sago – Lembur/Sangg.Agung (8.00 Km)*
11. Peningkatan Jalan diwilayah III (Kab. Muaro Jambi)

- Peningkatan Struktur Jalan Sp. Pudak – Suak Kandis (Eff 2.15 Km)
 - Jalan Simp. Ahok – Simp. Pasar – Bumi Perkemahan Pramuka (Eff 1.0 Km)
12. Peningkatan Jalan dengan sumber DAK
- *Jalan Sei-Duren – Sei Buluh (DAK) (Eff 3.00 Km)*
 - *Jalan Ma. Tebo – Sp. Logpon (DAK) (Eff 9.00 Km)*
 - *Jalan Sp. Lagan – Sp Pelabi/zona Lima (DAK) (Eff 2.50 Km)*
13. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan diwilayah Perkotaan
- *Jalan Pattimura – Jl. Bakkaruddin (Eff 0.85 Km)*
 - *Pemb. Jalan Akses Bandara Sultan Thaha Jambi (Eff 1.50 Km)*
 - *Jalan H. Adam Malik – Jl. Abdul Rahman Saleh (Eff 1.80 Km)*
 - *Jalan Diponegoro-Jln. KH. Hasim Ashari (Eff 1.70 Km)*
 - *Jalan Slamet Riyadi – Urip Sumoharjo Jl. Yusup Singadekane – Jl. RE Martadinata (2.50 Km)*
 - *Jalan Bagan Pete (0.80 Km)*
 - *Rutin Jalan Wilayah Perkotaan Jambi*
 - *Pembangunan Box Culvert di Ruas Jalan Sentot Albasa (15 M)*
 - *Penanganan Longsoran Jalan di Jl.Slamet Riyadi (15 M)*
14. Pembangunan Jembatan di Kab. Merangin dan Kerinci
- *Pemb. Jembatan Desa Jelatang (Eff 135’ M)*
 - *Pembangunan Jembatan Tembesi, Ds Rantau Sull (Eff 30’ M)*
 - *Pembangunan Jembatan Kelok Sago (Eff 150’ M) (Bangunan Bawah)*

- *Pembangunan Jembatan Gantung di Dusun Baru Pemenang (Eff 120' M)*

15. Rehab/Pemeliharaan Jembatan di Provinsi Jambi

- *Rehab Jembatan Sei. Hitam*
- *Rehab Jembatan Sei. Kapungo*
- *Rehab Jembatan Sei. Bemban*
- *Rehab Jembatan Sei. Samsewo*
- *Rehab Jembatan Sei. Bungo*
- *Rehab Jembatan Sei. Telepang I*
- *Rehab Jembatan Tengkujung*
- *Rehab Jembatan Bano*
- *Rehab Jembatan Telepang II*
- *Rehab Jembatan Bulian*
- *Rehab Jembatan Kasau II*
- *Rehab Jembatan Sei. Besar*
- *Rehab Jembatan Sei. Alai I*
- *Rehab Jembatan Sei. Pandan I*
- *Rehab Jembatan Sei. Bedah I*
- *Rehab Jembatan Sei. Kenderang*
- *Rehab Jembatan Sei. Dusun Baru*
- *Rehab Jembatan Sei. Aur*
- *Rehab Jembatan Sei. Ranau*
- *Rehab Jembatan Sei. Telentam Besar*
- *Rehab Jembatan Sei. Tanah Berkali*
- *Rehab Jembatan Sei. Telentam Kecil*
- *Rehab Jembatan Sei. Arang*
- *Rehab Jembatan Sei. Semagai*
- *Rehab Jembatan Sei. Jantayo*
- *Rehab Jembatan Sei. Panual*
- *Rehab Jembatan Sei. Suak Saung*
- *Rehab Jembatan Sei. Suak Pintasan Mendung*
- *Rehab Jembatan Sei. Kumpe Suak Kandis*
- *Rehab Jembatan Sei. Meranti*
- *Rehab Jembatan Sei. Pauh Agung*

- Rehab Jembatan Sei. Batang Tebo Pandak
- Rehab Jembatan Sei. Tanjung Bungo
- Rehab Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi Jambi

Permasalahan:

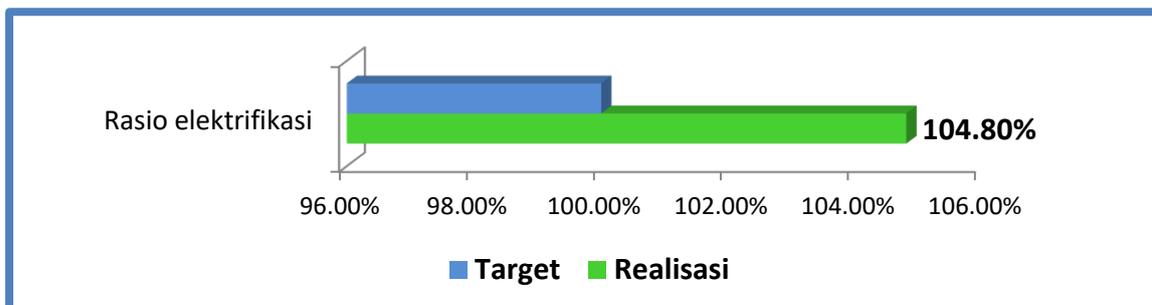
1. Peningkatan kondisi jalan baru mampu sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun

Solusi:

- 1 Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.

Sasaran 10.2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik

Pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi listrik. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Jambi maka kebutuhan akan energi listrik juga turut meningkat. Tenaga listrik juga menjadi kebutuhan pokok dalam hal industrialisasi, sehingga suatu wilayah yang energi listriknya tidak bisa bersaing sudah dapat dipastikan industrinya juga tidak dapat bersaing. Sebagai suatu daerah yang sedang mengarahkan perubahan sektor unggulan dari sektor primer ke sektor sekunder, Provinsi Jambi menjadikan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan. Adapun capaian sasaran ini pada tahun 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.37 Capaian Sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik

10.2.1. Rasio Elektrifikasi

Listrik sangat berguna untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti untuk penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga.

Kondisi kelistrikan di Provinsi Jambi saat ini salah satunya dapat dilihat pada Rasio Desa Berlistrik (RD) di Provinsi Jambi, dimana sampai Bulan Oktober Tahun 2017 rasio desa berlistrik mencapai 91,88 % dari total desa 1564 desa. Jumlah desa belum teraliri listrik sebanyak 127 desa di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Desa-desa berlistrik bersumber dari listrik PLN maupun Non PLN.

Tabel 3.41 Rasio Desa Berlistrik per Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Rasio Desa Berlistrik (%)
1	Kota Jambi	100
2	Muaro Jambi	99,35
3	Batang Hari	99,19
4	Tanjung Jabung Timur	86,02
5	Tanjung Jabung Barat	74,63
6	Sarolangun	85,44
7	Bungo	97,39
8	Merangin	82,33
9	Tebo	90,43
10	Kerinci	99,30
11	Kota Sungai Penuh	100
TOTAL		91,88

Sumber: Dinas ESDM, 2018

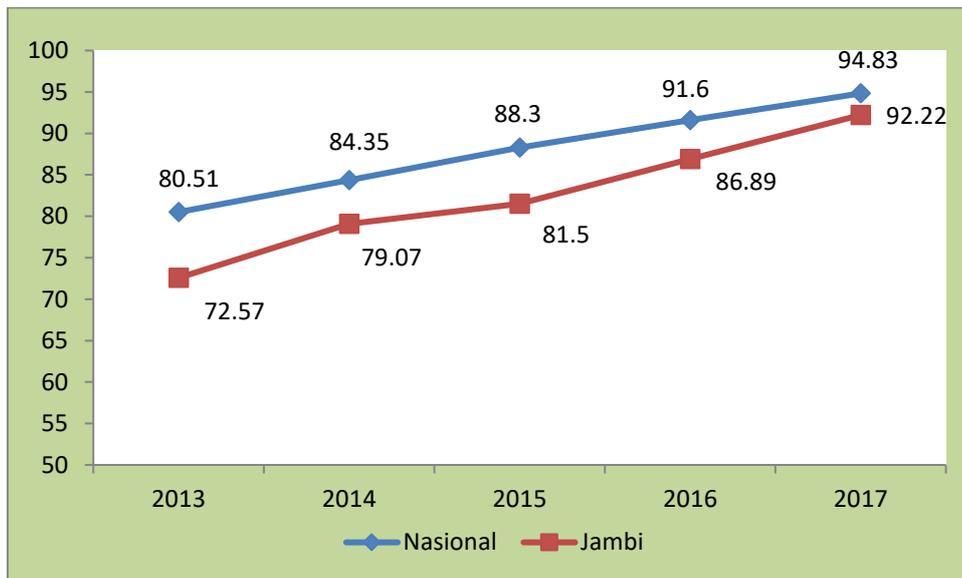
Secara umum capaian indikator rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.42 Capaian Indikator Rasio elektrifikasi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017			
					Target	Realisasi		
Rasio Elektrifikasi	72,57	79,07	81,5	86,89	88	92,22	104,8	96,06

Sumber: Dinas ESDM, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017, capaian indikator rasio elektrifikasi terealisasi sebesar 92,22. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 88 atau terealisasi sebesar 104,8% dengan kriteria **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021, maka capaian ini telah mencapai 96,06% dan masih dalam kategori sangat tinggi.



Sumber: Dinas ESDM dan Kementerian ESDM, 2018

Gambar 3.38 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional



Gambar 3.39 Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) Pembangunan PLTMH di Jambi

Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Jambi selalu berada di bawah nasional, demikian pula pada tahun 2017 ini dimana Provinsi Jambi belum mampu melebihi rasio elektrifikasi nasional yang juga terus meningkat diatas rasio elektrifikasi Provinsi Jambi. Namun demikian terlihat peningkatan capaian yang cukup baik bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang lalu. Berbagai upaya telah

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi ini, terutama guna memenuhi kebutuhan listrik di wilayah perdesaan dengan akses yang sulit namun memiliki potensi untuk pengembangan energi baru terbarukan. Penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi merupakan suatu keniscayaan mengingat hingga saat ini kapasitas terpasang di Provinsi Jambi masih pada 359,5 MW, sementara proyeksi kebutuhan daya sebesar 656 MW.

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jambi telah menandatangani Letter of Intent (LoI) bersama dengan United Nations Development Programme (UNDP) untuk pembangunan empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di empat desa di Provinsi Jambi. Empat Desa yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTMH tersebut adalah Desa Muara Pemuat dan Desa Lubuk Banggar di Kabupaten Sarolangun, serta Desa Jangkat dan Rantau Kermas di Kabupaten Merangin yang merupakan desa-desa yang belum tersentuh listrik. Bila pembangunan dan rehabilitasi PLTMH ini terealisasi maka diperkirakan akan memberikan akses listrik kepada 937 rumah atau 6.454 jiwa di empat desa tersebut.

Tabel 3.43 Kapasitas Pembangkit yang ada di Provinsi Jambi

No	Nama Pembangkit	Jenis	Jenis Bahan Bakar	Pemilik	Kapasitas Terpasang (MW)	DMN (MW)
I	Sektor Jambi				334,5	334,5
1	PLTD Payo Selincah #1	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
2	PLTD Payo Selincah #2	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
3	PLTD Payo Selincah #3	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
4	PLTD Payo Selincah #4	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
5	PLTD Payo Selincah #5	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
6	PLTD Payo Selincah #6	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
7	PLTD Payo Selincah #7	PLTD	HSD	PLN	5,2	5,2
8	PLTG Batang Hari #1	PLTG	Gas	PLN	30	30

No	Nama Pembangkit	Jenis	Jenis Bahan Bakar	Pemilik	Kapasitas Terpasang (MW)	DMN (MW)
9	PLTG Batang Hari #2	PLTG	Gas	PLN	30	30
10	PLTG Batang Hari #3 (sewa)	PLTG	Gas	PLN	18	18
11	PLTG BOT Payo Selincah #1	PLTG	Gas	PLN	50	50
12	PLTG BOT Payo Selincah #2	PLTG	Gas	PLN	50	50
13	PLTG Sungai Gelam (CNG)	PLTG	Gas	PLN	90	90
14	PLTMG Sewa #1	PLTG	Gas	sewa	30	30
II	IPP/Lain-lain				25	22
1	PLTMG Sungai Gelam (sewa wilayah S2JB)	PLTMG	Gas	sewa	15	12
2	PLTU Bio Masa (Jambi)	PLTU	Biomass	PLN	10	10
TOTAL					359,5	356,5

Sumber: Dinas ESDM, 2018

Tabel 3.44 Proyeksi neraca daya Provinsi Jambi

Uraian	Sat	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kebutuhan											
- Rumah Tangga	GWh	673	726	785	841	897	954	963	971	980	988
- Bisnis	GWh	634	736	851	980	1.126	1.288	1.466	1.663	1.880	2.119
- Publik	GWh	77	83	89	95	103	111	120	130	141	154
- Industri	GWh	110	118	127	137	148	159	170	183	197	212
Total Kebutuhan	GWh	1.494	1.665	1.851	2.053	2.274	2.512	2.720	2.948	3.198	3.472
Pertumbuhan	%	12	11,5	11,1	10,9	10,8	10,4	8,3	8,4	8,5	8,6
- Losses (T&D)	%	13,4	13,3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,8	12,7	12,6
- Pemakaian Sendiri	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Total Losses Pemakaian Sendiri	%	18,4	18,3	18,2	18,1	18	17,9	17,8	17,8	17,7	17,6
Faktor Beban	%	47,8	47,9	48	48,1	48,2	48,3	48,4	48,5	48,6	48,7
Produksi	GWh	1.830	2.039	2.263	2.507	2.774	3.060	3.310	3.584	3.885	4.213
Beban Puncak	MW	437	486	538	593	657	723	781	843	912	987

Uraian	Sat	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reserve Margin	%	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Kebutuhan Daya	MW	590	656	729	803	887	976	1.054	1.139	1.231	1.333
Kapasitas Existing (2014)	MW	373	369	365	362	358	354	351	347	344	340
Kebutuhan Tambahan Daya (kumulatif)	MW	217	287	361	441	529	624	706	795	892	998
Kebutuhan Tambahan Daya Tahunan	MW	217	69	74	80	87	95	82	89	97	106
Kapasitas Tahun Berjalan (rencana)	MW	590	656	726	803	887	976	1.054	1.139	1.231	1.333

Sumber: Dinas ESDM, 2018

Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi ini adalah **Program Pengembangan Energi**, dengan kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (TM, TR, Trafo)
 Pada tahun 2017 pembangunan jaringan dilakukan di 3 Kabupaten yaitu :
 - Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Desa Parit 2 Kel. Tanjung Solok Kec. Kuala Jambi dengan panjang jaringan 1.25 kms, dan PONPES Desa Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang sepanjang 0,75 kms.
 - Kab. Muaro Jambi RT 09 Desa Rengas Bandung Kec. Jaluko sepanjang 1,5 kms.
 - Kab. Merangin di belakang SMA 6 Kota Bangko sepanjang jaringan 0,7 kms.

Permasalahan:

1. Provinsi Jambi masih memiliki 127 Desa yang belum berlistrik
2. Rasio elektrifikasi masih di bawah rata-rata nasional.

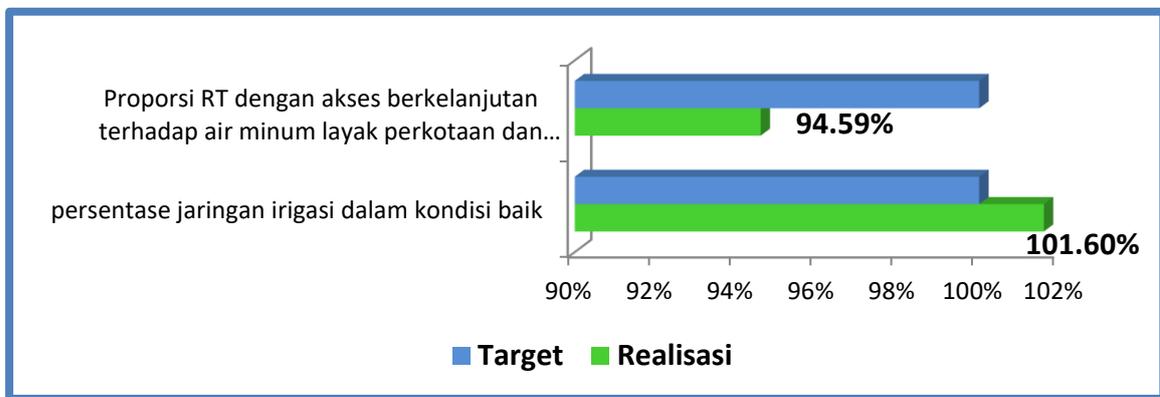
Solusi:

1. Memanfaatkan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif di Provinsi Jambi untuk listrik perdesaan dan sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi Provinsi Jambi

Sasaran 10.3. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030. Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah.

Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah irigasi yang baik. Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi adalah DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.40 Capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi

10.3.1. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

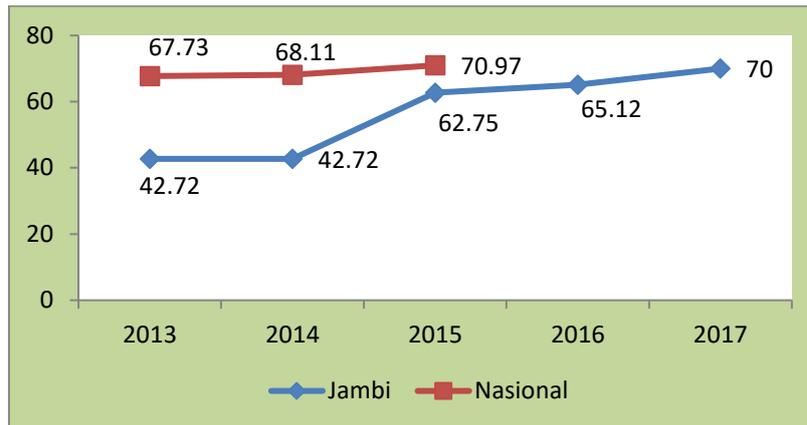
Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudah-mudahan akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Tabel 3.45 Capaian Indikator Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kon disi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Tar-get	Reali-sasi	% capai-an		
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	42,72	42,72	62,75	65,12	74	70	94,59	95	73,68

Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2018

Berdasarkan data di atas, terlihat perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Provinsi Jambi pada tahun 2017 adalah sebesar 70%. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 74 atau hanya terealisasi sebesar 94,59 % dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021, maka capaian ini baru memenuhi 73,68% dari target akhir.



Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2018

Gambar 3.41 Perbandingan capaian proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di Provinsi Jambi dengan nasional

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah:

1. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya.

Permasalahan:

- 1 Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

Solusi:

- 1 Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing

10.3.2. persentase jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi hingga tahun 2017 adalah DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha.

Tabel 3.46 Capaian Indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	55,78	62,69	66,35	74,3	75	76,2	101,6	95	80,21

Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari target sebesar 75% pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi mampu mencapai 76,2% atau tercapai 101,6% dengan kriteria **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021 maka capaian ini masuk dalam kriteria tinggi dengan capaian sebesar 80,21%.

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik atau fungsional memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada Provinsi Jambi yang mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan fungsional lahan pertanian. Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian. Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama antar instansi yang terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian.

Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan dibidang irigasi. Sepanjang tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan **program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan air lainnya ini dilaksanakan kegiatan pendukungnya yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, dengan capaian pelaksanaan kegiatan 4.480 Ha. Adapun fokus kegiatan adalah penanganan rehabilitasi saluran primer; saluran sekunder; jalan inspeksi; bangunan pelengkap; bendung; dan lantai saluran; serta pintu air. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dinilai efektif karena dapat meningkatkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan menurunkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi rusak secara signifikan. Adapun capaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik per daerah irigasi kewenangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah. Berdasarkan tabel dibawah terlihat bahwa DI yang paling fungsional adalah DI Sungai Suban dimana 98% dari seluruh areal telah dialiri oleh jaringan irigasi yang baik. Sedangkan DI Sungai Limun Singkut masih memerlukan upaya pembangunan dan fungsionalisasi jaringan irigasi karena sampai dengan tahun 2016 persentase areal DI yang fungsional baru mencapai 40%.

Tabel 3.47 capaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik per Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Jambi

No	DI Potensial Berdasarkan kewenangan Provinsi (berdasarkan Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 Tanggal 21 April 2015)		% Kondisi jaringan irigasi kondisi baik Tahun 2017 (ha)
	Nama Daerah Irigasi	Luas (ha)	
1.	DI.Sungai Batang Uleh	2.043	57,76
2.	DI.Sungai Tanduk	1.265	74,19
3.	DI.Sungai Suban	1.121	96,67
4.	DI.Sungai Limun Singkut	1.600	76,13
Provinsi		6.029	76,2

Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, 2018

Permasalahan:

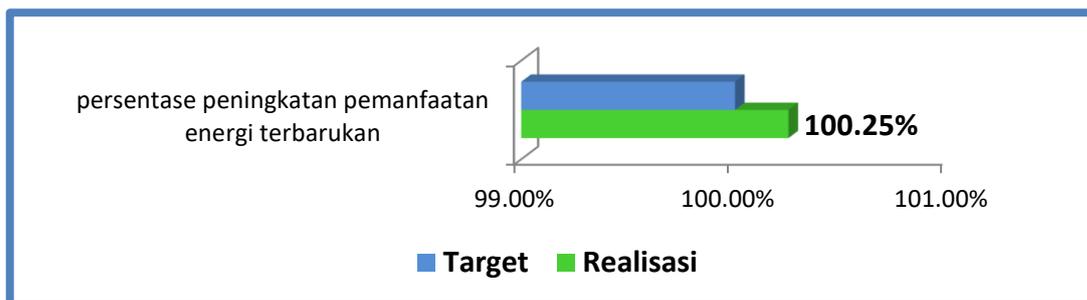
1. Capaian persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik tidak merata pada seluruh Daerah Irigasi kewenangan Provinsi, diman terlihat kesenjangan yang cukup besar antara kondisi DI Sungai Suban dan Di Sungai Limun Singkut.

Solusi:

1. Upaya peningkatan kondisi jaringan harus dilaksanakan merata pada seluruh Daerah Irigasi, mengingat pada keempat lokasi Daerah Irigasi tersebut merupakan lumbung padi Provinsi Jambi dan bila produktivitasnya terganggu maka akan mengganggu ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

Tujuan 11 Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan

Sasaran 11.1. Meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan



Gambar 3.42 Capaian sasaran meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan

11.1.1. persentase Peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

Provinsi Jambi memiliki cukup banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk menutupi kekurangan energi di Provinsi Jambi. Untuk Sumber energi, salah satu sumber energi terbarukan (*renewable resources*) yang terdapat di Provinsi Jambi adalah panas bumi (*geothermal*). Data-data lokasi potensi *geothermal* di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.48 Potensi Geothermal Provinsi Jambi

No	Lokasi	Resources (Mwe)			Reserves (Mwe)	
		Speculative	Hypotetic	Predicted	Possible	Proven
1	Gunung Kapur, Kerinci	25	-	-	-	-
2	Gunung Kaca, Kerinci	25	-	-	-	-
3	Sungai Betung, Kerinci	100	-	-	-	-
4	Semurup, Kerinci	-	-	208	-	-
5	Lempur, Kerinci	-	-	150	15	40
6	Air Dikit, Merangin	25	-	-	-	-
7	Graha Nyabu, Merangin	-	185	-	-	-
8	Sungai Tenang, Merangin	-	74	-	-	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018

Potensi sumber energi lainnya adalah air terjun, yang berlokasi di beberapa kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi. Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.49 Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
1	MERANGIN	1. Air Terjun Sungai Sigerincing Desa Muara Siau Kec. Muara Siau	
		2. Air Terjun Tuah Rajo Sungai Tembesi Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	
		3. Air Terjun Telentam Desa Telentam Kec. Tabir Barat	
		4. Air Terjun Telun Tujuh Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang	3,8 MW
		5. PLTA Langkup Danau Pauh, Sungai Lungkup, Kec. Jangkat	
		6. Desa Renah Pellaan Kec. Jangkat	200 KW
		7. Desa Tiaro Kec. Muara Siau	50 KW
		8. Desa Sepantai Renah	
		9. Desa Terapung Air Liki	
		10. Desa Terapung Air Liki Baru	
		11. Desa Terapung Ngaol Ilir	
		12. Desa Tanjung Beringin	
2	TEBO	13. Desa Semambu Kec. Sumay	
3	KERINCI	14. Desa Air Bahan I Kec. Gunung	13 KW

NO	KABUPATEN	LOKASI	KET
		Kerinci	
		15. Desa Air Bahan II Kec. Gunung Kerinci	180 KW
		16. Desa Kuning Kec. Siulak Deras	70 KW
		17. Desa Simpang Narso Kec. Batang Asai	7,8 KW
4	SAROLANGUN	18. Desa Simpang Narso Kecil	
		19. Desa Padang Jering	
		20. Desa Pulau Langsung	
		21. Dusun Tanjung Bungo Kec. Limbur Lubuk Mengkuang	10 KW
5	BUNGO	22. Dusun Laman Panjang Dusun Aur Cino Kec. Bathin III	19 KW
		23. Desa Sungai Talang Kec. Bathin III Ulu	12 KW
		24. Air Terjun Telun Tirau Dusun Baru Pelepat Dusun Batu Kerbau Kec. Pelepat	32,6 KW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018

Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada dua tabel berikut ini.

Tabel 3.50 Data Potensi Energi Potensial Air di Kabupaten Kerinci

NO	NAMA AIR TERJUN	KETINGGIAN AIR TERJUN	ENERGI YANG DIHASILKAN	LEBAR AIR TERJUN	LEBAR SUNGAI	KETINGGIAN DPL	JARAK DARI KOTA
1	BATU NAMORA	50 M	5 – 6,2 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	50 KM
2	BEDENG IV	25 M	1,6 – 2 MW	4 – 5 M	5 – 6 M	700 – 1000	45 KM
3	SELUANG BERSISIK	50 M	2 – 3,2 MW	7 – 8 M	7 – 7,6 M	1000 – 1200	40 KM
4	TALANG KEMULUN	23 M	1,5 – 2 MW	5 – 6 M	5 – 7 M	600 – 1000	18 KM
5	PANCURAN ARO	75 M	6 – 8,3 MW	8 – 9,5 M	6 – 9 M	800 – 2000	15 KM
6	SUNGAI MEDANG	25 M	2 – 3 MW	5 – 6,5 M	6 – 9 M	500 – 870	10 KM
7	PANCURAN TUJUH	30 M	4,5 – 6,3 MW	7 M	6 – 7 M	800 – 1700	30 KM
8	TELUN BERASAP	75-90 M	7 – 8,3 MW	5 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	60 KM
9	BUKIT TAPAN	60 M	3,5 MW	5 – 7 M	5 – 7 M	1200 – 2000	18 KM
10	GUNUNG TUJUH	80 M	15 MW	6 – 7 M	6 – 7 M	1200 – 2000	65 KM

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018

Sedangkan pemenuhan kebutuhan listrik pada wilayah yang terisolir dan tidak terjangkau dengan jaringan listrik PLN serta tidak memiliki potensi air terjun, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan *system Solar Home System* (SHS) dan biogas yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi.

Tabel 3.51 Capaian indikator persentase peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Tar-get	Reali-sasi	% capai-an		
Persentase peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	NA	NA	NA	100,25 %	8%	8,02%	100,25	20%	40,10

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2017, maka realisasi indikator persentase peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan adalah 8,02%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 8% atau terealisasi sebesar 100,25% atau masuk dalam **kategori sangat tinggi**. Capaian ini bila dibandingkan dengan target akhir maka baru mencapai 40,1% atau sangat rendah sehingga memerlukan beberapa terobosan baru agar capaian akhir dapat diwujudkan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini adalah **Program pengembangan Energi**, dengan potensi energi yang telah dimanfaatkan pada tahun 2017 adalah air terjun, matahari dan biogas.

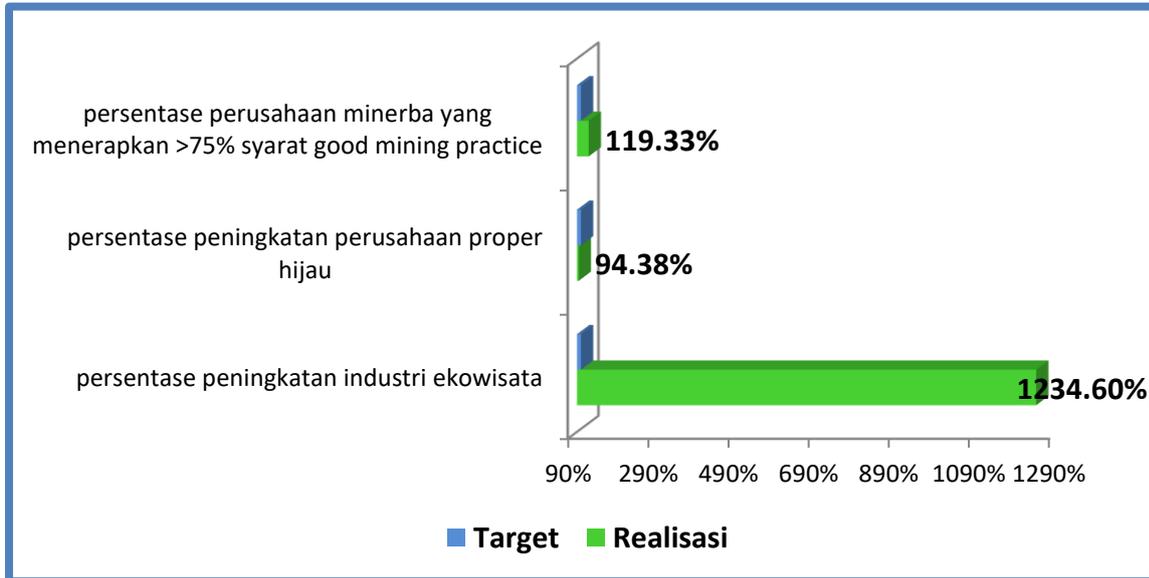
Permasalahan:

1. Beberapa potensi energi alternatif seperti kotoran sapi, POME, Biji jarak, tenaga surya, angin, panas bumi dan potensi air terjun belum termanfaatkan secara maksimal

Solusi:

1. Terus menggali potensi energi baru terbarukan di Provinsi Jambi dan mengembangkannya menjadi energi listrik sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Jambi dan meningkatkan rasio elektrifikasi

Sasaran 11.2. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal



Gambar 3.43 Capaian sasaran meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberikan dampak ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal

Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi merasa berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan. Keinginan luhur tersebut dijawabntahkan dalam salah satu sasaran jangka menengah daerah, yaitu “meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberikan dampak ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal”. Capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada gambar di atas.

11.2.1. Persentase perusahaan Minerba yang menerapkan >75% syarat *good mining practice*

Di era globalisasi dan reformasi saat ini, beberapa perubahan tuntutan sudah menjadi kewajiban kita dalam melaksanakan aktivitas pembangunan. Salah satu tuntutan yang wajib diperhatikan dalam melaksanakan aktivitas/ kegiatan di dunia pertambangan, yaitu pelaksanaan aktivitas pertambangan secara baik dan benar (*good mining practice*). Hal ini dianggap penting karena permasalahan umum tambang di Indonesia adalah kerusakan lingkungan akibat pengelola tambang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi.

Good mining practice adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dan berlandaskan pada efektivitas dan efisiensi, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa ciri *good mining practice* antara lain:

1. Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan
2. Kepedulian terhadap K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) terutama bagi pekerjanya
3. Menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar
4. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku
5. Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktifitasnya
6. Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasi dan konversi pemanfaatan mineral
7. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang
8. Memberikan benefit yang memadai bagi investor

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki cukup banyak kekayaan sumberdaya alam ESDM. Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara yang telah diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar pengusahaan pertambangan yang ada merupakan pertambangan batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan bijih besi, emas dan kuarsa.

Kondisi bulan Desember Tahun 2017 Kegiatan Usaha Pertambangan Komoditi Logam dan Batuan di Provinsi Jambi sebanyak 159 IUP, 29 dalam tahap Ekplorasi dan 130 dalam tahap Operasi Produksi. Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi juga terdapat 3 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Produksi Batubara di Provinsi Jambi dihasilkan oleh Kabupaten Bungo, Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Batanghari dan Muaro Jambi. Sedangkan untuk Bijih Besi di Provinsi Jambi di Produksi oleh PT. Sitasa Energi dan PT. Putra Sarko Mining yang terletak di Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. PKP2B adalah suatu perjanjian antara pemerintah RI dengan perusahaan swasta asing

atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusaha batubara dengan berpedoman kepada UU No. 1/1967 tentang PMA serta UU No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Tabel 3.52 Data PKP2B di Provinsi Jambi

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHAP KEGIATAN	BAHAN GALIAN	LOKASI
1	PT. KARYA BUMI BARATAMA	EKSPLORASI	BATUBARA	SAROLANGUN
2	PT. SARWA SEMBADA KARYA BUMI	EKSPLORASI	BATUBARA	SAROLANGUN DAN BATANGHARI
3	PT. INTIRTA PRIMA SAKTI	EKSPLORASI	BATUBARA	SAROLANGUN DAN BATANGHARI

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018

Tabel 3.53 Capaian indikator persentase perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat *good mining practice*

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Tar-get	Reali-sasi	% capai-an		
Persentase perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat <i>good mining practice</i>	NA	NA	NA	15%	15%	17,9%	119,33 %	75%	28,37%

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018

Sebelum tahun 2016 data tentang indikator ini tidak dapat diakses, dan sejak dijadikan sebagai indikator kinerja, pemerintah Provinsi Jambi mulai tahun 2016 mulai melakukan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minerba dengan lebih intens dengan melaksanakan **program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan**. Dari target sebesar 15% perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat *good mining practice*, Pemerintah Provinsi Jambi telah merealisasikan sebesar 17,9%, yang artinya terealisasi sebesar 119,33% atau berkinerja **sangat tinggi**. Namun bila dibandingkan dengan target capaian akhir, maka kondisi ini baru memenuhi 28,37% dari target akhir tersebut atau masuk dalam kategori sangat rendah.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa salah satu ciri *good mining practice* adalah Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan minerba adalah pembayaran *landrent* dan *royalti*.

Ketentuan mengenai pembayaran landrent dan royalti diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Landrent dan royalti dibayar ke Pemerintah Pusat melalui KPPN dalam bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang selanjutnya dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil, yang disalurkan sesuai dengan bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Pertambangan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.54 Realisasi PNBP bidang pertambangan tahun 2013-2017

TAHUN	LANDRENT (Rp)	ROYALTI (Rp)	TOTAL (Rp)
2013	7.375.299.644	65.339.135.029	72.714.434.673
2014	10.262.610.504	50.761.328.971	61.023.939.475
2015	9.041.731.904	82.134.879.018	91.176.610.922
2016	7.537.973.231	55.493703.105	63.031.676.336
2017*	6.707.404.673	140.425.365.418	147.132.770.091

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018

Ket: *per Oktober 2017

Tabel 3.55 Jumlah Produksi Batubara dan Bijih Besi

Tahun	Batubara (Ton)	Bijih Besi (Ton)
2013	7.737.549	148.657
2014	7.797.961	30.003
2015	6.091.553	-
2016	5.573.672	-
2017*	3.065.114	-

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2018

Ket: *per triwulan II 2017

Tabel di atas memperlihatkan peningkatan PNBP dari sektor pertambangan di Provinsi Jambi yang cukup signifikan walaupun jumlah produksi menurun. Hal ini seiring dengan perbaikan harga komoditi dunia, sehingga penurunan produksi tidak berpengaruh negatif terhadap PNBP dari sektor pertambangan.

Permasalahan:

Pembinaan dan pengawasan belum menyentuh seluruh Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara

Solusi:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia bidang pertambangan mineral dan batubara
3. Meningkatkan sarana dan prasarana, terutama laboratorium pengujian mineral dan batubara

11.2.1. Persentase Perusahaan Proper Hijau

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) merupakan salah satu upaya untuk mendorong penerapan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Berbagai kegiatan yang diarahkan untuk penataan perusahaan ini adalah: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*). Hasil penilaian diberikan dengan kriteria emas, hijau, biru, merah dan hitam. Hingga saat ini, belum ada perusahaan di Provinsi yang mendapatkan proper emas.

Tabel 3.56 Capaian indikator persentase perusahaan proper hijau

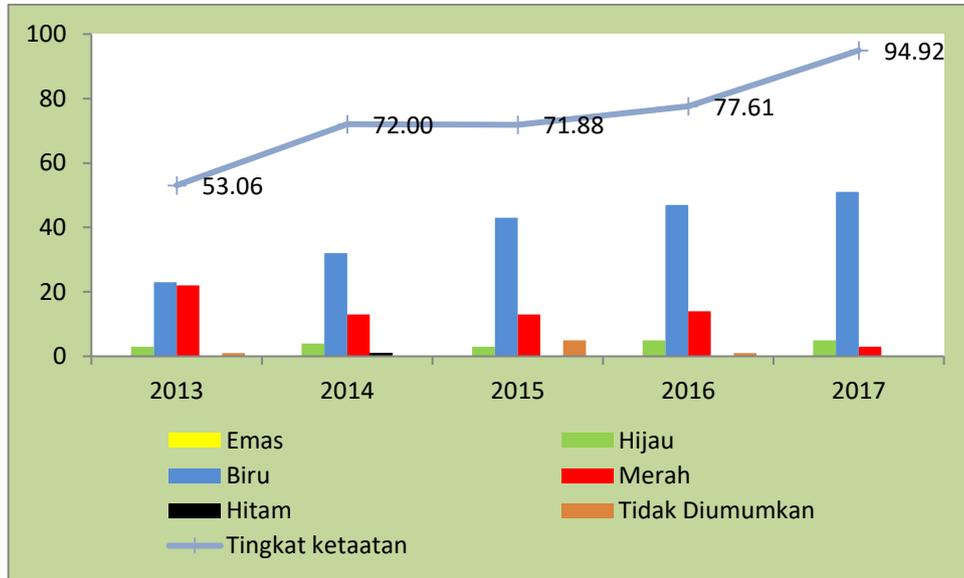
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2016				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase perusahaan Proper Hijau	6,12	8,0	5,77	7,46	8,9	8,4	94,38	15	56,0

Sumber: Dinas LH, 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa perusahaan yang mendapatkan proper hijau berfluktuasi sepanjang tahun 2013-2017 dan menunjukkan peningkatan pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 realisasi indikator ini adalah sebesar 8,4%, belum memenuhi target yang telah ditetapkan atau terealisasi sebesar 94,38% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Namun bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini baru mencapai 56,0 % atau kategori rendah.

Dalam rangka Proper di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan dalam melakukan peningkatan kualitas lingkungan dan

ketaatannya terhadap peraturan - peraturan yang berlaku dengan melaksanakan **program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**. Gambar di bawah ini memperlihatkan bahwa tingkat ketaatan berfluktuasi, namun memperlihatkan kecenderungan perbaikan atau peningkatan sejak tahun 2013 dan mencapai 94,92% pada tahun 2017.



Sumber: Dinas LH, 2018

Gambar 3.44 Tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan Hasil Proper Tahun 2013-2017

Tabel 3.57 Daftar Perusahaan dengan Proper Hijau Tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Kabupaten
1	Petrochina International Jabung Ltd (Gas)	Migas EP	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2	PT. Dasa Anugrah Sejati-PMKS Tanah Raja	Sawit	Kabupaten Batanghari
3	PT. Inti Indosawit Subur I-Muara Bulian	Sawit	Kabupaten Batang Hari
4	PT. Kresna Duta Agro Indo-PKS Pelakar	Sawit	Kabupaten Sarolangun
5	PT. Pertamina EP Asset 1-Field Jambi	Migas EP	Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi

Sumber: Dinas LH, 2018

Pada tahun 2014 masih ditemukan 1 perusahaan dengan proper hitam, namun berkat pembinaan yang terus menerus maka sejak tahun 2015 tidak ditemukan lagi perusahaan dengan

proper hitam tersebut. Demikian pula perusahaan dengan proper merah, jumlahnya terus diturunkan dari 22 perusahaan pada tahun 2013 hingga hanya tinggal 3 perusahaan pada tahun 2017. Upaya pembinaan melalui Proper ini harus terus ditingkatkan setiap tahunnya hingga terdapat perusahaan dengan Proper emas di Provinsi Jambi, karena sampai dengan tahun 2017 belum terdapat perusahaan dengan perolehan proper emas. Adapun nama-nama perusahaan dengan proper hijau dapat dilihat pada tabel di atas.

Permasalahan:

1. Tingkat kesadaran perusahaan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan belum tinggi sehingga menyebabkan hasil penilaian baik bagi suatu perusahaan pada tahun $n-1$ tidak menjamin hasil penilaian pada tahun n tetap baik atau meningkat.

Solusi:

1. Insentif bagi perusahaan yang taat dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan perundang-undangan harus diterapkan dengan jelas, dan bila memungkinkan pencabutan izin sementara bagi perusahaan yang telah melanggar berkali-kali.

11.2.3. Persentase peningkatan Industri Ekowisata

Istilah “ekowisata” dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, dimana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Ekowisata juga dianggap sejenis usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.



Gambar 3.45 Salah satu dari empat danau yang berada pada desa Wisata Lekuk 50 Tumbi Lempur yaitu Danau Lingkat

Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam, flora dan fauna yang tidak kalah dari daerah lainnya, dimana terdapat 4 taman nasional yang memiliki ciri khas masing-masing dan dapat dikembangkan untuk mendukung ekowisata. Salah satu bentuk pengejawantahan ekowisata berbasis masyarakat adalah dengan membentuk desa wisata, dimana pada desa wisata ini akan berkembang institusi masyarakat lokal, homestay sebagai sistem akomodasi, edukasi

dan konservasi. Bila pada tahun 2016, terdapat dua desa yang telah ditetapkan sebagai desa wisata di Provinsi Jambi, yaitu Desa Wisata Lekuk 50 Tumbi Lempur dan Desa Wisata Muaro Jambi, maka pada tahun 2017 telah terjadi penambahan hingga jumlah Desa wisata menjadi 4 Desa, yaitu Desa Wisata Lekuk 50 Tumbi Lempur, Desa Wisata Muaro Jambi, Desa Wisata Air Jernih Jaya dan Desa Wisata Muara Madras.



Gambar 3.46 Candi Muaro Jambi yang berada di kawasan Desa Wisata Muaro Jambi

Pertambahan jumlah desa wisata ini berdampak pada capaian persentase peningkatan industri ekowisata di Provinsi Jambi pada tahun 2017 sebanyak 100% dari target sebesar 8,1%. Besarnya realisasi ini berkorelasi pada persentase capaian sehingga masuk dalam kategori **sangat tinggi** bahkan terhadap target akhir.

Tabel 3.58 Capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan Industri Ekowisata

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase peningkatan industri ekowisata	NA	NA	7%	25,8%	8,1%	100%	1234,6	10%	1000

Sumber: Disbudpar, 2018



Gambar 3.47 Danau Kaco, salah satu destinasi wisata yang terintegrasi dengan Desa Wisata Lekuk 50 Tumbi Lempur

Sampai tahun 2017 terdapat 4 jenis industri ekowisata yang dikembangkan pada desa wisata – desa wisata yang telah ditetapkan, yaitu industri kerajinan, homestay, seni budaya dan kuliner. Keempat jenis industri ini cukup berkembang walaupun perlu dorongan lebih besar lagi agar lebih optimal. Oleh karena itu kedepan dibutuhkan pendampingan yang lebih baik dan lebih intensif untuk kedua desa tersebut untuk memanfaatkan potensi yang mereka miliki, hingga pada akhirnya dapat membantu

pengembangan perekonomian pada desa-desa tersebut.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata
2. Program pengembangan destinasi pariwisata

Permasalahan:

1. Provinsi Jambi memiliki potensi ekowisata yang cukup banyak, namun belum tergali dan dikelola dengan baik.

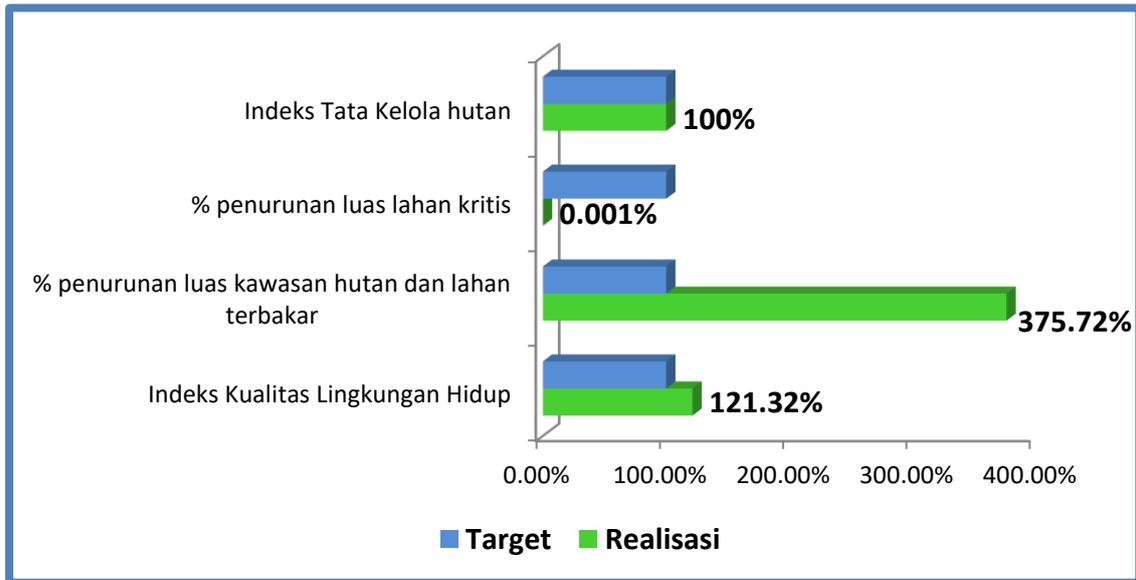
Solusi:

1. Pemberdayaan masyarakat pada daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan ekowisata

Sasaran 11.3. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan Lahan di Provinsi Jambi

DAS atau Daerah Aliran Sungai adalah kesatuan ruang yang terdiri atas unsur abiotik (tanah, air, udara), biotik (vegetasi, binatang dan organisme hidup lainnya) dan kegiatan manusia yang saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu sama lain, sehingga merupakan satu kesatuan ekosistem. Pengelolaan DAS meliputi tindakan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan DAS berazaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi kesejahteraan manusia.

Tutupan lahan merupakan salah satu komponen yang berpengaruh pada kualitas DAS. Luas lahan kritis akibat alih fungsi lahan, illegal logging ataupun kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jambi sehingga dijadikan target sasaran untuk diatasi. Capaian meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi tergambar dari capaian 4 indikator dengan uraian sebagai berikut:



Gambar 3.48 Capaian Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi

11.3.1. Indeks Tata Kelola Hutan

Indeks Tata Kelola Kehutanan mengukur 4 (empat) aspek antara lain: (1) Aspek Kepastian Kawasan Hutan, (2) Aspek Keadilan Atas Sumberdaya Hutan, (3) Transparansi Pengelolaan Hutan, dan (4) Kapasitas Penegakan Hukum. Indeks Tata Kelola Kehutanan merupakan salah satu instrumen yang bisa dipergunakan untuk memahami konteks tantangan pembangunan kehutanan dan pada saat bersamaan dapat digunakan untuk melihat peran setiap aktor kunci dalam penguatan tata kelola hutan. Hal ini bermanfaat dalam menetapkan prioritas kebijakan, program dan sejumlah inovasi yang bisa dipergunakan untuk mencapai target-target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Tabel 3.59 Capaian Indikator Indeks Tata Kelola Hutan

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Indeks Tata kelola Hutan	NA	39	33	34	35	35	100	50	70

Sumber: Dinas Kehutanan, 2018

Pada tahun 2015, indeks tata kelola Hutan Provinsi Jambi sebesar 33 dan merupakan peringkat dua nasional walaupun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya indeks tersebut turun. Hal ini menunjukkan bahwa indeks tata kelola hutan di seluruh Provinsi di Indonesia pada tahun tersebut mengalami penurunan. Sementara itu, realisasi indeks tata kelola hutan tahun 2017 adalah 35 atau terjadi peningkatan 1,0 poin dibandingkan tahun 2016 dengan tingkat capaian sebesar 100% atau kategori **sangat tinggi**, dan bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 maka capaian ini tergolong sedang dengan tingkat capaian 70%.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks tata kelola hutan di Provinsi Jambi dengan meningkatkan akuntabilitas internal dan eksternal. Akuntabilitas internal mencakup antara lain, Penetapan RTRW melalui PERDA Nomor 10 Tahun 2013 yang dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pemberian rekomendasi dengan kajian mendalam terhadap izin usaha pertambangan serta pertimbangan teknis untuk pinjam pakai hutan dan lain-lain. Sementara untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal dilakukan antara lain dengan penyelesaian tata batas hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan pengaduan-pengaduan serta penyelesaian konflik kehutanan. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui **Program perencanaan dan pengembangan hutan**.

Pada tahun 2017, melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah dibentuk sekretariat bersama pengelolaan sumber daya hutan (Sekber PSDH) secara resmi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 96/kota/Dishut-5.3/IV/2017 tanggal 3 April 2017. Sekber PSDH ini merupakan forum multipihak dengan anggota yang berasal dari seluruh stakeholder yang bekerja pada sektor kehutanan di Provinsi Jambi, yang terdiri dari pemerintah, NGO, akademisi dan unit bisnis sektor kehutanan. Forum ini diharapkan akan mewujudkan sinergisitas tata kelola kehutanan dari tingkat nasional hingga tingkat tapak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Jambi meliputi area dengan luas $\pm 1.458.934$ ha terdiri dari HL dengan luas ± 175.483 HP dengan luas ± 981.530 ha, HPT dengan luas ± 301.922 . Berdasarkan SK tersebut maka kawasan hutan provinsi Jambi dibagi dalam wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 17 unit kelola KPH yang terdiri dari 16 (enam belas) unit KPHP dan 1 (satu) unit KPHL. Seluruh KPH tersebut telah ditetapkan pada akhir tahun 2017 dan mulai beroperasi pada tahun 2018.

Permasalahan:

1. Pengelolaan hutan bukan hanya tugas satu instansi namun tugas seluruh stakeholder yang ada dan saling berkaitan. Degradasi hutan dan konflik kehutanan yang terjadi saat ini memerlukan ketegasan dan komitmen yang kuat dalam penyelesaiannya
2. Penataan batas hutan belum selesai seluruhnya.

Solusi:

- 1 Melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam perencanaan dan pengembangan hutan
- 2 Penegakan hukum yang tegas atas kasus-kasus kehutanan
- 3 Penyelesaian penataan batas hutan

11.3.2. Persentase Penurunan Luas Kawasan Hutan dan Lahan Terbakar

Isu kebakaran hutan dan lahan merupakan isu yang selalu diangkat ke permukaan setiap tahun oleh semua pihak, namun belum terselesaikan dengan tuntas dan masih terus terjadi walaupun dengan intensitas yang semakin menurun. Isu ini akan ramai dibicarakan pada saat kondisi kualitas udara di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya memburuk akibat kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 3.60 Capaian Indikator Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase penurunan luas Kawasan Hutan dan Lahan terbakar	NA	NA	(130.000 Ha)	99,82 %	26,5%	99,56%	375,72 %	50% (10.000 Ha)	194,28%

Sumber: Dinas Kehutanan, 2018



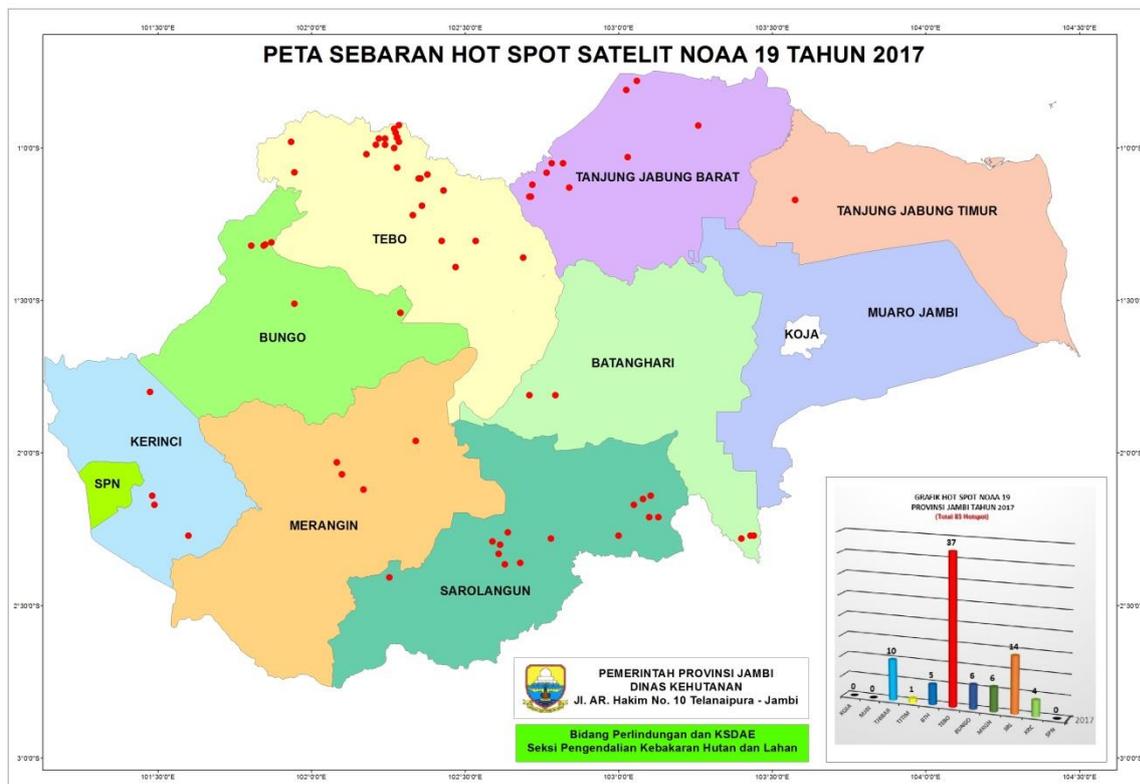
Sumber: Dinas Kehutanan, 2018

Gambar 3.49 Jumlah Hotspot di Provinsi Jambi

Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi menunjukkan hasil yang menggembirakan pada tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas. Bila dibandingkan dengan target tahun 2017, maka capaian ini sudah sangat baik yaitu sebesar 99,56 %. Dari target penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar sebesar 26,5% atau turun 34.430 Ha dari 130.000 Ha, Provinsi Jambi mampu menurunkan hingga 99,56% atau turun

seluas 129.428 Ha, sehingga luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2017 adalah seluas 572,5 Ha. Dari total luas lahan yang terbakar tersebut, 68,1 hektar berada di lahan gambut dan 507,4 hektar berada di lahan mineral. Persentase capaian indikator ini mencapai 375,72% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**, bahkan bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2021 capaian ini juga telah mencapai kategori sangat tinggi dengan persentase capaian sebesar 194,28%.

Penurunan luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar ini juga terlihat pada penurunan jumlah hotspot di Provinsi Jambi, dimana pada tahun 2015 masih ditemukan 1654 hotspot dan menurun drastis menjadi 83 hotspot pada tahun 2017. Jumlah hotspot di Provinsi Jambi tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada gambar di atas dan sebarannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.50 Sebaran Hotspot Tahun 2017

Upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi:

1. Deteksi dini melalui pemantauan titik panas (hotspot) dilakukan setiap hari.
2. Memberikan informasi titik panas (hotspot) kepada Posko Dalkarlahut Kabupaten/Kota.
3. Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat pengguna lahan.
4. Patroli kebakaran hutan dan lahan.
5. Gelar regu dalam rangka kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan.

6. Menyiapkan peralatan kebakaran hutan dan lahan.
7. Monitoring peralatan pada perusahaan bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
8. Membuat pengumuman Gubernur Jambi tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
9. Peraturan Daerah tentang Karhutla
10. Pembuatan leaflet/booklet untuk kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
11. Pencegahan dan pemadaman
12. Pembuatan embung, kanal dan sekat kanal.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2017 guna mendukung capaian indikator ini adalah

1. program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Permasalahan:

1. Pengaruh iklim masih sangat berpengaruh dengan jumlah kejadian Kebakaran hutan dan lahan, dimana pada saat terjadi kemarau yang panjang maka kebakaran hutan dan lahan akan meningkat
2. Kesadaran masyarakat dan korporasi untuk tidak melakukan pembakaran pada saat pembukaan lahan mulai tumbuh namun belum optimal.

Solusi:

1. Optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik panas (hotspot), pemberdayaan masyarakat peduli api, patroli kebakaran hutan dan lahan, penyiapan embung, kanal dan sekat kanal pada wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
2. Penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

11.3.3. Persentase Penurunan Lahan Kritis

Perkembangan lahan kritis di Provinsi Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 luas lahan kritis di Provinsi Jambi adalah 1.736.475,3 Ha dan mengalami penurunan luas pada tahun 2014 menjadi seluas 1.420.602 Ha. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Jambi terutama rehabilitasi lahan kritis yang ada di Provinsi Jambi. Penurunan lahan kritis pada tahun 2017 cukup tinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.61 Capaian Indikator Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Persentase penurunan Lahan kritis	NA	NA	(1.420.602 Ha)	40,54 %	2%	0,003%	0,001	10% (1.284.112 Ha)	405,41

Sumber: Dinas Kehutanan, 2018

Realisasi penurunan lahan kritis di Provinsi Jambi pada tahun 2016 yang lalu adalah 40,54% sehingga luas lahan kritis saat ini adalah seluas 844.647,42 Ha dari luas awal pada tahun 2015 seluas 1.420.602 Ha. Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan target 2% untuk penurunan lahan kritis, dan terealisasi sebesar 22 Ha atau hanya terealisasi sebesar 0,001% dari luas 844.647,42 Ha. Realisasi ini tidak terlalu besar karena serah terima peralihan kewenangan urusan kehutanan sedikit mengganggu capaian kinerja indikator ini. Walaupun realisasi tahun 2017 tergolong **sangat rendah**, namun bila dibandingkan dengan target akhir, realisasi sampai dengan tahun 2017 masuk dalam kategori **sangat tinggi**, karena besarnya realisasi pada tahun 2016.

Bila dibandingkan antara luas lahan kritis dalam kawasan hutan dengan luas lahan kritis di luar kawasan hutan, maka 50,31% luas lahan kritis berada di luar kawasan hutan dengan 36,33% diantaranya termasuk dalam kategori sangat kritis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aktivitas yang paling dominan menyebabkan terjadinya lahan kritis saat ini adalah PETI atau Pertambangan Tanpa Izin, terutama di wilayah-wilayah Barat Provinsi.



Gambar 3.51 Aktivitas Pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten dalam mengatasi kegiatan PETI dilakukan melalui cara-cara persuasif maupun represif. Secara persuasif dilakukan melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi hukum mengenai dampak buruk dari kegiatan pertambangan tanpa izin bahan galian emas yang dilakukan oleh tim terpadu baik dari Pemerintah Provinsi Jambi maupun dari pemerintah kabupaten yang terdiri dari instansi teknis terkait meliputi BLHD, Dinas

ESDM, Kejaksaan, Dan Biro/Bagian Hukum Setda Provinsi/Kabupaten, Dengan sasaran objek penyuluhan/sosialisasi meliputi para Camat dan staf, Para Lurah, Kepala Desa Dan Ketua LKMD, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh-Tokoh Pemuda/Organisasi Kepemudaan Serta LSM. Kepada para penambang dihimbau agar beralih profesi menjadi penambang pasir atau usaha lainnya.

Secara represif dilakukan melalui operasi penertiban oleh tim terpadu tingkat provinsi maupun tim terpadu tingkat kabupaten yang melibatkan pihak kepolisian dari tingkat Polres sampai Polda dan SatPol PP Kabupaten. Sasaran operasi mulai dari lokasi penambangan, pengangkutan, penimbunan sampai kepada penjualan dengan memutuskan mata rantai kegiatan melalui pemanggilan para pemilik SPBU yang menyalurkan bbm solar agar tidak melayani pembelian solar dalam partai besar serta pemanggilan pimpinan beberapa toko yang diduga menjual mesin penambangan emas agar tidak menjual mesin dompeng serta peralatan pertambangan lainnya termasuk air raksa.

Tabel 3.62 Sebaran lokasi PETI komoditi emas di Provinsi Jambi Tahun 2017

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Merangin		Bukit Perentak
2	Merangin		Bukit Tiga Alur
3	Merangin	Pangkalan Jambu	Baru
4	Sarolangun	CNG	Pemuncak
5	Sarolangun	CNG	Teluk Tigo
6	Sarolangun	CNG	Berau
7	Sarolangun	CNG	Pulau Teluk
8	Sarolangun	CNG	Mengkua
9	Sarolangun	Limun	Napal Melintang
10	Sarolangun	Limun	Panca Karya
11	Sarolangun	Limun	Sungai Keramat
12	Sarolangun	Limun	Teluk
13	Bungo	Pasar Ma. Bungo	Jaya Setia
14	Bungo	Bathin III	Teluk Panjang
15	Bungo	Bathin III	Air Gemuruh
16	Bungo	Bathin III	Desa Baru Lubuk Benteng
17	Tebo	Tebo Ilir	Tuo Ilir
18	Tebo	Rimbo Bujang	Perintis
19	Tebo	Rimbo Ulu	Suka Maju
20	Tebo	Tebo Tengah	Aburan

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2017

Program yang dilakukan pada tahun 2017 untuk menurunkan luas lahan kritis adalah:

1. Program rehabilitasi hutan dan lahan
2. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Permasalahan:

1. Pemberantasan PETI sangat sulit, fakta selama ini memperlihatkan bahwa aktivitas ini akan berhenti pada saat bahan galian yang ditambang telah habis/tidak ditemukan lagi dan kawasan yang dijadikan tempat aktivitas PETI telah rusak parah.

Solusi:

1. Penegakan hukum atas pelanggaran ini harus benar-benar dilaksanakan secara serius dengan diiringi penyediaan lapangan pekerjaan alternatif yang lebih baik.
2. Rehabilitasi hutan dan lahan yang telah kritis secara terus menerus.

11.3.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia saat ini dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index* (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Universitas Yale, Amerika Serikat. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia mencakup kualitas air sungai, kualitas udara ambien, dan tutupan hutan.

IKLH merupakan sebuah kebijakan yang diambil untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dan menjadi salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut dengan wilayah lainnya atau membandingkan kualitas lingkungan hidup pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Pada IKLH 2009 hingga 2011 dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan titik acuan dan metode perhitungan. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada tahun 2012-2014 dilakukan pengembangan metodologi dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan keseimbangan dinamis antara isu hijau dan isu coklat, dimana isu hijau adalah semua aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan isu coklat adalah aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Tahun 2016-2017 dilakukan penyempurnaan kembali dengan pengembangan metodologi perhitungan IKA. Pada periode ini status mutu air yang digunakan adalah status mutu air kelas I Peraturan pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan aspek rehabilitasi berdasarkan perubahan tutupan lahan/hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial.

Pemerintah dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah terjadi atau prioritas akan terjadi. Kedudukan IKLH menjadi sangat penting karena mempunyai peranan besar dalam rangka implementasi Instrumen Analisis Risiko Lingkungan. Bila IKLH diterapkan dengan benar maka akan dapat memberi sumbangan penting dalam rangka pengkajian risiko lingkungan dan pengelolaan risiko lingkungan karena IKLH mengandung hasil penilaian aktual pada komponen penting lingkungan hidup.

Dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 262 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana pembangunan Daerah tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Karena dalam perumusan rencana pembangunan daerah harus berwawasan lingkungan, maka IKLH dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan.

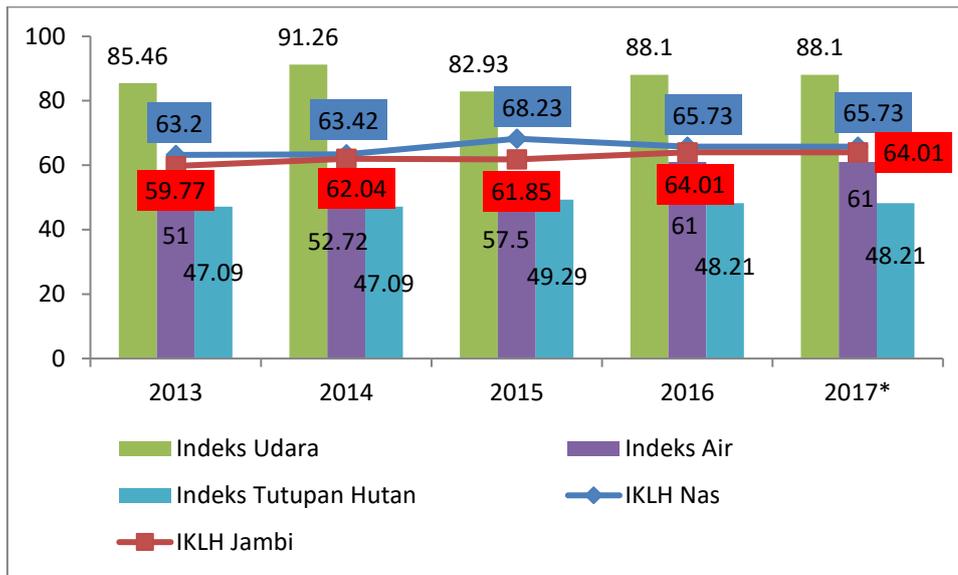
Tabel 3.63 Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59,77	62,04	61,85*)	64,01	52,76	64,01**)	121,32	52,84	121,14

Sumber: Kemen LH, 2017

Ket: *)data tahun 2015 rilis tahun 2017; **)data tahun 2016 rilis tahun 2017

Sejak mengalami penurunan pada tahun 2013, IKLH Provinsi Jambi kembali mengalami perbaikan pada tahun 2013 hingga saat ini. Data realisasi IKLH tahun 2017 yang disampaikan pada tabel di atas adalah data yang dirilis pada akhir tahun 2017 dan merupakan kondisi tahun 2016. Demikian pula dengan data IKLH tahun 2015, merupakan data kondisi IKLH tahun 2015 yang dirilis pada tahun 2017 dengan menggunakan metode perhitungan IKLH yang baru sesuai dengan keterangan di atas. Berdasarkan data tersebut, realisasi IKLH melebihi target yang ditetapkan atau terealisasi sebesar 121,32% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Realisasi ini bahkan telah melebihi target akhir IKLH pada tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 52,84 atau telah terealisasi sebesar 121,14% atau sangat tinggi.



Sumber: Kemen LH (diolah), 2017

Gambar 3.52 Perkembangan komponen IKLH di Provinsi Jambi dan Perbandingan dengan IKLH Nasional

Bila dilihat perkomponen pembentuk indeks, maka indeks yang mengalami penurunan adalah indeks tutupan lahan. Hal ini disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015, yang sekaligus menurunkan kualitas udara pada tahun tersebut. Perbaikan indeks tutupan lahan ini akan membutuhkan waktu beberapa tahun walaupun rehabilitasi hutan dan lahan terus dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak-pihak lainnya. Hal ini berbeda dengan kualitas udara yang telah menunjukkan perbaikan kualitasnya seiring dengan upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Sedangkan indeks lain, yaitu indeks kualitas air terus menunjukkan peningkatan atau perbaikan. Namun demikian, IKLH Provinsi Jambi masih terus dibawah IKLH Nasional sejak tahun 2012 hingga saat ini. Untuk itu upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan harus terus dilakukan secara masif.

Pemantauan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan tanpa diikuti oleh aktivitas pemantauan tidak akan banyak berarti. Hal ini merupakan upaya untuk mengetahui sejauhmana dampak aktivitas pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur kualitas lingkungan di wilayah Provinsi Jambi khususnya kualitas air sungai lintas Kabupaten/Kota dan kualitas udara ambien di Wilayah Provinsi Jambi.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan pemantauan kualitas air pada 7 sungai dalam Provinsi Jambi yaitu Batang Hari, Batang Merangin, Batang Tembesi, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Sumay, Batang Limun dengan 14 titik sampel dan dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Berdasarkan analisa terhadap data hasil uji menggunakan Metode Indeks

Pencemar (IP), status mutu air untuk baku mutu adalah cemar ringan. Untuk hasil lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.64 Data Hasil Pemantauan Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2017

No	Kabupaten	Nama Sungai	Lokasi Titik Sampling	Rekap per sungai	status mutu air
1	Tebo	Batanghari	Desa Pucuk Jambi, Desa Teluk Kayu Putih, Desa Teluk Kepayang, Desa Tambung Arang, Desa Teluk Singkawang.	1,398	Tercemar ringan
		Batang Sumay	Desa Teluk Singkawang, Kab.Tebo	1,241	Tercemar ringan
		Batang Tebo	Desa Mangun Jayo, Kab. Tebo	2,447	Tercemar ringan
2	BatangHari	Batanghari	Desa Bulu Kasap, Desa Pematang Gadung, Desa Rantau Kapas Mudo, Desa Kubu Kandang.	2,046	Tercemar ringan
		Batang Tabir	Dusun tuo Peninjauan Kab. Batanghari	2,221	Tercemar ringan
		Batang Tembesi	Desa Pasar Muara Tembesi Kab. Batanghari	2,314	Tercemar ringan
3	Tanjab Timur	Batanghari	Desa Kuala Dendang, Desa Lagan Hulu, Desa Kuala Dendang	2,526	Tercemar ringan
4	Kerinci	Batang Merangin	Desa Sanggaran Agung, Kab. Kerinci	1,121	Tercemar ringan
5	Merangin	Batang Merangin	Desa Muara Emat, Kelurahan Pasar Bangko	1,316	Tercemar ringan
6	Muaro Jambi	Batanghari	Desa Gerunggung, Desa Rengas Bandung, Desa Kunangan, Desa Rukam, Desa Tanjung,	2,712	Tercemar ringan
7	Sarolangun	Batang Limun	Desa Pulau Pandan Kab. Sarolangun	3,002	Tercemar ringan
		Batang Tembesi	Desa Batu Kucing, Desa Sarolangun Kembang	2,534	Tercemar ringan
8	Bungo	Batang Tebo	Desa Tanjung Gedang Kab. Bungo	2,170	Tercemar ringan
		Sungai Pelepat	Desa Muaro Kuamang, Kab. Bungo	2,017	Tercemar ringan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi, 2018

Sementara untuk kualitas udara, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pada 11 kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi di 4 lokasi yaitu perkantoran, transportasi, pemukiman dan industri/rumah sakit didapat hasil bahwa kualitas udara dalam Provinsi Jambi masih memenuhi baku mutu udara ambien dan aktivitas yang ada belum mencemari udara. Namun

demikian upaya preventif pengadaan Ruang Terbuka Hijau disekitar area tersebut tetap dibutuhkan sebagai penyedia oksigen bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tingkat penurunan emisi yang dihasilkan oleh pengelolaan limbah pertahun dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.65 Penurunan Emisi GRK dari Limbah

Pengelolaan Limbah	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Aksi Mitigasi	9	16	7	39	39
Emisi BAU (ton CO ₂ e)	3.901,66	919,30	21,50	32.937,20	32.937,86
Penurunan Emisi (ton C)2e)	1.505,30	(-2758,1)	(-322,16)	16.923,00	169.233,20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jambi, 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa upaya penurunan emisi di Provinsi Jambi menunjukkan hasil yang baik, dimana pada tahun 2013 upaya penurunan emisi baru mencapai 38,58% dengan 9 aksi mitigasi. Pada tahun 2017 telah terjadi penurunan emisi sebesar 169.233,20 CO₂e dari emisi BAU sebesar 32.937,86 Ton CO₂e dengan 39 aksi mitigasi. Dari 39 aksi mitigasi yang telah dilakukan, terdapat aksi mitigasi pendukung yang tercatat tidak dapat menurunkan emisi tapi berkontribusi secara tidak langsung terhadap penurun emisi.

Program yang dilakukan untuk meningkatkan IKLH:

1. Program rehabilitasi hutan dan lahan
2. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Permasalahan:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan di Provinsi Jambi belum sebanding dengan laju degradasi lahan dan hutan yang terjadi.
2. Kualitas air yang menunjukkan kualifikasi buruk akibat cemar berat di beberapa titik di Sungai Batanghari perlu penanganan serius mengingat Sungai Batanghari merupakan sumber air baku utama bagi perusahaan air minum yang beroperasi di Provinsi Jambi

Solusi:

1. Pengelolaan lingkungan secara baik dan benar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab seluruh stake holder. Oleh sebab itu upaya-upaya

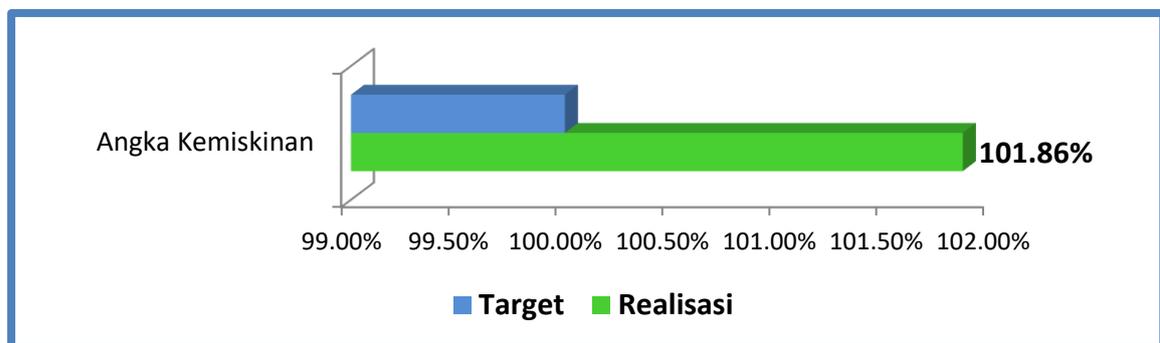
peningkatan kesadaran masyarakat sebagai upaya preventif harus terus dilakukan seiring dengan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan.

Tujuan 12 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. Sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan ini berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta pengendalian penduduk.

Sasaran 12.1. Menurunnya angka kemiskinan

Stabilitas harga makanan merupakan hal penting sekali bagi Indonesia sebagai negara yang penduduknya menghabiskan sebagian pendapatannya untuk membeli makanan. Oleh karena itu, tekanan inflasi pada harga makanan dapat memiliki konsekuensi sangat serius bagi mereka yang miskin atau hampir miskin. Bahkan sebagian dari mereka yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan bisa jatuh dalam kemiskinan penuh karena inflasi yang tinggi. Capaian sasaran menurunnya angka kemiskinan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.53 Capaian sasaran menurunnya angka kemiskinan

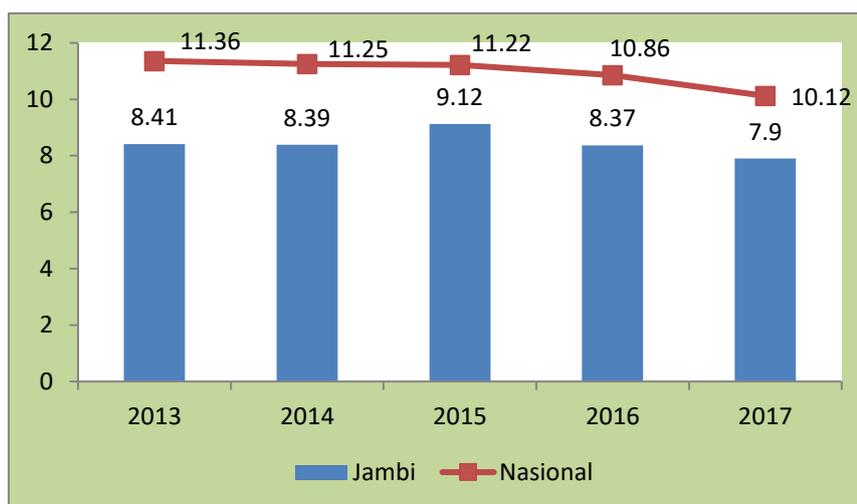
12.1.1. Angka Kemiskinan

Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkadang kurang memperhatikan keadaan untuk jangka panjang. Mengatasi hal tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu bentuk rancangan yang dapat digunakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan

yang memperhatikan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menjadi model pembangunan yang memperhatikan segi sumber daya dan juga lingkungan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Batas yang digunakan untuk pengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin adalah garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan selama periode Maret-september 2017 naik sebesar 1,74 persen, yaitu dari Rp389.596 per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp396.361 per kapita perbulan pada September 2017. Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan, terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan) Besarnya sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2017 sebesar 77,29%.



Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.54 Angka kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dari tahun 2013 sampai tahun 2017 berfluktuatif dan mencapai angka tertinggi pada Bulan September Tahun 2015. Angka tersebut kemudian kembali turun berkat mulai membaik kondisi ekonomi global. Angka kemiskinan Provinsi Jambi mengalami penurunan pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya, dan melampaui target pada tahun tersebut. Tingkat capaian indikator pada tahun 2017 adalah sebesar 101,86%, dengan **kategori sangat tinggi** dan bila dibandingkan dengan target akhir maka capaiannya adalah sebesar 88,58%

Tabel 3.66 Capaian Indikator angka kemiskinan Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Angka kemiskinan	8,49	8,39	9,12	8,37	8,05	7,9	101,86	7,09	88,58

Sumber: BPS, 2018

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah indeks kealaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pada periode maret-september 2017, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan. **Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 1,281 pada Maret 2017 menjadi 0,992 pada September 2017.** Demikian pula **indeks keparahan kemiskinan, turun dari 0,294 menjadi 0,192 pada periode yang sama.** Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2017 untuk menurunkan angka kemiskinan adalah mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat petani, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas, stabilitas harga di tingkat petani dan pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan meningkatkan layanan irigasi, pemberian pupuk bersubsidi, pemberian penyuluhan, pemberian saprodi, dan lain-lain. Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, salah satunya dengan meningkatkan kondisi jalan yang menuju ke sentra produksi karena kondisi jalan yang buruk mempengaruhi biaya produksi dan transportasi yang harus ditanggung petani.

Demikian pula pada nelayan dan masyarakat lainnya. Pada dasarnya hampir seluruh program yang bersentuhan dengan masyarakat merupakan upaya pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mendukung indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Program pembiayaan dan jaminan kesehatan
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
3. Program pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan
4. Progra Pengembangan Perumahan dan Permukiman
5. Program Pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman di pusat kegiatan nasional dan kawasan strategis provinsi
6. Program pengembangan perikanan budidaya
7. Program pengembangan perikanan tangkap

Permasalahan:

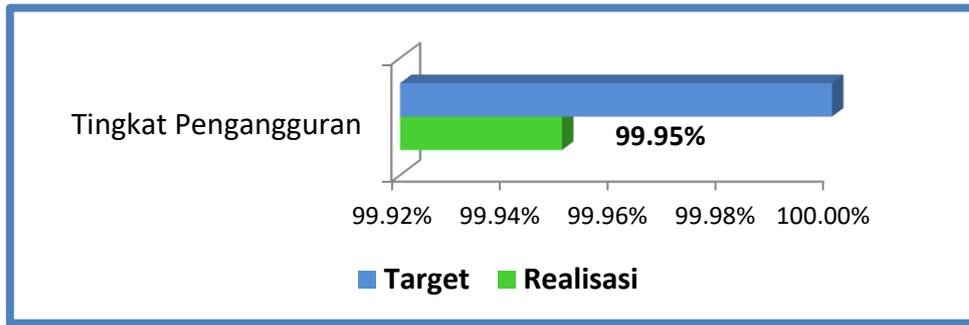
1. Kondisi perekonomian yang tidak menentu yang dapat menyebabkan inflasi tinggi merupakan salah satu faktor kerawanan peningkatan angka kemiskinan, karena masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat mudah kembali menjadi miskin akibat keadaan ini.

Solusi:

1. Menjaga stabilitas harga yang mampu diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurangi inflasi
2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian

Sasaran 12.2. Menurunnya angka pengangguran

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran tahun 2017 di Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.55 Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran

12.2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Perluasan kesempatan kerja merupakan usaha untuk mengembangkan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja itu sendiri.

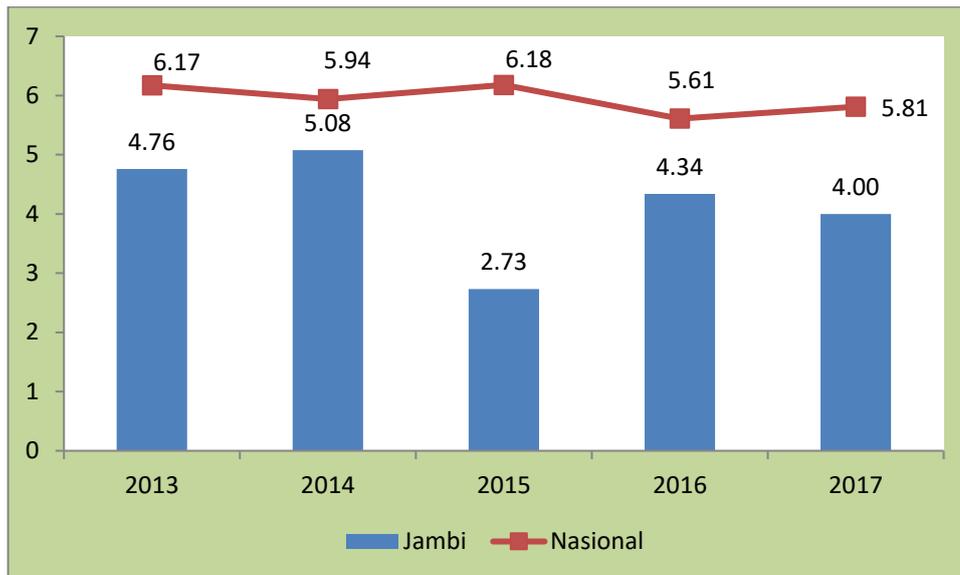
Tabel 3.67 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2017
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Target	Realisasi	% capaian		
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,76	5,08	4,34	4,0	3,7	3,87	99,95%	2,5 %	54,8

Sumber: BPS, 2018

Ket: TPT Bulan Agustus

Tabel capaian indikator TPT diatas memperlihatkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi mulai membaik sejak tahun 2015. TPT Tahun 2017 sebesar 3,87 % atau terjadi penurunan 0,13% dibandingkan kondisi tahun 2016 dan terealisasi sebesar 99,95% (**sangat tinggi**). Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini masih dalam kategori rendah karena baru mencapai 54,8% dari target sebesar 2,5%. TPT Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah TPT nasional yang artinya capaian indikator TPT di Provinsi Jambi masih lebih baik dari nasional dan beberapa daerah lainnya.

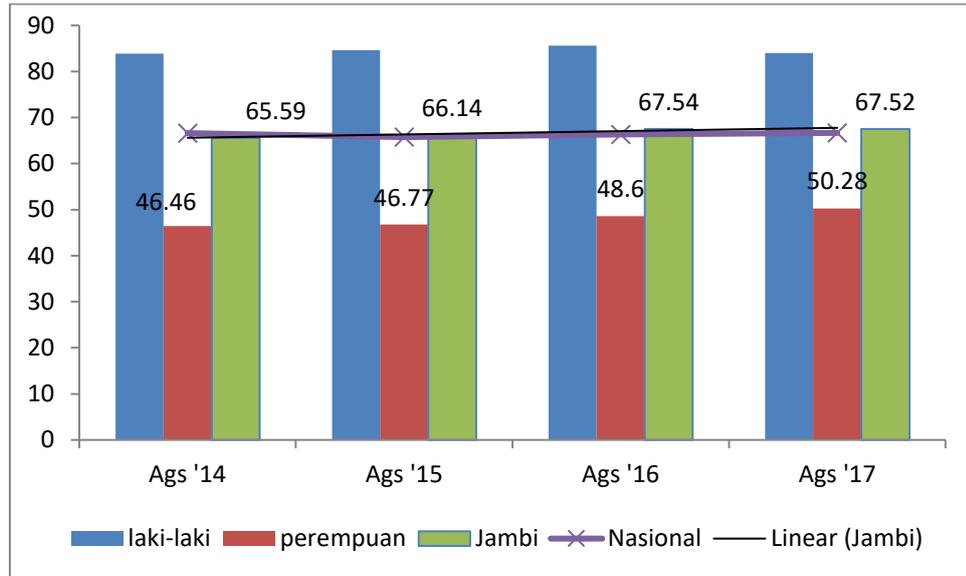


Sumber: BPS, 2018

Gambar 3.56 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi dibandingkan dengan TPT Nasional (September)

Kondisi ketenagakerjaan dirilis oleh BPS 2 kali setahun, yaitu pada Bulan Februari dan Agustus. Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada Agustus 2017 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 67,7 ribu orang dibanding Februari 2017 dan bertambah 32,4 ribu orang dibanding Agustus 2016. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi Agustus 2017 adalah sebesar 67,52% atau memperlihatkan penurunan sebesar 0,02 % dibanding Agustus 2016 yang menunjukkan data sebesar 67,54%. Tingkat partisipasi ini lebih rendah dibandingkan dengan TPAK nasional yang berada pada 5,5%.

Jumlah penganggur pada Agustus 2017 sebesar 66,8 ribu orang, berkurang sekitar 860 orang jika dibanding keadaan Agustus 2016, namun jika dibanding dengan Agustus 2015 ada pengurangan sebanyak 3,5 ribu orang penganggur. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2017 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 707 ribu orang (42,6%), disusul pendidikan SMA umum sebanyak 335 ribu orang (20,23%) dan pendidikan SMP sebanyak 310,5 ribu orang (18,7%). Pekerja dengan pendidikan SMA kejuruan (SMK) sebanyak 114,6 ribu orang (6,9%), sementara itu pekerja berpendidikan tinggi sebanyak 190,2 ribu orang (11,47%).



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2017

Gambar 3.57 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi dibanding nasional Tahun 2014-2017 (Agustus)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan TPT antara lain melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja tentang kewirausahaan produktif, produktivitas tenaga kerja; kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK) dan berbasis masyarakat; pemagangan dalam dan luar negeri, Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri; Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB); Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna; pengembangan kesempatan kerja dalam dan luar negeri; serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Jumlah tenaga kerja yang dilatih adalah peranan para pelaku jasa konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.

Adapun program yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Permasalahan:

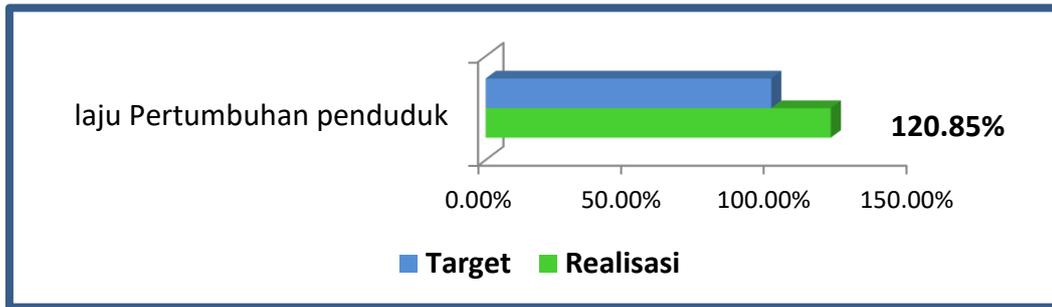
1. TPT di Provinsi didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan tinggi (S1,S2,S3), yang berarti penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja dengan gaji rendah.

Solusi:

1. Meningkatkan kapasitas pendidikan para pencari kerja, sehingga dapat bersaing dengan orang lain dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi
2. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja (SDM) antara lain :
 - Menyiapkan tenaga ahli dan trampil dengan menyiapkan pendidikan formal bagi masyarakat.
 - Menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalu perbaikan gizi penduduk, memberikan jaminan sosisl yang memadai
 - Mengadakan latihan-latihan atau job training bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik.
 - Mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mempeluas ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta menimba pengalaman kerja.

Sasaran 12.3. Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi

Permasalahan kependudukan yang terkait dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk segera diatasi. kependudukan merupakan hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Perkembangan kependudukan adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Capaian sasaran terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.58 Capaian sasaran terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi

12.3.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada umumnya, masalah yang dialami negara berkembang adalah masalah pertumbuhan penduduk yang berlebih. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tentu akan menimbulkan banyak pengaruh dalam kehidupan. Problem yang akan dihadapi akibat meningkatnya penambahan penduduk adalah pangan, energi, dan papan. Dari sisi kebutuhan pangan, setiap kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan pula kebutuhan pangan. Begitu pula kebutuhan energi, pertumbuhan penduduk akan menyedot energi besar, sementara ketersediaan energi makin menipis. Tak terkecuali masalah papan atau perumahan yang harus disediakan dalam jumlah besar. Masalah ini tentunya akan berujung pada naiknya tingkat pengangguran, kemiskinan, angka kriminalitas dan lain-lain.

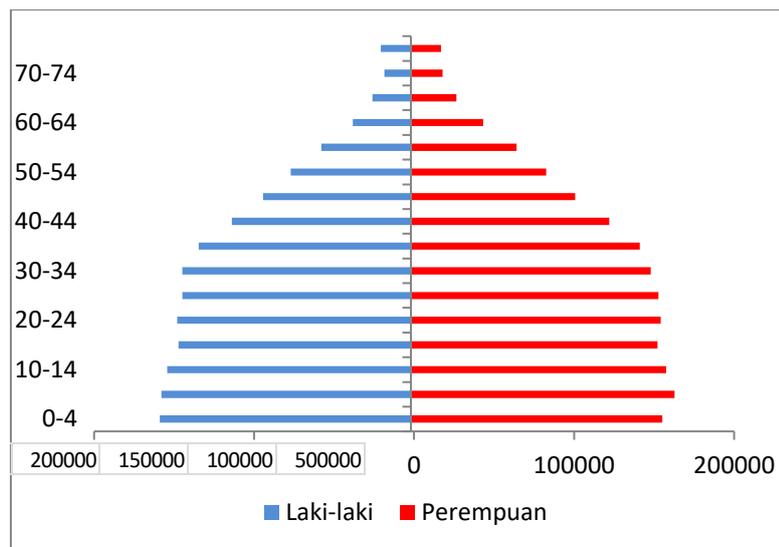
Berbagai cara dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. seperti transmigrasi, program Keluarga Berencana (KB), meningkatkan standar pendidikan bangsa, serta melakukan pengawasan-pengawasan terkait masalah ini. Pertumbuhan penduduk penting, tetapi dibatasi. Kita perlu sadar bahwa daya dukung sumber daya alam terbatas, sehingga jika jumlah penduduk tidak terkendali akan menjadi problem besar di masa depan. Prinsipnya. Pertumbuhan harus dibatasi, dan setiap lapisan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. karena dengan pertumbuhan yang terkendali akan mempermudah pemerintah mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.

Tabel 3.68 Capaian indikator Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD (2021)	% Capaian Target s.d. 2016
	2013	2014	2015 (Kondisi Awal RPJMD)	2016	2017				
					Tar-get	Realisasi	% capaian		
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,88	1,85	2,24	1,8	2,11	1,67	120,85%	1,82	108,24%

Sumber: BPS, 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2017 adalah sebesar 1,67. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 2,11 atau terealisasi sebesar 120,85% dengan kategori capaian termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, capaian ini juga telah melebihi target akhir yang ditetapkan sebesar 1,82 atau terealisasi 108,24% dengan kategori capaian adalah sangat tinggi.



Gambar 3.59 Piramida Penduduk Tahun 2017 (data 2016)

Tercapainya target indikator ini tidak terlepas dari upaya berbagai pihak terkait dalam menggalakkan program KB. Adapun program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2017 untuk mendukung capaian indikator ini adalah **Program Pengendalian Penduduk**. Bila dilihat piramida di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Provinsi Jambi berada di usia produktif, dan oleh karena itu bila tidak diantisipasi maka akan terjadi lonjakan penduduk yang cukup signifikan.

Permasalahan:

1. Bila dilihat piramida penduduk, maka jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jambi adalah penduduk usia produktif, bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk alamiah maka akan terjadi lonjakan penduduk yang tidak terkendali di Provinsi Jambi yang pada akhirnya memberikan banyak dampak negatif.

Solusi:

1. Program Keluarga Berencana harus terus digalakkan, dan diimbangi dengan peningkatan pendidikan masyarakat sehingga kesadaran akan dampak buruk pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat tersosialisasi dengan baik.

2. Bila laju pertumbuhan penduduk alamiah dapat ditekan melalui program KB, faktor migrasi penduduk tidak bisa dibatasi dengan mudah. Oleh karena itu, langkah antisipatif untuk mengurangi dampak buruk penambahan penduduk lewat migrasi adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diiringi dengan penyediaan pendidikan yang berkualitas.

3.2 Indikator Kinerja Lainnya

Selain pencapaian IKU Gubernur sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab 3.1, berikut akan diuraikan capaian kinerja lainnya terkait dengan dukungan terhadap capaian RPJMN:

3.2.1 Kinerja Kesehatan

3.2.2 Kinerja penanggulangan penyakit menular

Prioritas penyakit menular masih tertuju pada penyakit HIV/AIDS, TB, malaria, DBD, disamping itu penyakit *neglected disease* seperti kusta dan filariasis belum sepenuhnya berhasil dikendalikan. Sejak pertama kali ditemukan tahun 1987, dan dilaporkan tahun 1999 di Provinsi Jambi terlaporkan di provinsi jambi 1537 kasus(jumlah sebenarnya tidak diketahui).

Potensi yg dimiliki Provinsi Jambi dalam pengendalian HIV-AIDS diantaranya telah memiliki persiapan yg cukup baik, mencakup tata laksana penanganan pasien, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, tersebar 25 klinik layanan IMS yg tersebar di kab/kota di provinsi jambi, 27 klinik layanan VCT/KT, 15 klinik layanan CST/PDP(care, support, and treatment/perawatan, dukungan dan pengobatan), 15 klinik layanan PPIA, 1 klinik layanan program terapi rumanan metadon. Untuk TB sendiri Provinsi Jambi memiliki 3 alat TCM (tes cepat molekular), untuk membantu penemuan kasus Tb secara dini.

Hepatitis virus yg terdiri dari hepatitis A,B, C, D dan E merupakan masalah kesehatan masyarakat yg serius di Indonesia. Untuk hepatitis A dan E yg ditularkan secara fecal oral sering menimbulkan KLB, sedangkan Hepatitis B dan C adalah penyakit kronis yang dapat menimbulkan penyakit sirosis dan kanker hati bagi penderitanya. Dalam hal pengendalian hepatitis maka strategi utama adalah melaksanakan upaya peningkatan pengetahuan dan kepedulian, pencegahan secara komprehensif, pengamatan penyakit dan pengendalian termasuk tata laksana dan peningkatan akses layanan, di provinsi jambi untuk pelayanan pemeriksaan deteksi dini hepatitis B sudah tersebar di 7 kab/kota dan 4 kab lainnya akan dilatih tahun 2018 ini.

Untuk penyakit malaria menunjukkan pencapaian program yg cukup baik. Annual parasite incidence(API) yg menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun, dimana tahun 2015 API 11 kab/kota di Provinsi Jambi telah mencapai <1 /1000 penduduk, dan 3 kab/kota telah mendapat sertifikat eliminasi malaria dari kementerian kesehatan yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kab Kerinci, dan tahun 2018 sedang disiapkan 3 kabupaten lagi yaitu kab Batanghari, tanjabtimur, dan muaro jambi untuk persiapan eliminasi malaria.

Sedangkan untuk kasus penyakit *neglected disease* seperti kusta dan filariasis. Di Provinsi Jambi penyakit kusta prevalensi penyakit kusta di Provinsi Jambi sudah rendah dan tetap dilaksanakan kegiatan yg menunjang menuju persiapan eliminasi kusta tahun 2020 seperti kegiatan RVS (ravid village survey) yaitu kegiatan penemuan kasus kusta secara aktif ke masyarakat, untuk penyakit neglected disease lainnya yaitu filariasis dimana ada 5 kab endemis filariasis sudah melaksanakan POPM dan telah melalui tahap Pre-Tas, TAS untuk menentukan endemisitas filariasis dari kab tersebut.

Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung merupakan salah satu Program yang berhubungan dengan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh Virus yang apabila tidak segera ditangani secara cermat dan seksama akan menimbulkan dampak yang berat seperti TB, HIV dan Kusta untuk itu peran dari semua pihak sangat diharapkan agar tercapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang optimal.

1. Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung meliputi kegiatan antara lain :
2. Program TB Paru
3. Program HIV
4. Program Kusta/Frambusia
5. Program ISPA/Pneumonia

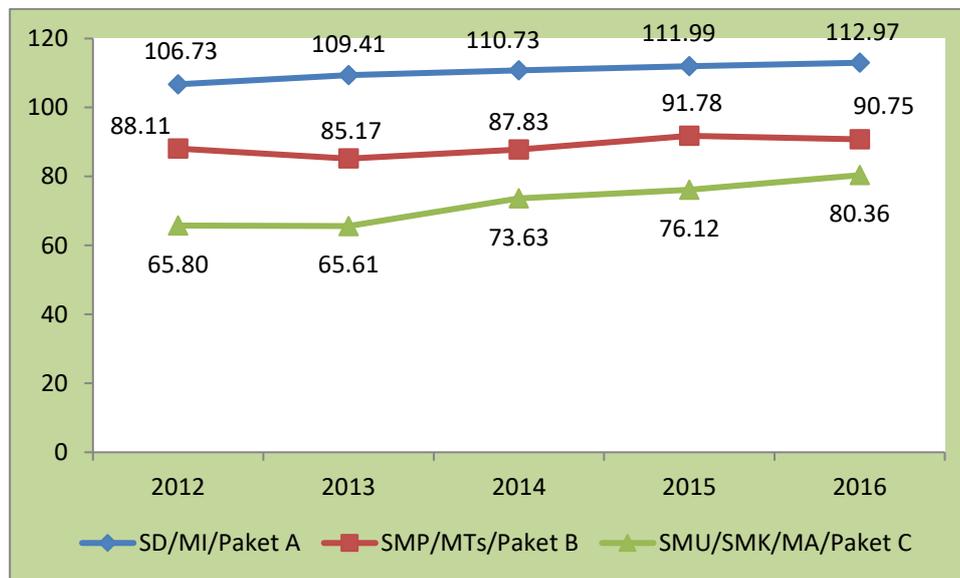
3.2.2 Kinerja Pendidikan

Keberhasilan program pembangunan pendidikan digambarkan dalam Misi 5K. Adapun Misi 5K yang dimaksud adalah ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu pendidikan, mewujudkan kesetaraan untuk pendidikan, dan menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan, khususnya menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT/ sederajat di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya

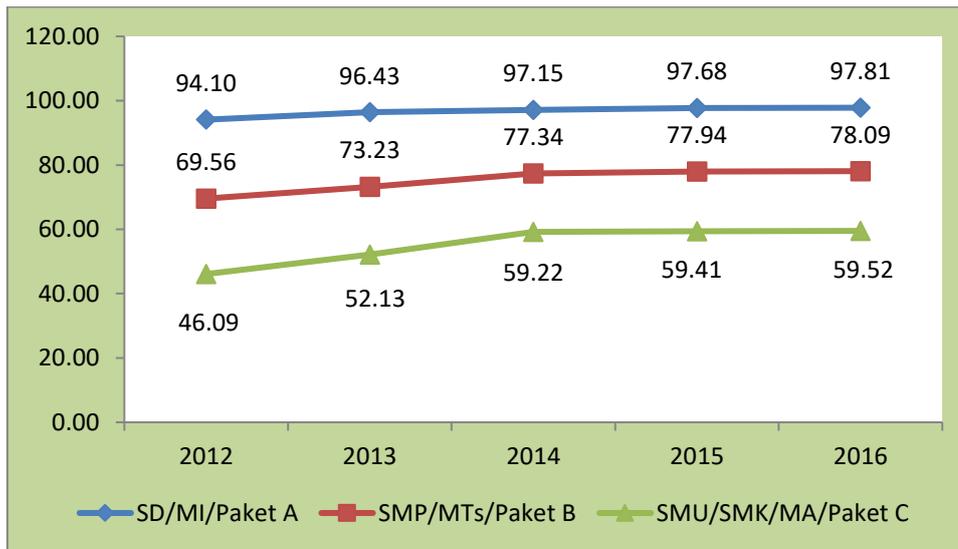
terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100.



Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.60 APK SD, SMP dan SMA sederajat Provinsi Jambi Tahun 2012-2016

Data yang digunakan dalam menggambarkan kinerja bidang pendidikan yang ditampilkan adalah data terakhir yang dirilis oleh BPS pada triwulan III Tahun 2017 dan merupakan kondisi tahun 2016. APK SD sederajat sejak tahun 2012 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2016. APK SD sederajat sejak tahun 2012 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2016. APK SD pada tahun 2012 mencapai 106,73 persen dan meningkat menjadi 112,97 persen pada tahun 2016, kenyataan ini turut didorong oleh meningkatnya kejar paket A. Untuk APK SMP Provinsi Jambi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Pada tahun 2012, APK SMP sederajat sebesar 88,11 persen, menurun menjadi 85,17 persen pada tahun 2013, dan naik kembali menjadi 91,78 persen pada tahun 2015 meningkat dan turun kembali menjadi 90,75 persen pada tahun 2016. APK SMA mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 65,61 persen dari 65,80 persen pada tahun 2012. Selanjutnya angka ini terus meningkat hingga menjadi 80,36 persen pada tahun 2016.

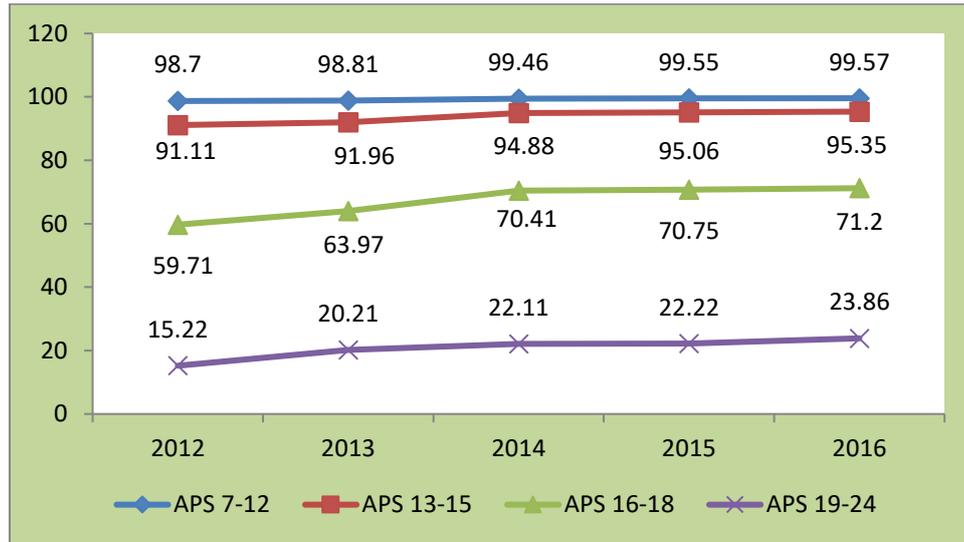


Sumber : BPS, 2017

Gambar 3.61 APM SD, SMP dan SMA sederajat Provinsi Jambi Tahun 2012-

Untuk APM SD terjadi peningkatan dari 94,10 persen pada tahun 2012 menjadi 97,81 persen pada tahun 2016. Demikian juga APM SMP yang meningkat cukup signifikan dari 69,56 persen di tahun 2012 menjadi 78,09 persen di tahun 2016. Hal yang sama juga terjadi pada APM SMA yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam periode tahun yang sama. Pada tahun 2012, APM SMA sebesar 46,09 persen, meningkat menjadi 59,52 persen pada tahun 2016. Persentase ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100 persen.

APS semua usia sekolah di Provinsi Jambi tahun 2012-2016 mengalami peningkatan, dimana APS usia 7-12 tahun memiliki persentase yang lebih besar daripada APS usia lainnya. Pada tahun 2012 APS usia 7-12 tahun sebesar 98,7 persen meningkat menjadi 99,57 persen di tahun 2016. Sementara untuk APS usia 19-24 tahun memiliki persentase yang paling kecil dibanding APS usia lainnya, dimana pada tahun 2012 sebesar 15,22 persen meningkat menjadi 23,86 persen di tahun 2016.



Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.62 APS Provinsi Jambi Tahun 2012-2016

Peningkatan Angka Partisipasi (APK, APM dan APS) selama lima tahun terakhir belum menunjukkan kinerja bidang pendidikan yang baik, masih terdapat banyak catatan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pendidikan ke depan. *Pertama*, program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi sampai tahun 2015 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka partisipasi sekolah penduduk usia SD, SMP dan SMA belum mencapai/mendekati angka 100 persen. *Kedua*, tingkat partisipasi pendidikan yang pada jenjang pendidikan menengah yang baru mencapai 71,2 persen masih menjadi tantangan kedepan dalam peningkatan kualitas SDM di Provinsi Jambi. *Ketiga*, masih terdapatnya disparitas tingkat pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan; antar penduduk kaya dan miskin, dan disparitas gender. *Keempat*, masih rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya saing lulusan, dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi pada keunggulan komperatif daerah.

Persentase APK dan APM diatas tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Jambi untuk kelancaran penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaksanakan setiap tahun disamping adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar 9 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah dan Angka Partisipasi Murni (APM) masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100%. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya daya tampung siswa, rendahnya kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anaknya dan faktor sosial ekonomi orang tua yang tidak memadai serta faktor geografis yang kurang mendukung.

Untuk capaian Angka melek huruf, yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang tidak dapat membaca dan menulis, Provinsi Jambi menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2016. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016 yang dirilis oleh BPS pada tahun 2017, **angka melek huruf usia 15-24 tahun di Provinsi Jambi Tahun 2016**

adalah sebesar 99,85% dengan rincian angka melek huruf usia 15-24 tahun di daerah perkotaan telah mencapai 100% dan angka melek huruf usia 15-24 tahun di daerah perdesaan sebesar 99,78%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk belajar di kota telah tumbuh dengan sangat baik, namun kesadaran untuk belajar membaca dan menulis di daerah perdesaan masih belum optimal walaupun proporsinya sangat kecil sekali yaitu 0,22%. Kondisi ini berhubungan erat dengan pekerjaan utama penduduk di daerah perdesaan yang mayoritas bergerak di sektor pertanian dengan kecenderungan memiliki anggapan bahwa pendidikan belum menjadi sesuatu yang penting. Namun kedepan melalui pendamping-pendamping desa yang bertugas di desa, diharapkan akan tumbuh kesadaran masyarakat perdesaan untuk belajar membaca dan menulis, hingga angka melek huruf usia 15-24 tahun di Provinsi Jambi dapat mencapai 100%.

Sementara itu, Pendidikan Nonformal telah mampu memberikan alternatif pilihan penyelesaian permasalahan pendidikan yang dihadapi masyarakat, selain itu dapat memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat terutama mereka yang belum terlayani kebutuhan pendidikannya pada jalur Pendidikan Formal. Adapun kondisi angka melek huruf adalah sebagai berikut :



Sumber: BPS, 2017

Gambar 3.63 Angka melek huruf penduduk 15 tahun keatas Provinsi Jambi (%) Tahun 2012-2016

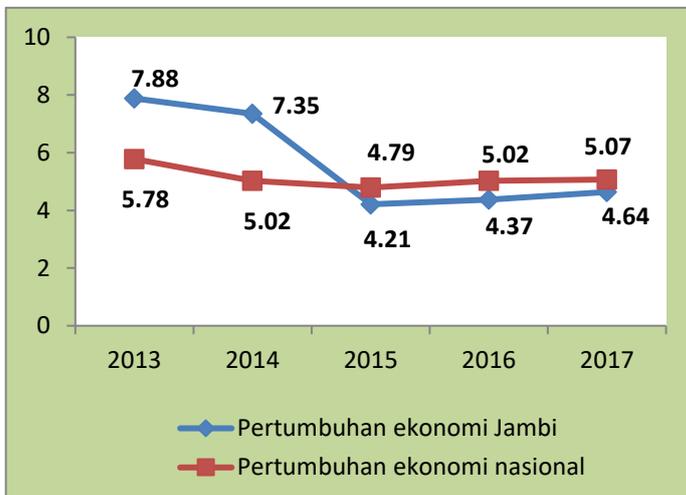
Berdasarkan data tersebut terlihat terjadi penurunan persentase penduduk buta huruf berusia 15 tahun keatas selama lima tahun dari tahun 2012 sampai 2016, oleh karena itu keterlibatan stakeholder sangat diharapkan untuk penuntasan buta aksara di Provinsi Jambi ini, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya melakukan kegiatan-kegiatan penuntasan buta aksara, salah satunya PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sehingga bukan saja yang

sebelumnya belum melek huruf menjadi melek huruf, tapi bagaimana setelah itu dilakukan bimbingan-bimbingan serta diantarkan sampai mengikuti ujian paket A,B dan C.

3.2.3 Kinerja Ekonomi

3.2.3.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode waktu tahun 2013-2017 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,69 persen pertahun. Dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan, maka pertumbuhan ekonomi Jambi rata-rata masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Selama periode yang sama, pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh rata-rata 5,136 persen per tahun.



Sumber: BPS, 2018

Gambar 3.64 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2013 -2017

Bila dirinci berdasarkan tahun, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni 7,88 persen, sementara laju pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 4.21 persen. Pertumbuhan terendah yang dicapai selama kurun waktu 2013-2017 tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Selain dikarenakan oleh faktor eksternal (kondisi ekonomi dunia yang lesu, kondisi ekonomi Indonesia yang juga mengalami penurunan, menurunnya harga minyak dunia) juga disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta

kabut asap yang berlangsung selama lebih kurang empat bulan. Kondisi ini menyebabkan hasil sektor pertanian dan perkebunan mengalami penurunan drastis.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2014 selalu berada di atas nasional, namun seiring dengan lesunya perekonomian nasional dan dunia, tiga tahun terakhir pertumbuhannya selalu berada di bawah nasional walaupun memperlihatkan peningkatan dari tahun 2016 lalu, dimana pada tahun 2017 perekonomian Jambi tumbuh sebesar 4,64%, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 4,37%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan kenaikan pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,95%, diikuti konstruksi sebesar 7,22%, serta informasi dan komunikasi sebesar 6,6%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 terjadi hampir pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor sebesar 10,34 persen tapi

terkoreksi dari sisi impor sebesar 16,74%. Kemudian diikuti komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,21%

Tabel 3.69 PDRB atas Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jambi Tahun 2016-2017

No	Sektor	2016 (Rp. Miliar)	2017 (Rp. Miliar)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34.932,189	36.829,1
2	Pertambangan & penggalan	31.016,888	32.187,0
3	Industri pengolahan	14.267,737	14.698,7
4	Pengadaan Listrik dan gas	68,265	69,4
5	Pengadaan air	178,689	183,3
6	Konstruksi	9.156,964	9.818,0
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	12.579,058	13.123,4
8	Transportasi dan pergudangan	4.235,228	4.485,6
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.406,109	1.517,9
10	Informasi dan komunikasi	4.619,679	4.924,7
11	Jasa keuangan dan asuransi	3.108,019	3.203,1
12	Real estate	1.883,128	1.969,9
13	Jasa perusahaan	1.376,796	1.436,3
14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4.555,653	4.670,6
15	jasa pendidikan	4.277,115	4.458,5
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.490,994	1.572,9
17	jasa lainnya	1.347,121	1.408,3
	PDRB	130.499,632	136.556,7

Sumber: BPS, 2018

3.2.3.2 Inflasi

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi Provinsi Jambi, mulai tahun 2014 dihitung pada 2 kota/ kabupaten yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Bungo.

Tabel 3.70 Nilai Inflasi Tahun 2013-2017 Provinsi Jambi

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi Kota Jambi	8,74	8,72	1,37	4,51	2,68
Inflasi Muaro Bungo	-	8,43	1,41	3,09	4,25

Sumber: BPS, 2018

Kelompok barang jasa penyebab utama inflasi di Kota Jambi dan Muaro Bungo adalah sama yaitu pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sedangkan pada urutan kedua penyebab inflasi di Kota Jambi adalah pendidikan, rekreasi dan olahraga dan urutan kedua penyebab inflasi di Muaro Bungo adalah sandang.

3.3 Realisasi Anggaran

Persentase realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2017 adalah sebesar 90,39% dari total anggaran yang dialokasikan. Persentase realisasi anggaran yang mendukung sasaran-sasaran strategis adalah sebesar 70,36%. Persentase realisasi terkecil berada pada sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik dan realisasi terbesar berada pada sasaran Meningkatkan akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi yang kecil adalah adanya kesalahan penggunaan menu anggaran DAK dimana jenis energi terbarukan yang dikembangkan seharusnya adalah PLTMH namun teranggarkan biogas, sehingga anggaran yang telah disediakan menjadi *idle cash* dan tetap terhitung sebagai besaran anggaran yang dialokasikan. Rincian realisasi anggaran tiap sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.71 Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2017

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	23.850.765.197,30	20.125.560.318,00	84,38
2	Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik	100.636.801.011,00	92.013.028.537,00	91,43
3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	256.163.380.280,01	215.403.059.556,69	84,09
4	meningkatkan kualitas Pendidikan Menengah	372.276.658.014,00	334,685.236.123,00	89,90
5	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	6.331.908.600,00	6.100.667.883,00	96,35
6	Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama	3.250.941.670,00	3.217.520.849,00	98,97

7	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	2.067.541.500,00	2.026.921.400,00	98,03
8	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	6.480.437.200,00	6.154.750.260,00	94,97
9	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)	3.682.162.055,00	3.548.982.401,00	96,38
10	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	4.272.382.134,00	3.309.449.750,00	77,46
11	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal	34.929.390.200,00	25.901.149.062,00	74,15
12	Meningkatnya Indeks Pertanaman pada lahan Tanaman Pangan	9.401.156.550,00	8.722.997.583,00	92,79
13	akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian	671.796.354.869,00	619.990.716.971,89	92,29
14	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik	4.802.569.300,00	2.197.487.068,00	45,76
15	Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	117.036.593.600,00	115.819.406.322,00	98,96
16	meningkatkan tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan	23.841.840.744,50	21.673.075.915,00	90,90
17	Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal	1.465.397.695,00	1.269.896.536,00	86,66
18	Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	9.226.355.834,60	8.679.512.002,00	94,07
19	Menurunnya angka kemiskinan	18.227.101.900,00	16.639.546.736,00	91,29
20	Menurunnya angka pengangguran	7.673.511.450,00	7.202.252.725,00	93,86

21	Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi	673.812.900,00	652.314.274,00	96,81
Jumlah		1.678.087.062.704,41	1.180.648.296.149,58	70,36
Total Belanja Langsung		2.096.868.686.250,60	1.895.325.516.817,03	90,39

Sumber: Badan Keuangan Daerah (diolah), 2018

BAB IV PENUTUP

*Bab IV Berisi:
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja
Pemerintah Provinsi Jambi*

Laporan Kinerja (LKj) merupakan pengejawantahan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Pemerintah Provinsi Jambi juga menjadi makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam kaitannya dengan kedudukan sebagai Pemerintah Provinsi Jambi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2017), namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2016 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai semata-mata adalah berkat kerjasama, partisipasi dan komitmen seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat yang diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, sehingga terget Jambi TUNTAS 2021 dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Secara umum, sebagai pelaksanaan tahun pertama periode RPJMD Tahun 2016-2021, kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2016 adalah sangat baik, karena 32 indikator memenuhi kriteria sangat baik, 3 indikator memenuhi kriteria tinggi, dan hanya 1 indikator dengan kriteria sangat rendah. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa upaya maksimal telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPDP 2016, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk perencanaan yang dikenal sebagai e-planning adalah bagian dari upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/ kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (lppk) dan penilaian akuntabilitas kinerja melalui e-sakip.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan. **Pertama**, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan sumber daya manusia seperti prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dan angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi akreditasi A. Peran Pemerintah Provinsi Jambi diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan berbagai unsur baik Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas, kreatifitas, inovasi, dan komitmen yang kuat dalam upaya mencapai kinerja yang akuntabel sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, Inovasi menjadi penting bagi pemerintah Provinsi Jambi. Perubahan-perubahan kebijakan yang tiba-tiba terutama terkait dengan penghematan anggaran, menuntut adanya inovasi dalam mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, sehingga kekurangan anggaran bukan lagi menjadi persoalan yang penting yang menghambat pembanguana di Provinsi Jambi.

Keempat, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN

Lampiran Berisi:

- *Penghargaan-Penghargaan yang diterima oleh Pemprov Jambi pada tahun 2017*
- *Perjanjian Kinerja Tahun 2017*

Penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2017:

- 1 Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM atas Bantuan Penanganan Kerusakan Warga Binaan di lembaga Pemasarakatan Kelas IIA yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2017. Penghargaan ini diberikan pada tanggal 13 Maret 2017.
- 2 Penghargaan Penanggulangan Konflik Sosial Tahun 2017 dari Menteri Dalam negeri RI pada tanggal 15 Maret 2017 di Jakarta.
- 3 Penghargaan SINDO Government Award Tahun 2017 Bidang Jaminan Sosial Kesehatan yang diberikan dalam penghargaan SINDO weekly Government Award 2017 pada tanggal 3 April 2017 di Jakarta.
- 4 Penghargaan “Pemerintah Provinsi Berprestasi dalam Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 Mei 2017 di Jakarta.
- 5 Penghargaan “Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2017” dari Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 19 Juli 2017 di Jakarta.
- 6 Penghargaan “Setya Lencana Pembangunan” dari Presiden RI yang diserahkan pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional pada tanggal 21 Juli 2017 di Jambi
- 7 Penghargaan “Lencana Melati dari Kwartir Nasional gerakan Pramuka” dari Kepala Kwartir Nasional pada tanggal 14 Agustus 2017 di Jakarta.
- 8 Penghargaan “Lencana Gatra Kencana” atas kontribusi Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung dan membantu TVRI memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dari TVRI pada tanggal 26 Agustus 2017 di Jakarta.
- 9 Penghargaan “Warisan Budaya Tak Benda” Tahun 2017 dari Menteri Pariwisata
- 10 Penghargaan kategori penyelenggaraan dan tokoh teraktif dalam menggelorakan gerakan ayo olahraga melalui kegiatan gowes Pesona Nusantara Tahun 2017 dari Menteri Pemuda dan Olahraga.
- 11 Penghargaan “Anugerah Ki hajar 2016” dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 25 November 2017
- 12 Penghargaan “Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan” dari Menteri Ketenagakerjaan RI Kategori IPK terbaik peringkat pertama berdasarkan urusan ketenagakerjaan kategori kecil pada tanggal 6 Desember 2017.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI**
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, 2017
GUBERNUR JAMBI

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PROVINSI JAMBI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien seiring peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Nilai SAKIP	B
		2. Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan	WTP
		3. Efisiensi Pengelolaan keuangan daerah	108
		4. Indeks transparansi pemerintah	6,5
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat	B
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan menengah, kesadaran dan pengetahuan dalam pengembangan seni budaya serta kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	1. Usia Harapan Hidup	70,7
		2. Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	359
		3. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	33,7
		4. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (persen)	17
		5. Angka melanjutkan ke PT akreditasi A	45,47 %
		6. Tingkat kelulusan SMA dan SMK	99,1%
		7. HAKI karya seni	30
		8. Indeks Kebebasan Berkeyakinan	84,27
		9. IPG	91,02
		10. IDG	63,02
3.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum	1. Indeks Kebebasan Sipil	76,5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) guna mendukung perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah serta terwujudnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal melalui peningkatan indeks pertanaman tanaman pangan	1. TFP	1,1
		2. Persentase Share sektor sekunder terhadap PDRB	20,0%
		3. Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	3.210
		4. Persentase Peningkatan Luas Lahan dengan Indeks Pertanaman: - IP 200 - IP 300	- 1,2% - 1,4%
5.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi, energi dan listrik, serta terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih	1. Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap	75,67%
		2. Jalan dalam kondisi mantap	77,64%
		3. Rasio elektrifikasi	88
		4. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	74%
		5. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	75%
6.	Meningkatnya pengelolaan energi dan SDA yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal sehingga terwujud pengelolaan DAS yang berkualitas	1. Persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan	8%
		2. Persentase perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat <i>good mining practice</i>	15%
		3. Persentase Peningkatan perusahaan proper hijau	8,9
		4. Persentase peningkatan industri ekowisata	8,1
		5. Indeks Tata Kelola Hutan	35

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	26,5%
		7. Persentase penurunan luas lahan kritis	2%
		8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,76
7.	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial ekonomi	1. Angka Kemiskinan	8,05
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,7%
		3. Laju Pertumbuhan Penduduk	2,11

Program	Anggaran
1. Program Pembangunan/ pemeliharaan/ peningkatan/ Pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp.639.497.993.600,-
2. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Rp. 17.664.416.800,-
3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 7.332.723.500,-
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 274.828.000,-
5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 15.593.446.500,-
6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 7.759.813.000,-
7. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Rp. 1.530.545.000,-
8. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Rp. 512.451.000,-
9. Program Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai	Rp. 35.786.878.000,-
10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp. 46.876.756.500,-
11. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp. 36.607.458.100,-

12.	Program Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp.	1.662.886.000,-
13.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Rp.	726.821.800,-
14.	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Rp.	1.338.398.600,-
15.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Rp.	1.234.320.000,-
16.	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Rp.	3.435.513.250,-
17.	Program Pembangunan PSU Perumahan & Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi	Rp.	12.349.702.250,-
18.	Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	Rp.	46.912.067.000,-
19.	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp.	2.198.893.450,-
20.	Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Rp.	1.228.211.000,-
21.	Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan	Rp.	588.802.500,-
22.	Program Fasilitasi, Bantuan Teknis dan Sosialisasi Bid. Perumahan	Rp.	1.721.020.000,-
23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur ke-PU-an	Rp.	24.433.013.450,-
24.	Program operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA	Rp.	6.683.965.700,-
25.	Program Kualitas pengelolaan SDA Terpadu	Rp.	2.054.877.900,-
26.	Program Pengembangan Energi	Rp.	6.719.569.300,-
27.	Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Rp.	343.376.506,-
28.	Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp.	742.021.189,-
29.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Rp.	6.283.025.009,-
30.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp.	17.174.081.960,-
31.	Program Pendidikan SMA	Rp.	55.717.828.245,-
32.	Program Pendidikan SMK	Rp.	50.249.349.600,-
33.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp.	10.906.418.700,-
34.	Program BOSDA dan Beasiswa	Rp.	99.938.645.000,-
35.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp.	22.302.307.582,-
36.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	1.727.024.200,-
37.	Program Pengawasan obat dan Makanan	Rp.	43.965.476,-
38.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	891.624.000,-
39.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp.	3.218.359.450,-

40.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Rp. 80.879.371.704,-
41.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Rp. 4.886.697.079,-
42.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Rp.114.000.000.000,-
43.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 786.942.600,-
44.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 1.915.213.750,-
45.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 1.293.500.582,-
46.	Program Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Rp. 41.511.000,-
47.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp. 122.234.000,-
48.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp. 152.836.000,-
49.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp. 529.838.000,-
50.	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Rp. 603.821.711,-
51.	Program Peningkatan Balai Kesehatan	Rp. 2.707.189.800,-
52.	Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp. 3.281.079.700,-
53.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 74.998.000,-
54.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Rp. 301.492.000,-
55.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (Jamkesmas Provinsi)	Rp. 4.000.000.000,-
56.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 713.250.000,-
57.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Rp. 956.336.000,-
58.	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp. 1.063.700.000,-
59.	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Rp. 220.000.000,-
60.	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Rp. 1.600.000.000,-
61.	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi, Tuna Sosial, PSK, Narkoba)	Rp. 562.200.000,-
62.	Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi Bantuan dan Jaminan Sosial PMKS	Rp. 391.917.000,-
63.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 1.462.183.000,-
64.	Program Penanggulangan Pra Bencana	Rp. 700.328.500,-
65.	Program Penanggulangan Bencana dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan	Rp. 474.448.000,-
66.	Program Penanggulangan Pasca Bencana	Rp. 636.835.500,-

67.	Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan	Rp.	563.838.000,-
68.	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	Rp.	1.116.993.450,-
69.	Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Rp.	2.873.264.350,-
70.	Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Rp.	1.839.454.600,-
71.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp.	626.430.000,-
72.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	1.559.202.000,-
73.	Program Pengembangan Standarisasi Nasional	Rp.	910.347.000,-
74.	Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia	Rp.	1.054.755.000,-
75.	Program Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	118.000.000,-
76.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp.	500.705.000,-
77.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	642.425.000,-
78.	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Rp.	245.641.717,-
79.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Rp.	800.508.417,-
80.	Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	Rp.	2.180.359.250,-
81.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp.	1.520.112.061,-
82.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp.	6.594.997.539,-
83.	Program Peningkatan Produksi dan Teknologi Budidaya Perkebunan	Rp.	17.495.466.774,-
84.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perkebunan	Rp.	3.880.538.500,-
85.	Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Rp.	966.940.000,-
86.	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Rp.	3.989.178.000,-
87.	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Rp.	671.954.000,-
88.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	542.820.000,-
89.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp.	6.542.356.800,-
90.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp.	10.930.645.100,-
91.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Konservasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Rp.	5.166.481.000,-
92.	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	2.245.785.550,-
93.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rp.	959.560.840,-

94.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp.	1.430.769.994,-
95.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp.	1.214.776.100,-
96.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Rp.	3.079.520.300,-
97.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp.	591.817.000,-
98.	Program Peningkatan kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp.	844.899.700,-
99.	Program Perencanaan dan Pengembangan	Rp.	775.263.000,-
100.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp.	1.534.050.000,-
101.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp.	1.841.570.000,-
102.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.	228.308.249,-
103.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Rp.	848.224.750,-
104.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp.	498.506.500,-
105.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Rp.	11.873.076.374,-
106.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Rp.	1.099.462.300,-
107.	Program Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp.	3.170.052.915,-
108.	Program Perwujudan Demokrasi yang Makin Kokoh	Rp.	2.074.412.100,-
109.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp.	1.218.629.570,-
110.	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp.	1.610.266.650,-
111.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp.	3.148.607.000,-
112.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp.	1.104.654.500,-
113.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp.	706.606.200,-
114.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran	Rp.	350.968.300,-
115.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	2.282.852.000,-
116.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp.	1.375.881.000,-
117.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp.	1.225.004.000,-
118.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp.	2.111.282.500,-
119.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp.	894.200.500,-
120.	Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp.	3.669.224.750,-

121	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 4.678.629.750,-
122	Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp. 850.726.000,-
123	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp. 4.124.213.000,-
124	Program Pembangunan, Pengembangan Aplikasi dan Telematika	Rp. 1.134.927.600,-
125	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 2.151.235.000,-
126	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 1.434.046.400,-
127	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Rp. 553.233.700,-
128	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Rp. 7.095.826.050,-
129	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp. 1.608.659.749,-
130	Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan	Rp. 625.304.800,-
131	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 3.108.352.100,-
132	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 1.162.273.000,-
133	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Rp. 1.819.572.000,-
134	Program Pengembangan Kemitraan	Rp. 350.000.000,-
135	Program Layanan, Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp. 884.578.900,-
136	Program Pengembangan Perpustakaan	Rp. 149.087.600,-
137	Program Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan	Rp. 224.393.100,-
138	Program Pembinaan dan Layanan Kearsipan SKPD Provinsi, Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, Parpol, Ormas dan Perorangan	Rp. 306.292.000,-
139	Program Pengelolaan dan Penataan Kearsipan SKPD Provinsi, Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, Parpol, Ormas dan Perorangan	Rp. 349.240.200,-
140	Program Pengembangan Lembaga Kearsipan	Rp. 112.306.750,-
141	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Rp. 769.692.500,-
142	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 1.327.578.600,-
143	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.863.661.355,-
144	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 1.548.169.000,-
145	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp. 1.510.000.000,-
146	Program Perencanaan Pengembangan Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 1.338.890.000,-
147	Program Penataan, Perencanaan, dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi	Rp. 287.085.304,-
148	Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka	Rp. 2.359.909.429,-

149	Program Profesionalisasi PNS	Rp. 2.094.600.470,-
150	Program Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian	Rp. 443.280.600,-
151	Program Peningkatan Kualitas Informasi Kepegawaian	Rp. 540.547.900,-
152	Program Manajemen Pelayanan Kediklatan	Rp. 560.556.000,-
153	Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Rp. 5.398.790.000,-
154	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 2.191.719.256,-
155	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.345.634.550,-
156	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Rp. 228.308.249,-
157	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Rp. 44.776.570.000,-
158	Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan	Rp. 339.324.950,-
159	Program Fasilitasi Kehidupan Umat Beragama	Rp. 5.888.123.500,-
160	Program Perencanaan dan Peraturan Daerah Provinsi.	Rp. 801.813.700,-
161	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	Rp. 469.070.850,-
162	Program Advokasi Hukum dan HAM	Rp. 920.164.800,-
163	Program Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Rp. 323.184.120,-
164	Program Pembinaan, Fasilitasi, Pelayanan dan Tatakelola Pemerintahan Serta Otonomi Daerah	Rp. 1.242.402.083,-
165	Program Penataan Batas dan Wilayah Administrasi	Rp. 682.360.315,-
166	Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Rp. 14.199.571.000,-
167	Program Reformasi Birokrasi	Rp. 1.810.136.263,-
168	Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kerjasama	Rp. 648.723.710,-

Jambi, 2017

GUBERNUR JAMBI

H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI